

PENGARUH KORUPSI, *ECONOMIC OPENNESS*, DAN *ECONOMIC FREEDOM* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(STUDI PADA NEGARA KAWASAN ASEAN PERIODE 2009-2018)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

ANINDITA RAMADHANTI

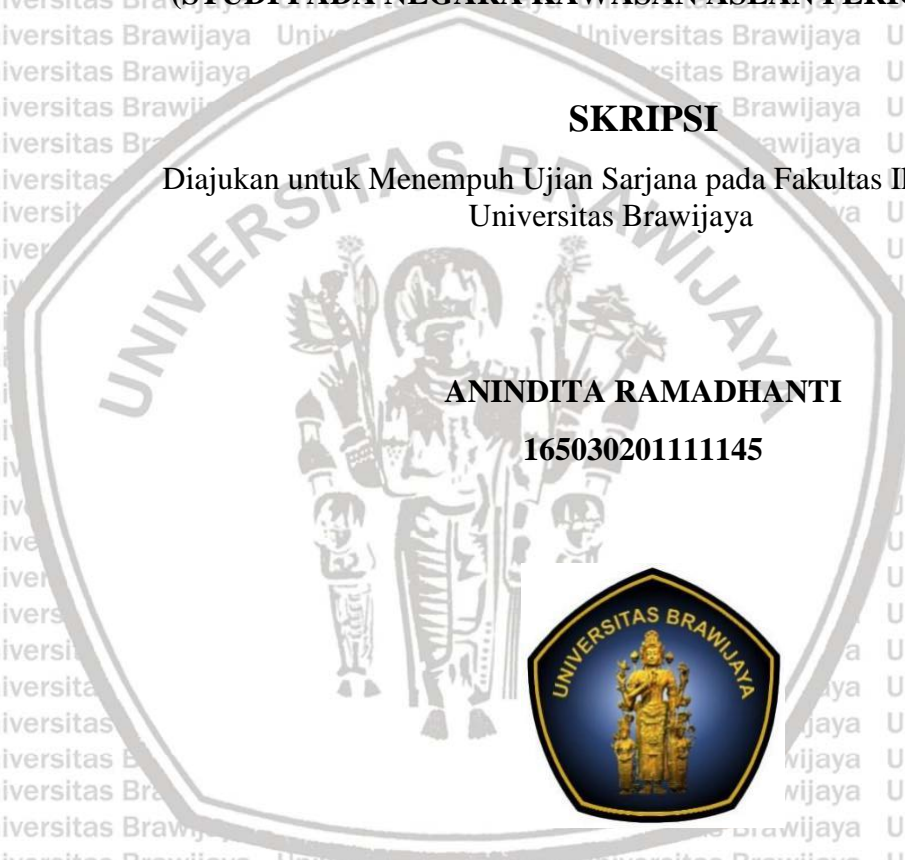
165030201111145

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS**

MALANG

2020



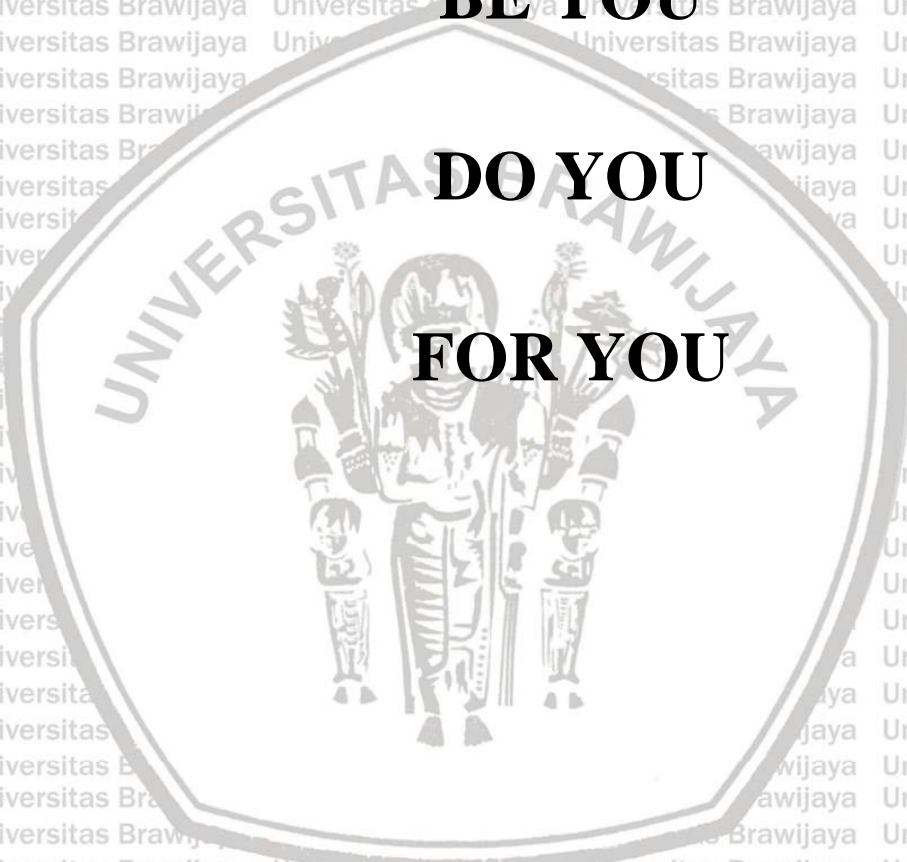


MOTTO

BE YOU

DO YOU

FOR YOU



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Korupsi, *Economic Openness*, dan *Economic Freedom* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Negara Kawasan ASEAN Periode 2009-2018)

Disusun oleh : Anindita Ramadhanti

NIM : 165030201111145

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Kosentrasi/Minat : Manajemen Keuangan

Malang, 23 April 2020
Komis Pembimbing
Ketua



Sri Sulasmivati, S.Sos., M.AP
NIP. 19770420 200502 2 001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 8 Juni 2020
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Anindita Ramadhanti
Judul : Pengaruh Korupsi, Economic Openness, dan Economic Freedom Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Negara Kawasan ASEAN Periode 2009-2018)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Penguji

Handwritten signature of Sri Sulasmiyati, dated 23-Jun-20. Below the signature is the text: Sri Sulasmiyati, S.Sos., M.AP NIP. 9770420 200502 2 001

Anggota Penguji 1

Handwritten signature of Cacik Rut Damayanti

Cacik Rut Damayanti, M.Prof.Acc., D.BA NIP. 197909082005012001

Anggota Penguji 2

Handwritten signature of Nur Imamah

Nur Imamah, Dr. SAB., MAB., Ph.D NIP. 198205272008012013

PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 23 April 2020



Anindita Ramadhanti
NIM. 165030201111145



RINGKASAN

Anindita Ramadhanti, 2020, **Pengaruh Korupsi, *Economic Openness* dan *Economic Freedom* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Negara Kawasan ASEAN Periode 2009-2018)**, Sri Sulasmisyati, S.Sos., M.AP, 156 Hal + xvi

Pertumbuhan ekonomi yang cepat secara umum merupakan tujuan makroekonomi dari negara-negara berkembang dalam jangka menengah hingga panjang. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness*, dan *index of economic freedom* terhadap laju *gross domestic product* secara simultan dan parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan menggunakan data sekunder berupa gabungan dari data *cross section* yaitu 6 negara di kawasan ASEAN dan *time series* adalah 10 tahun yang tersedia dan dipublikasikan oleh *Transparency International*, *World Bank* dan *Heritage Foundation*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *random effect*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* berpengaruh terhadap laju *gross domestic product*. Serta, secara parsial hanya variabel *financial openness* berpengaruh terhadap *gross domestic product* dikarenakan sampel pada penelitian ini merupakan negara berkembang. Sedangkan secara parsial variabel *corruption perception index* dan *index of economic freedom* berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap laju *gross domestic product*. Selain itu, variabel *trade openness* secara parsial berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap *gross domestic product*.

Kata Kunci: Korupsi, *Economic Openness*, *Trade Openness*, *Foreign Direct Investment* (FDI), *Economic Freedom*, *Gross Domestic Product* (GDP), Data Panel

SUMMARY

Anindita Ramadhanti, 2020, *The Effect of Corruption, Economic Openness, and Economic Freedom on Economic Growth (The Case of ASEAN Region Period 2009-2018)*, Sri Sulasmisyati, S.Sos., M.AP, 156 Pages + xvi

Rapid economic growth in general are the macroeconomic objective of developing countries into the medium and long term. One measure of economic growth is the rate of economic growth. This research is aims to determine and explain the effect of corruption perception index, trade openness, financial openness, and index of economic freedom on gross domestic product rate simultaneously and partially. The type of research used is explanatory research with a quantitative approach. The sampling technique uses purposive sampling, using secondary data in the form of a cross section of data that is 6 countries in the ASEAN region and the time series is 10 years available and published by Transparency International, The World Bank and Heritage Foundation. The analytical method used is panel data regression with random effect models.

The results of this study indicate that simultaneously variables of corruption perception index, trade openness, financial openness, and index of economic Freedom had a significant effect on gross domestic product rate. Partially, only the financial openness variable that influences gross domestic product rate because the sample in this study a developing country. While partially the variable corruption perception index and index of economic freedom have insignificant effect and have a positive relationship with gross domestic product rate. In addition, the trade openness variable partially has insignificant effect and has a negative relationship to gross domestic product rate.

Keywords: *Corruption, Economic Openness, Trade Openness, Foreign Direct Investment (FDI), Economic Freedom, Gross Domestic Product (GDP), Panel Data.*

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Korupsi	24
1. Definisi Korupsi	24
2. Penyebab Korupsi	24
3. Dampak Korupsi	25
4. Pengukuran Korupsi	26
5. <i>Corruption Perception Index</i>	27
C. <i>Economic Openness</i>	28
1. Definisi <i>Economic Openness</i>	28
2. Aspek <i>Economic Openness</i>	29
D. <i>Economic Freedom</i>	32
1. Definisi <i>Economic Freedom</i>	32
2. Penilaian <i>Economic Freedom</i>	33
E. Pertumbuhan Ekonomi	37

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	37
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	37
3. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	43
4. <i>Gross Domestic Product</i>	47
5. Jenis Pengukuran <i>Gross Domestic Product</i>	47
F. Pengaruh Antar Variabel.....	49
1. Pengaruh <i>Corruption Perception Index</i> terhadap Laju GDP.....	49
2. Pengaruh <i>Trade Openness</i> terhadap Laju GDP.....	50
3. Pengaruh <i>Financial Openness</i> terhadap Laju GDP.....	51
4. Pengaruh <i>Index of Economic Freedom</i> Terhadap Laju GDP.....	52
G. Model Konsep Penelitian.....	54
H. Model Hipotesis.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	58
1. Variabel Independen.....	58
2. Variabel Dependen.....	59
3. Definisi Operasional Variabel.....	59
D. Populasi dan Sampel.....	62
1. Populasi.....	62
2. Sampel.....	62
E. Jenis dan Sumber Data.....	64
F. Teknik Pengumpulan Data.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	65
2. Analisis Statistik Inferensial.....	66
3. Uji Koefisien Determinasi.....	75
4. Uji Hipotesis.....	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	78
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	78
1. <i>Transparency International (TI)</i>	78
2. <i>World Bank</i>	79
3. <i>Heritage Foundation</i>	80

B.	Gambaran Umum Negara Sampel Penelitian	81
1.	Filipina	81
2.	Indonesia	82
3.	Malaysia	83
4.	Thailand	84
5.	Vietnam	86
6.	Kamboja	87
C.	Penyajian Data	88
1.	Laju <i>Gross Domestic Product</i>	88
2.	<i>Corruption Perception Index</i>	90
3.	<i>Trade Openness</i>	92
4.	<i>Financial Openness</i>	94
5.	<i>Index of Economic Freedom</i>	96
D.	Teknik Analisis Data	98
1.	Analisis Data Deskriptif	98
2.	Analisis Statistik Inferensial	100
3.	Uji Koefisien Determinasi	113
4.	Uji Hipotesis	114
E.	Interpretasi Hasil Penelitian	117
1.	Pengaruh Simultan dari <i>Corruption Perception Index</i> , <i>Trade Openness</i> , <i>Financial Openness</i> dan <i>Index of Economic Freedom</i> Terhadap Laju <i>Gross Domestic Product</i>	117
2.	Pengaruh <i>Corruption Perception Index</i> Secara Parsial Terhadap Laju <i>Gross Domestic Product</i>	118
3.	Pengaruh <i>Trade Openness</i> Secara Parsial Terhadap Laju <i>Gross Domestic Product</i>	119
4.	Pengaruh <i>Financial Openness</i> Secara Parsial Terhadap Laju <i>Gross Domestic Product</i>	121
5.	Pengaruh <i>Index of Economic Freedom</i> Secara Parsial Terhadap Laju <i>Gross Domestic Product</i>	122
F.	Keterbatasan Penelitian	124
BAB V PENUTUP	125
A.	Kesimpulan	125
B.	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2	Variabel dan Pengukurannya	59
Tabel 3	Proses Pemindaian Sampel	63
Tabel 4	Data Variabel Laju Gross Domestic Product Tahun 2019-2018	88
Tabel 5	Data Variabel Corruption Perception Index Tahun 2009-2018	90
Tabel 6	Data Variabel Trade Openness Tahun 2009-2018	92
Tabel 7	Data Variabel Financial Openness Tahun 2009-2018	94
Tabel 8	Data Variabel Index of Economic Freedom Tahun 2009-2018	96
Tabel 9	Hasil Analisis Deskriptif	99
Tabel 10	Hasil Uji Jarque-Bera 1	101
Tabel 11	Hasil Uji Jarque-Bera 2 Setelah Uji Outlier	102
Tabel 12	Hasil Uji VIF	102
Tabel 13	Hasil Uji Harvey	103
Tabel 14	Hasil Uji Breusch-Godfrey	104
Tabel 15	Uji Chow	105
Tabel 16	Uji Hausman	106
Tabel 17	Uji LM	106
Tabel 18	Hasil Analisis Regresi Data Panel	107
Tabel 19	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	113
Tabel 20	Hasil Uji F	114
Tabel 21	Hasil Uji t	115



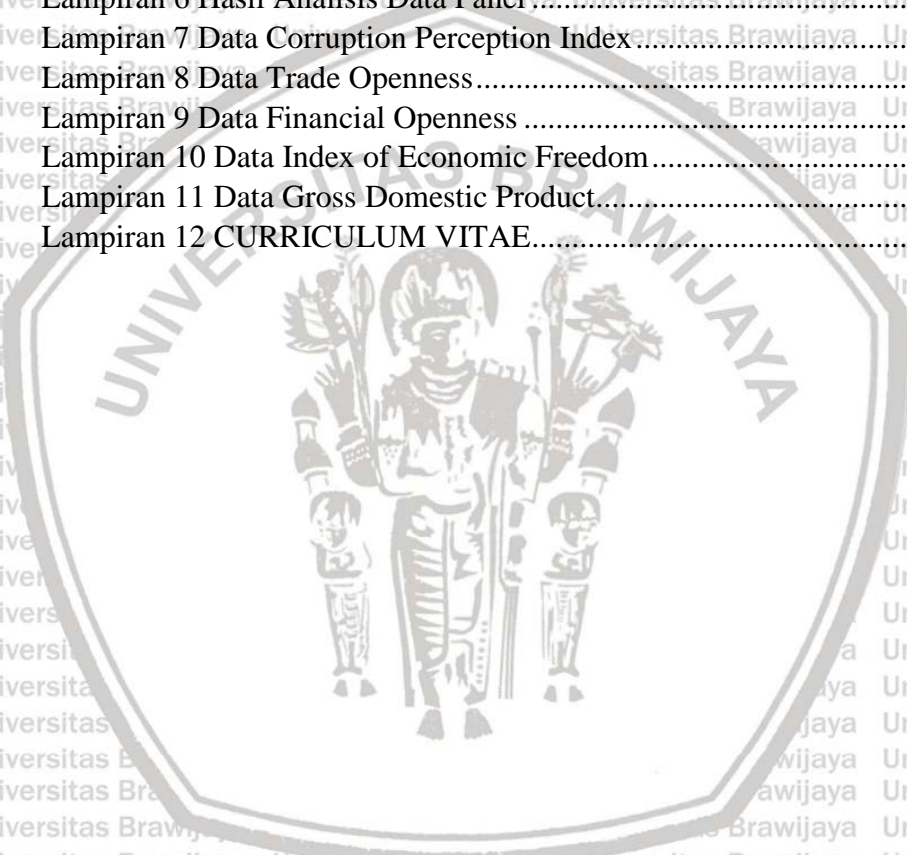
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
	Gambar 1 GDP Negara Kawasan ASEAN 2018	10
	Gambar 2 Model Konsep Penelitian	54
	Gambar 3 Model Hipotesis	55
	Gambar 4 Perkembangan Laju GDP Tahun 2009-2018	89
	Gambar 5 Perkembangan Corruption Perception Index Tahun 2009-2018	91
	Gambar 6 Perkembangan Trade Openness Tahun 2009-2018	93
	Gambar 7 Perkembangan Financial Openness Tahun 2009-2018	95
	Gambar 8 Perkembangan Index of Economic Freedom Tahun 2009-2018	97



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
	Lampiran 1 Data Penelitian.....	133
	Lampiran 2 Hasil Deteksi Nilai Outlier.....	134
	Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif.....	136
	Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik.....	137
	Lampiran 5 Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	139
	Lampiran 6 Hasil Analisis Data Panel.....	141
	Lampiran 7 Data Corruption Perception Index.....	143
	Lampiran 8 Data Trade Openness.....	147
	Lampiran 9 Data Financial Openness.....	147
	Lampiran 10 Data Index of Economic Freedom.....	148
	Lampiran 11 Data Gross Domestic Product.....	155
	Lampiran 12 CURRICULUM VITAE.....	156



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena globalisasi yang semakin menipisnya batas menuntut setiap negara untuk selalu meningkatkan kinerja perekonomiannya melalui berbagai upaya.

Dimana sudah tidak ada lagi kendala untuk melakukan mobilisasi baik dalam bentuk produk, jasa, buruh maupun modal. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama internasional, perdagangan internasional, ekspansi perusahaan multinasional, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi internasional ini, ditandai oleh semakin tingginya volume aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut menjadikan suatu negara dalam keberhasilan pembangunan dengan meningkatkan percepatan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara luas.

Tolak ukur kategorisasi keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, struktur sosial, sikap masyarakat institusi nasional, ketimpangan pendapatan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (Mulyani, 2014).

Negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila memiliki pendapatan per kapita tinggi, indeks pembangunan manusianya tinggi, kualitas hidup rakyat terjamin dan sejahtera, pembangunan infrastruktur tinggi, teknologi berkembang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau stabil. Sedangkan negara berkembang umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif.

Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi yang lebih

menunjukkan kualitas. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada perubahan yang ditunjukkan dengan kuantitas (*World Bank*, 2014). Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan mengalami peningkatan status.

“Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah produksi barang dan jasanya meningkat pada periode tertentu” (Rahardja dan Manurung, 2008:5). Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi melihat kemampuan suatu negara sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Sukirno, 2013:423).

Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Negara dengan kondisi perekonomian yang terus bertumbuh menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut terjamin, dan sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi yang lambat akan terjadinya kemunduran ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi ekonomi dan sosial yang merugikan masyarakat, seperti pertambahan pengangguran, dan kemerosotan taraf kemakmuran (Muchtolifah, 2012:6).

Pertumbuhan perekonomian suatu negara secara umum dapat dilihat dari jumlah *Gross Domestic Product* (GDP), *Gross National Product* (GNP), GDP per kapita, dan pendapatan per kapita negara tersebut (Tach *et al.* 2017). Pada penelitian ini, variabel yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu negara adalah laju *Gross Domestic Product* (GDP). GDP memiliki peran penting dalam menganalisis suatu permasalahan makro ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijakan (Rahman dan Jakaria, 2015). GDP menyatakan pendapatan total dan

pengeluaran total nasional atas *output* barang dan jasa (Mankiw, 2007:16). GDP menggambarkan pendapatan nasional yang dianggap ideal di suatu negara dikarenakan barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya oleh faktor produksi dalam negeri melainkan juga adanya kontribusi dari faktor produksi luar negeri (Sukirno, 2013:17).

Kegunaan GDP diantaranya untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Hal tersebut mendefinisikan GDP sebagai cerminan dari kinerja perekonomian. Menurut Rahman dan Jakaria (2015) tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menunjukkan tingkat kinerja ekonomi yang sangat baik.

Walaupun tingkat kinerja ekonominya belum sampai melihat lebih jauh ke tingkat kesejahteraan yang merata di warga negaranya. Hal ini dapat mengetahui perkembangan perekonomian negara dari waktu ke waktu sehingga dapat membuat kebijakan lebih akurat dalam pembangunan ekonomi.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, beberapa diantaranya teknologi, tenaga kerja, dan pendidikan (Sukirno, 2013:429-431).

Selain itu, sebagian besar ekonom memandang beberapa faktor lain yaitu korupsi menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi (Hariyani *et al.*, 2016). Menurut Blackburn *et al.* (2005) korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Dalam penelitian lain, Lopa (2011:67) menyatakan korupsi sebagai *economic corruption* yang merupakan penyelewengan di bidang materi (uang) dengan manipulasi di bidang ekonomi yang merugikan perekonomian negara.

Menurut *Transparency International* (2017), korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan untuk tujuan pribadi. *Transparency International* merupakan salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang didedikasikan untuk transparansi dan kejujuran dalam kehidupan publik dan ekonomi. *World Bank* (2008) memperkirakan bahwa lebih dari US\$10 milyar atau sekitar 5% dari GDP dunia setiap tahun hilang dikarenakan korupsi. Hal tersebut menyatakan, korupsi pada dasarnya adalah sebuah misalokasi sumberdaya, yang artinya, korupsi memindahkan sumberdaya dari kegiatan produktif atau memiliki manfaat sosial tinggi ke kegiatan tidak produktif dan menciptakan biaya sosial. Menurut *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2017-2018, korupsi menjadi kendala terbesar pembangunan daya saing nasional terlihat dalam peringkat daya saing nasional.

Saha *et al.* (2009) menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah kurangnya kompetisi. Kompetisi dalam ekonomi mendorong liberalisasi yang merefleksikan sejauh mana intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi, khususnya sektor swasta. Tingkat korupsi di negara-negara seluruh dunia termasuk Asia telah berkembang dengan cara negatif dan mendapatkan diversifikasi (Campos & Pradhan, dalam Tach *et al.* (2017). Diversifikasi ini adalah usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara.

Hasil penelitian Tach *et al.* (2017) menemukan bukti bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi pada negara Asia periode 2004-2015. Hal tersebut menunjukkan semakin rendah tingkat korupsi, yang menandakan negara sangat korup akan menurunkan pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara dengan investasi tingkat rendah dan tata kelola berkualitas rendah. Pada penelitian

ini, peneliti menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara dalam sektor publik yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. CPI merupakan indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara (Hariyani *et al.*, 2016).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam, dan perkembangan teknologi (Sandra, 2017). Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, iklim, geografi, struktur ekonomi maupun teknologi. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan dan mendorong setiap negara untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain (Sutedi, 2014:3).

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Chalid (2010), proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi satu negara akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam dan keterampilan penduduk tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung. Hal tersebut membuat negara melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain disebut sebagai perekonomian terbuka atau *economic openness*.

Menurut Yakkikaya (2003) *economic openness* merupakan ukuran kebijakan untuk mengatur arus barang dan jasa serta arus modal secara internasional baik

dalam bentuk membatasi maupun memperlonggar hubungan internasional antar negara. Chalid (2010) menyatakan *economic openness* berkontribusi dalam timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin pesat. Chang *et al.* (2009) menyatakan bahwa *economic openness* akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila disertai oleh perbaikan-perbaikan pada fasilitas pendukungnya, yakni mencakup sektor finansial, infrastruktur publik, kualitas modal manusia, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta stabilitas perekonomian dan harga. Pada penelitian Simorangkir (2006) dan Yanikkaya (2003) mengatakan bahwa *trade openness* dan *financial openness* merupakan bentuk kebijakan *economic openness* yang bertujuan untuk mengendalikan instrumen internasional.

Pada penelitian Marelli dan Signorelli (2011) menyatakan bahwa China, Jepang, India, dan Korea Selatan telah berhasil merubah struktur perekonomiannya menjadi lebih baik akibat diterapkannya kebijakan *economic openness* melalui perdagangan dan keuangan internasional. Keberhasilan tersebut mendorong negara berkembang lainnya di dunia untuk memperluas perdagangan dan sektor keuangan internasional, sehingga tingkat perekonomian yang positif dan jangka panjang dapat dicapai. Hal tersebut merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya peningkatan sikap ketergantungan ekonomi yang pada akhirnya akan merusak dinamika perekonomian nasional. Kuncoro (2010:361) menyatakan *trade openness* sebagai salah satu faktor penentu tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu

negara, dimana seberapa jauh peran perdagangan luar negeri terlihat dari rasio antara ekspor ditambah impor terhadap GDP. Dari perdagangan luar negeri, suatu negara akan memperoleh kenaikan pendapatan nasional yang akan menaikkan jumlah *output* dan laju pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2007:448).

Pada penelitian ini pengukuran *trade openness* yang diperoleh dari total perdagangan (ekspor + impor) terhadap GDP. Disamping menekankan perdagangan, Makki dan Somwaru (2004) juga menjelaskan bahwa aktivitas pada saluran keuangan internasional atas FDI (*Foreign Direct Investment*) juga harus dilakukan secara intensif, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terdorong positif dan jangka panjang. Karena pada dasarnya, FDI dalam jangka panjang memiliki peran baik bersifat *financial* yang berupa investasi maupun *non-financial* yang didapatkan dari nilai suatu *investment*. Maka, peneliti juga menggunakan *financial openness* sebagai pengukuran *economic openness* yang diperoleh pada investasi asing diukur dengan FDI.

Menurut Smith dalam Chalid (2010), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu membenahi dan menghilangkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang menjadi penghambat terhadap kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara, maupun antara warga masyarakat di negara satu dengan rekannya di negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari *economic freedom* di suatu negara. “*Economic freedom* merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu untuk mengontrol kegiatan ekonominya seperti produksi, konsumsi dan investasi dimanapun” (*Heritage Foundation*, 2017). Beach dan Miles dalam Akin *et al.* (2014) mendefinisikan konsep *economic freedom*

penting untuk negara karena seharusnya tidak ada sanksi tanpa pembatasan negara pada produksi barang dan jasa, distribusi dan konsumsi negara. Dengan adanya kebebasan, suatu negara hanya dapat bertanggung jawab atas kendali kinerja pasar untuk realisasi kegiatan ekonomi. *Economic freedom* harus mampu memberi ruang bagi negara untuk memberdayakan masyarakat agar dapat bekerja, memproduksi, berdagang, dan berinvestasi sesuai dengan pilihan pribadi.

Peneliti dalam mengukur *economic freedom* suatu negara menggunakan *index of economic freedom* yaitu rata-rata nilai keseluruhan terdiri dari empat komponen yang kompleks dengan menunjukkan seberapa terbuka dan ramah bisnis suatu negara dalam bentuk tingkat skala 0-100 yang dikeluarkan oleh *Heritage Foundation*. *Heritage Foundation* merupakan lembaga *think tank* dan institusi pendidikan non-profit yang mengukur tingkat kebebasan ekonomi seluruh dunia. Sehingga melalui *index of economic freedom* dapat mengukur persaingan internasional dengan melepaskan hambatan-hambatan yang ada untuk berada di posisi terdepan dalam kemajuan dan globalisasi. Menurut Gwartney (2009) semakin tinggi tingkat *economic freedom* di suatu negara, semakin tinggi pula kemakmuran negara tersebut.

Pada penelitian Razmi dan Refaei (2013) menyatakan bahwa *index of economic freedom* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

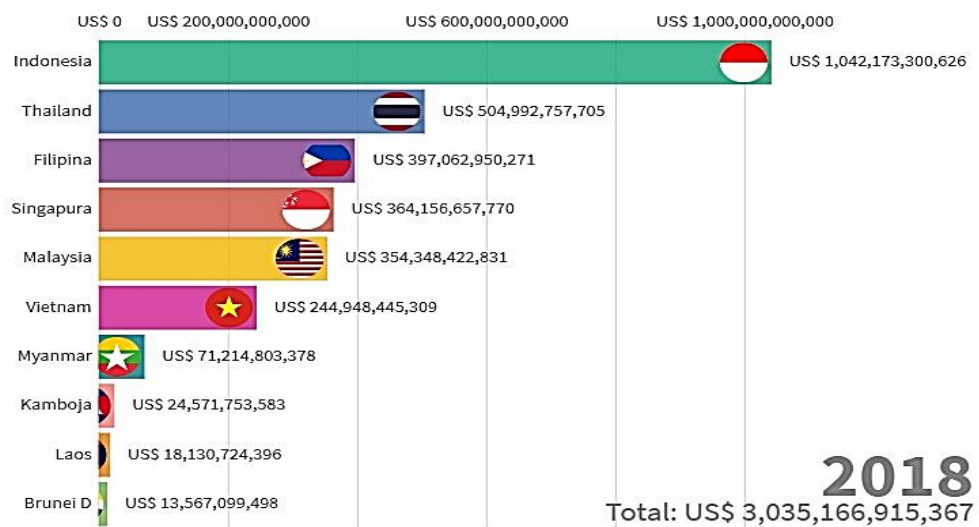
Penelitian lain yaitu Hussain dan Haque (2015) menyatakan bahwa *economic freedom* berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Akin, *et al.* (2014) pada penelitiannya mendukung gagasan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara tingkat *economic freedom* dengan

pertumbuhan ekonomi pada negara yang memiliki pendapatan tingkat tinggi, menengah dan rendah. *Economic freedom* telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara dengan pendapatan menengah ke bawah.

Setiap negara akan senantiasa berusaha agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya, seperti dengan meningkatkan standar hidup dan pendapatan seringkali disertai dengan peningkatan kualitas lembaga politik, meningkatkan proses produksi, investasi baik di dalam maupun di luar negeri, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan nasional negara tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan ekonomi antar negara, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar masing-masing negara untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain. Pembentukan ASEAN (*Association of South Asia Nations*) sebagai ekonomi regional yang sangat terintegrasi merupakan salah satu cerminan dari proses globalisasi. "Globalisasi membantu negara ASEAN untuk bekerja sama dengan seluruh dunia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi" (Hamdi, 2013).

Menurut Wibowo dalam Setiawan (2016) ASEAN sebagai organisasi kerjasama internasional berubah menjadi Komunitas Internasional bernama ASEAN *Community* 2015. Forum ini dibentuk dengan tujuan menciptakan suatu kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi dan stabil dalam keamanan sehingga menjadi kawasan yang makmur dan damai. Hal tersebut membuat negara kawasan ASEAN menjadi salah satu kawasan di dunia yang mencatat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. "Jika ASEAN sebagai sebuah negara, maka dia akan menjadi

kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia dengan gabungan *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar US\$ 2,4 triliun” (www.beritasatu.com diakses pada 29 November 2019). Menurut World Bank (2018) pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan besaran *Gross Domestic Product* (GDP) belum terdapat pendapatan yang setara antar negara ASEAN. Hal tersebut dapat dilihat dalam GDP negara ASEAN berdasarkan GDP yang ada di gambar 1.



Gambar 1 GDP Negara Kawasan ASEAN 2018
Sumber: Katadata, 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sebesar US\$ 1.042 miliar atau setara Rp 14.837 triliun. Adapun Thailand tercatat sebagai negara ASEAN dengan GDP terbesar kedua dengan nilai perekonomian mencapai US\$ 504 miliar atau separuh dari perekonomian Indonesia. Di urutan ketiga adalah Filipina dengan GDP US\$ 397 miliar atau sepertiga dari Indonesia. Sedangkan Singapura yang merupakan negara maju tercatat di urutan keempat dengan GDP

US\$ 364 miliar. Selain itu, Kamboja sebagai GDP terendah di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Perekonomian suatu negara saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar negara lain, seperti dalam perekonomian di ASEAN. Menurut Rahman dan Jakaria (2015) kenaikan perekonomian di satu negara ASEAN menjadi pemicu negara ASEAN lainnya untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian negaranya. Begitu juga sebaliknya bila suatu negara mengalami penurunan ekonomi, maka akan berdampak juga pada negara lain yang memiliki hubungan antar negara tersebut. Saling berkaitan disini dapat diartikan sebagai kemajuan suatu negara dapat membantu negara lain, dan sebaliknya kemunduran ekonomi suatu negara akan menimbulkan dampak negatif bagi negara yang memiliki hubungan tersebut.

Setelah melakukan identifikasi terkait korupsi dan beberapa konsep perekonomian secara global, terlihat bahwa belum terdapat hubungan yang jelas antar negara kawasan ASEAN. Hal ini disebabkan, masih terdapat ketimpangan pendapatan pada setiap negara. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa negara dari kawasan ASEAN sebagai sampel yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Filipina. Negara tersebut memiliki data-data yang lengkap mengenai variabel penelitian. Berdasarkan uraian, hasil penelitian terdahulu, serta teori para ahli, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Korupsi, *Economic Openness*, dan *Economic Freedom* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Negara Kawasan ASEAN Periode 2009-2018)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corruption Perception Index*, *Trade Openness*, *Financial Openness*, *Economic Freedom* berpengaruh secara simultan terhadap Laju *Gross Domestic Product*?
2. Apakah *Corruption Perception Index* berpengaruh secara parsial terhadap Laju *Gross Domestic Product*?
3. Apakah *Trade Openness* berpengaruh secara parsial terhadap Laju *Gross Domestic Product*?
4. Apakah *Financial Openness* berpengaruh secara parsial terhadap Laju *Gross Domestic Product*?
5. Apakah *Index of Economic Freedom* berpengaruh secara parsial terhadap Laju *Gross Domestic Product*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan *Corruption Perception Index*, *Trade Openness*, *Financial Openness*, *Economic Freedom* terhadap Laju *Gross Domestic Product*
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Corruption Perception Index* terhadap Laju *Gross Domestic Product*

3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Trade Openness* terhadap Laju *Gross Domestic Product*
4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Financial Openness* terhadap Laju *Gross Domestic Product*
5. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial *Index of Economic Freedom* terhadap Laju *Gross Domestic Product*

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap berbagai pihak, antara lain:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi peneliti, yaitu untuk menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan serta mendapatkan dan menambah wawasan baru mengenai teori korupsi, *economic openness*, dan *economic freedom* terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - b. Bagi pihak lain, dapat menjadi referensi atau pedoman dan bahan rujukan sebagai masukan untuk penelitian yang lebih lanjut dengan tema yang sama maupun untuk melakukan penilaian mengenai korupsi, ekonomi internasional, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan melihat ukuran korupsi, kebijakan

perdagangan luar negeri serta kebijakan permodalan luar negeri dan kebijakan kerjasama antar negara dalam kebebasan ekonomi

- b. Bagi pelaku bisnis internasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya khususnya mengenai kondisi perekonomian negara ASEAN sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sumber modal untuk mencapai pembangunan nasional di kawasan negara ASEAN.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembukaan dari penelitian yang menjelaskan tentang permasalahan yang di angkat dan alasan pemilihan judul dengan menguraikannya dalam latar belakang. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori dan literatur yang digunakan. Teori tersebut berhubungan dengan permasalahan dan judul yang diangkat oleh peneliti. Bab ini memaparkan penelitian terdahulu, tinjauan teoritis, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

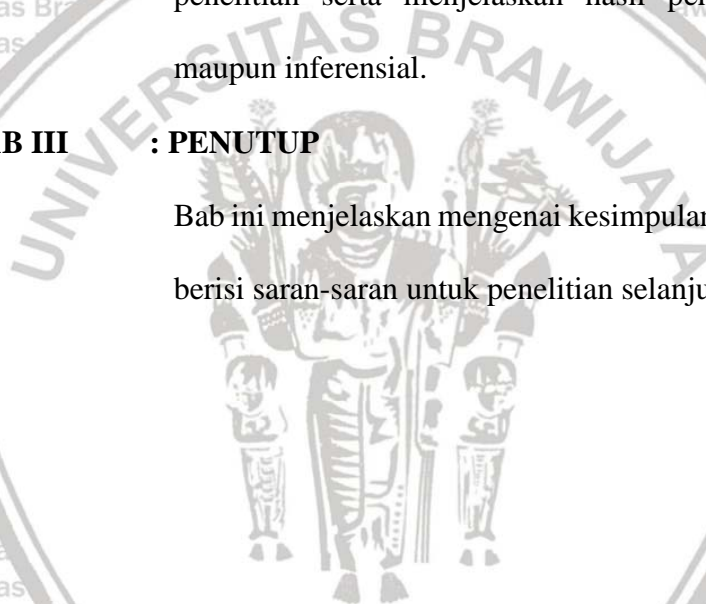
Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi dan sampel penelitian serta menjelaskan hasil penelitian baik deskriptif maupun inferensial.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah di ambil dan berisi saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian sejenis pada periode sebelumnya sangat berperan dalam kelancaran proses penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis adalah sebagai berikut:

1. Razmi dan Refaei (2013)

Penelitian dengan judul "*The Effect of Trade Openness and Economic Freedom on Economic Growth: The Case of Middle East and East Asian Countries*".

Penelitian ini menyelidiki bagaimana dampak *trade openness* dan *economic freedom* pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menggunakan dua model yaitu menggunakan variabel kontrol, *index of economic freedom* dan rasio *trade of GDP* sebagai indikator *economic openness*. Model data penelitian ini menggunakan 17 negara (Timur Tengah dan Asia Timur) selama tahun 2000-2009. Untuk menguji data, menggunakan analisis data panel.

Hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa keterbukaan dan kebebasan ekonomi akan terus dipandang sebagai dua penentu utama pertumbuhan ekonomi.

Studi tersebut menemukan bahwa kebebasan ekonomi bersifat positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Terdapat lima kategori dalam pengukuran *index of economic freedom*, tidak semua kategori berkorelasi positif terhadap pertumbuhan. *Government Size* dan *Access to Sound Money* yang merupakan kategori dalam pengukuran *index of economic freedom* yang berkorelasi negatif

terhadap pertumbuhan. Sedangkan, kategori lainnya berkorelasi positif terhadap pertumbuhan. Selain itu, pengaruh *trade openness* terhadap pertumbuhan ekonomi, bersifat positif pada kedua model pertumbuhan tradisional. Hal tersebut tergantung dengan adanya pengetahuan internasional *spillover*, yang tanpa adanya *economic openness* bisa berdampak negatif.

2. Hassen *et al.* (2013)

Penelitian yang dilakukan Hassen *et al.* (2013) yang berjudul “*Trade Openness and Economic Growth: The Case of Tunisia.*” Penelitian ini menggunakan rentang periode 1975-2010 menggunakan metode OLS. Hubungan keterbukaan dengan pertumbuhan menarik untuk dianalisis secara empiris karena sebagian besar karya teoretis gagal menyelesaikan efek positif atau negatif dari keterbukaan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trade openness*, *foreign direct investment* dan *human capital* diwakili oleh pendaftaran sekolah serta rasio uang yang diambil sebagai proksi untuk pengembangan keuangan memberikan efek positif dan signifikan jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi di Tunisia. Kebijakan perdagangan yang diadopsi Tunisia ditandai oleh efisiensinya yang diwujudkan melalui keterbukaannya ke luar. Tetapi tetap signifikan lemah karena ekonomi Tunisia tidak sepenuhnya diliberalisasi. Dengan demikian, liberalisasi perdagangan di Tunisia telah memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ini karena strategi bisnis yang ditempuh Tunisia sebagai liberalisasi bertahap menuju liberalisasi penuh.

3. Akin *et al.* (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Akin *et al.* dengan judul “*The Impact of Economic Freedom Upon Economic Growth: An Application on Different Income Groups*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kebebasan ekonomi untuk kelompok pendapatan yang berbeda. Oleh karena itu, data dikumpulkan dari 94 negara yang berbeda yang termasuk dalam lima kelompok pendapatan yang berbeda untuk mencakup periode dari 2000 hingga 2010. Dalam penelitian ini, hubungan antara pertumbuhan ekonomi negara dan tingkat indeks kebebasan yang diukur oleh *Fraser Institute* dan sub-komponennya merupakan dipertanyakan melalui metode analisis data panel. Sebagai hasil dari analisis, ditemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan secara statistik antara tingkat kebebasan ekonomi untuk semua kelompok pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dimasukkannya sub-komponen indeks kebebasan ke dalam model, efek dari sub-komponen tersebut bervariasi tergantung pada kelompok pendapatan.

4. Hariyani *et al.* (2016)

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi dan dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Hasilnya menunjukkan bahwa anggaran publik, stabilitas politik, dan populasi perkotaan mempengaruhi tingkat korupsi. Kualitas kelembagaan yang rendah, ditunjukkan oleh kegagalan pemerintah (korupsi), memiliki pengaruh buruk pada kinerja pertumbuhan ekonomi. Data yang

dipergunakan dalam analisis ekonometrika dapat berupa data *time series*, data *cross section*, atau data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 17 negara di kawasan Asia Pasifik untuk kurun waktu 11 tahun (2004-2014).

5. Tach *et al.* (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Tach, *et al.* dengan judul “*Effects of Corruption on Economic Growth – Emperical Study of Asia Countries*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan 19 Negara-negara Asia pada periode 2004-2015 dengan teknik pengolahan data DGMM dan regresi kuantil. Hasil penelitian ini menunjukkan korupsi berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Negara Asia. Variabel lainnya menunjukkan kebebasan demokrasi dan kebebasan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. Boussalham (2018)

Penelitian dengan judul “*The Consequences of Corruption on economic growth in Mediterranean countries: Evidence from Panel data analysis*”. Penelitian ini dilakukan di Negara Mediterania yang mencakup periode 1998-2007. Secara garis besar penelitian ini menguji dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan metode pendekatan ekonometrik dengan regresi panel data, pada sampel penelitian 160 pengamatan. Variabel dependen *GDP* per kapita sebagai faktor pertumbuhan ekonomi dan indeks persepsi korupsi sebagai variabel independen yang bersangkutan. Kemudian terdapat beberapa variabel kontrol makroekonomi. Hasil menggambarkan bahwa korupsi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi negara-negara Mediterania yang dipilih.

7. Christos *et al.* (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Christos *et al.* dengan judul “*Corruption Perception Index (CPI), as an Index of Economic Growth for European Countries*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki fenomena korupsi dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Negara Eropa selain itu meneliti dampak korupsi terhadap tingkat pertumbuhan *GDP* per kapita. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan linier positif antara tingkat pertumbuhan *GDP* per kapita dan perubahan tingkat korupsi, untuk semua kelompok Negara Eropa, bahwa mengurangi tingkat korupsi di suatu negara menyebabkan peningkatan *GDP* dan kekayaan yang signifikan di negara ini.

Berikut adalah gambaran dari ringkasan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
1	Razmi dan Refaei (2013) “ <i>The Effect of Trade Openness and Economic Freedom on Economic Growth: The Case of Middle East and East Asian Countries</i> ”	1. Salah satu variabel yang digunakan adalah <i>trade openness</i> 2. Penelitian menggunakan analisis data panel	1. Objek penelitian pada 17 negara (Timur Tengah dan Asia Timur) 2. Variabel dependen yaitu <i>GDP riil</i> 3. Variabel independen menggunakan 5 indikator <i>index of economic</i> 4. Periode penelitian 2000-2009 5. Terdapat variabel kontrol yaitu <i>physical capital, employment, human capital, population</i>	1. Objek penelitian pada 6 negara ASEAN 2. Variabel dependen yaitu <i>GDP growth</i> Variabel independen menggunakan total dari kategori <i>economic freedom</i> yaitu <i>index of economic freedom</i> 3. Periode penelitian 2009-2018

Lanjutan Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
2	Hassen <i>et al.</i> (2013) “ <i>Trade Openness and Economic Growth: The Case of Tunisia</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>trade openness</i>, <i>FDI inflows</i> sebagai variabel independen dalam pengukuran <i>economic openness</i> Penelitian menggunakan data panel 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan GDP riil sebagai variabel dependen Objek penelitian pada negara berkembang yaitu Tunisia Penelitian dilakukan dengan jangka panjang selama 36 tahun Terdapat variabel Kontrol: <i>Human Capital</i>, <i>Financial Development</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>GDP growth</i> sebagai variabel dependen Penelitian dilakukan lebih dari 1 negara yaitu 6 negara ASEAN Penelitian dilakukan dengan jangka panjang selama 2009-2018 yaitu 10 tahun
3	Akin <i>et al.</i> (2014) “ <i>The Impact of Economic Freedom Upon Economic Growth: An Application on Different Income Groups</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> Variabel dependen yang diteliti yaitu <i>GDP growth</i> yang diperoleh dari World Bank Alat analisis menggunakan data panel 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen <i>gross capital</i>, <i>human capital index</i>, <i>population</i>, indikator <i>economic freedom</i> Objek penelitiannya adalah 94 negara berbeda dengan kelompok pendapatan rendah sampai tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen yaitu <i>index of economic freedom</i> yang merupakan total dari indikator <i>economic freedom</i> Objek penelitian 6 negara ASEAN yang memiliki negara maju berkembang dengan pendapatan berbeda
4	Hariyani <i>et al.</i> (2016) “Analisis Faktor-Faktor	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian memakai analisis data panel 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>corruption perception index</i> sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>corruption perception index</i> sebagai

Lanjutan Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
	yang Mempengaruhi Korupsi di Asia Pasifik	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian memakai analisis data panel Menggunakan <i>economic openness</i> diukur pada <i>trade openness</i> 	<ol style="list-style-type: none"> variabel dependen Objek penelitian adalah 17 negara di Kawasan Asia Pasifik Periode penelitian dalam kurun waktu 11 tahun (2004-2014) 	<ol style="list-style-type: none"> variabel independen Objek penelitian pada 6 Negara di Kawasan ASEAN Periode penelitian dilakukan dalam 10 tahun yaitu 2009-2018
5	Tach <i>et al.</i> (2017) "Effects of Corruption on Economic Growth – Emperical Study of Asia Countries"	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>corruption perception index</i> dan <i>economy freedom index</i> sebagai variabel independen 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan GDP per kapita dalam pengukuran <i>economic growth</i> sebagai variabel dependen Variabel independen lainnya adalah <i>democracy freedom index</i> Objek penelitian pada 19 negara Asia Menggunakan teknik analisa data DGMM Periode penelitian dari 2005-2015 Terdapat variabel kontrol yaitu <i>investment capital, growth rate of population, trade openness,</i> 	<ol style="list-style-type: none"> GDP <i>growth</i> sebagai indikator dalam pengukuran variabel dependen <i>Trade openness</i> dan <i>financial openness</i> digunakan sebagai variabel independen Objek penelitian pada 6 negara ASEAN Menggunakan analisa data panel Periode penelitian dari 2009-2018

Lanjutan Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
			<i>a measure of education, government expenditure</i>	
6	Boussalham (2018) “ <i>The Consequences of Corruption On Economic Growth in Mediterranean Countries: Evidence from Panel Data Analysis</i> ”	1. <i>Corruption perception index</i> sebagai variabel independen	1. GDP per kapita sebagai indikator dari variabel dependen 2. FDI, inflasi, <i>human capital, public investment, population, trade, economic openness</i> sebagai variabel kontrol 3. <i>Trade</i> diperoleh <i>merchandise trade</i> yang merupakan jumlah ekspor dan impor barang dagang dengan nilai GDP	1. <i>GDP growth</i> sebagai indikator dalam pengukuran variabel dependen 2. <i>Trade openness</i> sebagai variabel independen yang merupakan aspek dari <i>economic openness</i> 3. <i>Trade openness</i> diperoleh dari jumlah ekspor dan impor barang dan jasa terhadap nilai GDP
7	Christos <i>et al.</i> (2018) “ <i>Corruption</i> ”	1. <i>Corruption perception index</i> sebagai variabel independen 2. <i>Data corruption perception index</i> diperoleh dari lembaga <i>Transparency International</i>	1. Objek penelitian pada kelompok negara Eropa 2. Periode penelitian selama tahun 2006-2015 3. GDP perkapita sebagai indikator dalam variabel dependen	1. Objek penelitian dilakukan pada 6 negara ASEAN 2. Periode penelitian selama tahun 2009-2018 3. <i>GDP growth</i> sebagai indikator dalam pengukuran variabel dependen

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2019

B. Korupsi

1. Definisi Korupsi

Menurut *World Bank* (2017) korupsi merupakan kegiatan menawarkan, memberi, menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar. Sementara itu sebuah lembaga anti korupsi dunia, *Transparency International* (2017), mendefinisikan korupsi secara umum yaitu “*Corruption is the abuse of entrusted power for private gain*” yang artinya penyalahgunaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat dikatakan terjadi pada setiap negara di dunia tidak terkecuali kawasan ASEAN. Di Indonesia, pengertian korupsi menurut UU NO.31/1999 jo UU NO.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bentuk perbuatan melawan hukum demi memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun badan yang menyebabkan merugikan baik keuangan maupun perekonomian negara, penyuapan, gratifikasi, delik pemborongan, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan dalam jabatan. Menurut Ertimi dan Saeh (2013) definisi korupsi berbeda-beda di setiap negara, dan terpengaruh faktor budaya, sosial, moral dan hukum di masing-masing negara. Sebagai sebuah isu yang dihadapi oleh banyak negara-negara di dunia, korupsi merupakan suatu permasalahan yang penting.

2. Penyebab Korupsi

Saha *et al.* (2009) menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah kurangnya kompetisi. Fokus dari kata kurangnya kompetisi dan dampaknya terhadap korupsi ada dua perspektif, yakni liberalisasi politik atau demokrasi dan liberalisasi

ekonomi. Kompetisi dalam politik pemerintahan merefleksikan demokratisasi sistem tata negara yang mencakup hak-hak politik, kebebasan sipil, dan kebebasan *press* (media), sedangkan kompetisi dalam ekonomi mendorong liberalisasi yang merefleksikan sejauh mana intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi, khususnya sektor swasta.

Setiap individu atau sekelompok orang memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan tindakan korupsi. Menurut Robert, (2001:106) menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut:

“Deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas publik, Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislatif lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba membolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum”

3. Dampak Korupsi

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui *money-politik*. Di sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya penyidikan. Meski begitu, ada juga yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan hambatan baru (Nawatmi, 2014). Dengan demikian, korupsi dapat mengacaukan dunia perdagangan.

Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi diindikasikan dapat mengganggu perputaran roda perekonomian. Sehingga korupsi berdampak buruk bagi perekonomian negara. Rimawan Pradipto dalam Khair (2014) menyatakan terdapat beberapa dampak korupsi:

1. *Misallocation of resources* sehingga perekonomian tidak dapat berkembang secara optimum
2. Biaya sosial korupsi tidak saja dari besarnya uang yang dikorupsi (biaya eksplicit korupsi), namun juga mencakup perbedaan multiplie ekonomi jika uang tersebut tidak dikorupsi dibandingkan dengan jika uang tersebut dikorupsi (biaya implisit korupsi atau *opportunity cost*)
3. Dampak korupsi tidak sebesar jika uang hasil korupsi dicuci keluar negeri selama uang hasil korupsi tidak dicuci keluar negeri.

4. Pengukuran Korupsi

Korupsi salah satu pembahasan yang sulit karena ini adalah fenomena tersembunyi di masyarakat. Kurang kooperatifnya koruptor dalam melakukan transparansi dan cenderung sengaja menutupi tindakannya. Lembaga non-pemerintah antikorupsi di dunia salah satunya adalah *Transparency International* yang mengeluarkan *Corruption Perception Index* sejak 1995. Lembaga ini memberikan informasi terkait mengapa, bagaimana, dan berapa banyak penyalahgunaan korupsi terjadi di sebuah negara untuk membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. "*Corruption Perception Index* (CPI) adalah cara paling pasti untuk menjaga agar tidak terjadi korupsi dan membantu meningkatkan kepercayaan pada orang dan institusi di mana depan kita bergantung" (*Transparency International*, 2017). Perhitungan CPI yang dilakukan *Transparency International* melakukan perhitungan melalui penggabungan data dari sumber di sektor publik dan swasta.

5. *Corruption Perception Index*

Andersson dan Heywood (2009) mengemukakan bahwa *Corruption Perception Index* (CPI) merupakan indeks pengukuran korupsi yang umum digunakan disuatu negara, yang terdapat indeks gabungan dari kombinasi survei dan penilaian korupsi yang dikumpulkan dari berbagai macam institusi yang memiliki reputasi. Alasan mengapa menggunakan CPI dikarenakan kegiatan korupsi yang sifatnya *illegal* dan baru dapat terlihat ketika telah terjadi skandal atau telah terbuka ke publik dan tidak ada cara untuk mengukur tingkat absolut dari suatu korupsi berdasarkan data empiris, maka digunakan persepsi tersebut.

Pada 2008 CPI melibatkan 13 survei dari 11 lembaga independen diantaranya: *ADB's Country Performance Assesment Rating*, *World Economic Forum's Global Competitiveness Report*, *African Development Bank*, *Bartelsmann Foundation*, *Global Insight*, *IMD Internatioanal Switzerland*, *Freedom House*, *World Bank* (IDA dan IBRD), *Economist Intelligence Unit*, *World Competitiveness Center*, *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC), dan *Merchant International Group*. "CPI dipresentasikan dalam bentuk bobot skor sengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipresepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi" (*Transparency International*, 2017). Indeks ini menjadi refrensi dalam berbagai forum diskusi yang membahas mengenai korupsi.

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh badan-badan survei dalam melihat tingkat korupsi suatu negara maka disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi CPI diantaranya (Hambali, 2007):

- a) Persepsi adanya kebocoran penggunaan pinjaman luar negeri berupa *kick back money* dari pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Proksi yang dapat digunakan adalah hutang luar negeri dengan pendapatan nasional.
- b) Persepsi kebocoran keuangan negara yang disebabkan korupsi sistematis oleh para politikus yang menggunakan proksi rasio penawaran uang (M2) terhadap pendapatan nasional (GDP)
- c) *Non performing loan* menggunakan proksi tingkat suku bunga
- d) Persepsi pejabat bank pemerintah menggunakan proksi kredit
- e) Persepsi penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi dan partai politik menggunakan proksi pengeluaran lain-lain.
- f) Persepsi suap untuk kepentingan kelompok tertentu menggunakan proksi penerimaan lain-lain.

C. *Economic Openness*

1. Definisi *Economic Openness*

Perekonomian negara yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain disebut sebagai perekonomian terbuka atau sering disebut *economic openness*.

Negara dengan perekonomian terbuka adalah negara yang melakukan kegiatan ekspor-impor barang atau jasa serta meminjam atau memberikan pinjaman pada pasar modal dunia. (Mankiw, 2007:295). *Economic openness* menggambarkan semakin hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. Joshi dalam Kuntoro *et al.* (2018) mendefinisikan *economic openness* sebagai peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Menurut Hassen *et al.* (2013) *economic openness* berkontribusi dalam mengarahkan sumber daya yang langka ke berbagai sektor yang ditandai dengan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penerapan kebijakan

economic openness dilakukan bertujuan untuk mewujudkan perkembangan dan pergerakan perekonomian yang lebih baik (Yanikkaya, 2003).

2. Aspek *Economic Openness*

Berdasarkan *economic openness* ini dapat dilihat dengan tingkat keterbukaan (*openness*) suatu negara yang erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir (2006) dan Yanikkaya (2003) mengatakan bahwa *trade openness* dan *financial openness* merupakan bentuk kebijakan *economic openness*. Selain itu, Gräbne *et al.* (2018) menyatakan bahwa variabel untuk mengukur dan menyusun tingkat *economic openness* yang bersumber dari statistik ekonomi agregat (*de facto measures*) atau penilaian atas dasar kelembagaan *economic openness* yaitu *trade openness* dan *financial openness*. Berdasarkan hal tersebut *economic openness* mencakup *trade openness* dan *financial openness* yang merupakan variabel dalam pengukuran tingkat *economic openness*. Berikut penjelasan dari aspek *economic openness*:

a. *Trade Openness*

Menurut Yanikkaya (2013) *trade openness* merupakan salah satu ukuran tingkat *economic openness* untuk mengatur pergerakan arus barang dan jasa dalam aktivitas perdagangan internasional. Ekananda Br (2015:3) mendefinisikan perdagangan internasional sebagai aktivitas perdagangan yang diberlakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan, Sukirno (2007:360-361) mendefinisikan perdagangan internasional sebagai interaksi pertukaran dan jasa oleh dua negara atau lebih melalui ekspor dan impor yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil

spesialisasi produk atas keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing – masing negara. Hal tersebut menjadikan *trade openness* dalam kebijakan *economic openness* dapat memberikan peluang untuk mengekspor barang yang faktor produksinya menggunakan sumber daya berlimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya langka atau mahal jika diproduksi di dalam negeri.

Trade openness merupakan proyek yang dijalankan oleh *World Bank* dengan mengeluarkan indeks yang dapat menentukan peringkat atau *level* keterbukaan perdagangan dalam suatu negara. *Trade is the sum of exports and imports of goods and services measured as a share of gross domestic product* (World Bank, 2018).

Menurut Razmi dan Refaei (2013) kebijakan *trade openness* sebagai adanya penghematan yang lebih tinggi dimungkinkan oleh tingkat output yang lebih tinggi, serta adanya peningkatan teknologi yang menjadikan sektor ekspor yang baik menjadi efisien. Pengukuran *trade openness* dalam perdagangan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan dan menilai kinerja perdagangan suatu negara. Pengukuran *trade openness* dalam perdagangan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan dan menilai kinerja perdagangan suatu negara. Pengukuran *trade openness* dihitung berdasarkan proporsi *volume* perdagangan terhadap GDP (Hassen *et al.*, 2013). Hal ini berarti indikator yang digunakan sebagai pengukuran tingkat *trade openness* yang dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Trade Openness} = \frac{\text{export+imports of goods and services}}{\text{GDP}}$$

Sumber: World Bank, 2019

b. *Financial Openness*

Menurut Gräbne *et al.* (2018) *financial openness* disebut sebagai keterbukaan pasar keuangan suatu negara terhadap negara lain. *Financial openness* akan mempromosikan sistem keuangan domestik yang lebih kompetitif dan tangguh. Hal ini mengacu untuk melakukan berbagai hal transaksi keuangan di pasar domestik yang disebut keterbukaan pasar keuangan dan transaksi keuangan masuk yang memungkinkan suatu negara dapat berpartisipasi dalam transaksi di pasar keuangan internasional. Menurut Yanikkaya (2003) berdasarkan kebijakan *economic openness* mendefinisikan *financial openness* untuk mengatur arus modal internasional. Krugman dan Obstfeld dalam Kuntoro *et al.* (2018) menyatakan bahwa arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas operasi atau jaringan bisnisnya di negara-negara lain disebut *Foreign Direct Investment* (FDI). Sedangkan, Sukirno (2013:55) mendefinisikan FDI sebagai aliran arus modal yang berasal dari luar negeri untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi dalam menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian.

Ketika *capital inflow* berupa investasi jangka panjang terlibat pada proses pembangunan akan membawa beberapa hal positif, seperti terjadinya akumulasi modal, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (Simorangkir, 2006). Perkembangan teknologi informasi antara lain menyebabkan aliran ke luar-masuk uang dan dana dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal tersebut menyatakan *financial openness* diperlukan untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, sebagai salah satu sumber

pembiayaan pembangunan, mendukung perkembangan sektor keuangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada penelitian Marelli dan Signorelli (2011) *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai indikator tingkat pengukuran *financial openness*.

D. Economic Freedom

1. Definisi *Economic Freedom*

Economic Freedom kebebasan untuk terlibat dan membuat pilihan tentang kegiatan dan usaha ekonomi.

“Kebebasan ekonomi merupakan hak dasar setiap manusia untuk mengontrol tenaga dan propertinya sendiri. Dalam masyarakat yang bebas secara ekonomi, individu bebas untuk bekerja, memproduksi, mengkonsumsi, dan berinvestasi dengan cara apa pun yang mereka inginkan. Dalam masyarakat yang bebas secara ekonomi, pemerintah mengizinkan tenaga kerja, modal, dan barang untuk bergerak bebas, dan menahan diri dari paksaan atau batasan kebebasan di luar batas yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan kebebasan itu sendiri tolok ukur yang digunakan oleh pemerintah dalam melihat respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan. (*Heritage Foundation*, 2019)”

Economic Freedom yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada *Index of Economic Freedom* yang dikeluarkan oleh *The Heritage Foundation* yang merupakan lembaga *think tank* dan institusi pendidikan non-profit yang mengukur tingkat kebebasan ekonomi seluruh dunia dengan tujuan untuk memberikan informasi kebebasan dalam suatu negara dalam beberapa aspek yang melibatkan 180 negara. Pendekatan yang digunakan pada indeks ini berlandaskan teori kebebasan ekonomi yang dikemukakan oleh Smith. Menurut Smith dalam Chalid (2010) perilaku manusia secara alamiah didorong oleh enam pertimbangan motivasi: kepentingan diri sendiri, pada dasarnya ada unsur simpati dalam

hubungan antara sesama manusia (dari satu individu terhadap individu individu yang lain), hasrat untuk berkelakuan secara bebas, kecenderungan dalam perilaku manusia untuk menjaga sopan santun, kebiasaan untuk bekerja, kecenderungan dalam dunia modern untuk mengangkut barang dan menukarnya dengan barang-barang lain melalui transaksi jual beli.

Sehingga kegiatan perserorangan ataupun kegiatan satuan-satuan usaha harus diberi kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri dan memperbaiki kedudukannya di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam persaingan bebas akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan daripada halnya kalau segala sesuatu itu diatur oleh pemerintah. Pandangan tersebut didasarkan atas saran pendapat, bahwa produksi dan konsumsi serta pembagian kekayaan pada dasarnya sudah ditentukan menurut hukum-hukum ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Djojohadikusumo, 1993:26). Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi, memberikan kepada warga negaranya untuk bekerja, mengonsumsi maupun membeli aset seperti keinginan setiap warga.

2. Penilaian *Economic Freedom*

Economic Freedom adalah ukuran rata-rata sederhana dari 12 kebebasan individu dan setiap ukuran bersifat vital terhadap pengembangan pribadi dan kesejahteraan nasional (Wulandari, 2014). Tingkat *Economic Freedom* suatu negara atau penilaian *index of economic freedom* dilakukan berdasarkan skor *distance to frontier* (dtf). Skor *distance to frontier* merupakan akumulasi perhitungan total rata-rata dari semua indikator *economic freedom*, pada faktor

kuantitatif dan kualitatif yang dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Masing – masing kategori utama diturunkan menjadi beberapa beberapa komponen yang secara total berjumlah 12 komponen dalam bentuk nominal sehingga dapat di akumulasi dalam bentuk nilai di setiap komponennya. Berikut akan dijelaskan masing-masing kategori beserta komponennya menurut *Heritage Foundation* (2017):

a. *Rule of Law*

1. *Property Rights*

Komponen ini merupakan penilaian terhadap penegakan hukum pemerintah kepada individu dalam mengakumulasi milik pribadinya secara bebas. Faktor pengukurnya adalah hak milik fisik, hak milik intelektual, kekuatan perlindungan investor, pengambilan resiko, dan kualitas administrasi.

2. *Judicial Effectiveness*

Kerangka kebijakan yang legal sangat penting untuk melindungi hak semua warga melawan aksi pelanggaran hukum lainnya, termasuk pemerintah dan partai pribadi yang berkuasa. Efektivitas peradilan membutuhkan sistem peradilan yang efisien dan adil untuk memastikan bahwa hukum dihormati secara penuh. Faktor-faktor pengukurannya adalah kebebasan yudisial, kualitas dari proses yudisial, kemungkinan dari meraih keputusan yudisial.

3. *Government Integrity*

Korupsi mengikis kebebasan ekonomi dengan memperkenalkan ketidakamanan dan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi. Perhatian terbesar adalah korupsi sistemik lembaga pemerintah dan pengambilan

keputusan oleh praktek-praktek seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, patronase, penggelapan, dan korupsi. Kurangnya integritas pemerintah disebabkan oleh praktek-praktek seperti mengurangi vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya dan pergeseran sumber daya ke dalam kegiatan lobi yang tidak produktif

b. *Government Size*

1. *Tax Burden*

Penilaian pajak yang dikenakan pada pendapatan perseorangan dan perusahaan baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung sebagai prosentase dari *GDP*.

2. *Government Spending*

Ukuran terhadap pengeluaran pemerintah baik dilihat dari konsumsi dan transfer pemerintah.

3. *Fiscal Health*

Pelebaran defisit dan beban utang yang semakin berkembang disebabkan oleh pengelolaan anggaran pemerintah yang buruk, menyebabkan erosi kesehatan fiskal suatu negara secara keseluruhan.

c. *Regulatory Efficiency*

1. *Business Freedom*

Ukuran kuantitatif terhadap kemampuan untuk memulai, mengoperasikan dan menutup bisnis/usaha yang menunjukkan aturan dan efisiensi pemerintah dalam proses regulasinya.

2. *Labor Freedom*

Ukuran kuantitatif yang mempertimbangkan berbagai aspek dari hukum dan peraturan pasar tenaga kerja suatu negara, termasuk peraturan mengenai upah minimum, PHK, dan jam kerja, ditambah tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai ukuran indikasi kesempatan kerja dalam pasar.

3. *Monetary Freedom*

Kebebasan moneter mengombinasikan ukuran stabilitas harga dengan pengukuran kontrol harga. Baik inflasi maupun kontrol harga akan mendistorsi aktivitas pasar.

d. *Open Markets*

1. *Trade Freedom*

Kebebasan perdagangan adalah ukuran dari tidak adanya hambatan tarif dan non tarif (NTB) yang dapat mempengaruhi ekspor-impor barang dan jasa yang dihitung dari tingkat tarif rata-rata tertimbang dan hambatan non tarif.

2. *Investment Freedom*

Kebebasan Investasi melihat kebijakan suatu negara terhadap aliran investasi modal (dalam dan luar negeri) dengan tujuan untuk menentukan iklim investasi secara keseluruhan

3. *Financial Freedom*

Kebebasan Finansial adalah ukuran kepemilikan saham perbankan dan juga mengukur independensi dari kontrol pemerintah. Kepemilikan negara terhadap bank dan institusi keuangan lainnya akan menimbulkan inefisiensi yang akan mengurangi persaingan dan menurunkan tingkat service yang tersedia.

E. Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Sadono Sukirno (2013:29) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Menurut Rahardja dan Manurung (2008:132) pertumbuhan ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tujuan tahapan kemajuan negara. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah produksi barang dan jasanya meningkat pada periode tertentu.

“Perekonomian nasional merupakan suatu kesatuan, dimana semuanya berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi” (Gilarso, 2008:25).

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat tahun sebelumnya (Riyad, 2012:89). Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang tercermin dari kenaikan pendapatan dalam jangka panjang tanpa memandang besar atau kecilnya pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Output nilai dari pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dan kehidupan masyarakat suatu negara.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena perubahan sosial, khususnya pada masyarakat negara berkembang (Chalid, 2010). Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli dengan

mengacu pada ide untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat negara berkembang. Berikut ialah teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain (Sukirno, 2007:433-437):

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo dan Malthus. Menurut teori ini, mereka menempatkan fenomena ekonomi dalam suatu sistem ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

1) Pandangan Adam Smith

Menurut Adam Smith dalam Chalid (2010), secara sistematis ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Selain itu, Smith juga mengembangkan sistem ekonomi liberal-kapitalis yang lebih mempercayakan perekonomian pada pasar ketimbang perencanaan-perencanaan oleh pemerintah. Hal tersebut terbentuknya kebijakan *laissezfaire*, dimana segala aktivitas perekonomian diharapkan bebas dalam menentukan kegiatan ekonomi tanpa ada campur tangan pemerintah. Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan ekonomi seseorang yang bertujuan untuk keuntungan pribadi sebaiknya juga memiliki efek yang baik untuk masyarakat secara umum. Menurutnya, pasar bebas memiliki mekanisme untuk memperbaiki kondisi yang tidak normal dengan istilah *invisible hand* (tangan tak terlihat).

Menurut Smith dalam Robinson (2009:47) sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi *full employment*,

dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (*stationary state*). Adanya peningkatan produktivitas nasional mengakibatkan peningkatan surplus barang dalam pasar domestik, sehingga untuk menyalurkan seluruh barang yang tersedia dibutuhkan pangsa pasar yang lebih luas. Oleh sebab itu, peran hubungan perdagangan internasional dibutuhkan sebagai pasar yang lebih besar untuk menyalurkan seluruh surplus barang yang tersedia maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional akan cenderung meningkatkan pendapatan nasional (Suparmoko, 2002:31). Menurut Chalid (2010) proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan hubungan keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja atau spesialisasi dan memperluas pasar. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

2) Pandangan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus

Menurut Ricardo dan Malthus, kenaikan dalam produktivitas yang disebabkan oleh kemajuan teknologi akan dapat mempertinggi tingkat upah dan keuntungan. Malthus berpandangan bahwa tingkat akumulasi modal sangat berperan penting bagi proses pertumbuhan nasional, karena pada dasarnya dengan terbentuknya eksistensi akumulasi dalam jangka panjang akan mampu

mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Lanza, 2012). Maka proses pertumbuhan dapat berjalan terus. Tetapi hal itu tidak akan berjalan lama, karena penambahan penduduk selanjutnya akan menurunkan kembali tingkat upah dan tingkat keuntungan. Perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah (Sukirno, 2007:245). Maka menurut Ricardo, kemajuan teknologi tidak dapat menghalangi terjadinya *stationary state*. Kemajuan tersebut hanya mampu mengundurkan masa terjadinya keadaan tersebut (Sukirno, 2007:246).

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo Klasik sebagai penerus dari teori Klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model Klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Sistem ekonomi pemikiran ini didasarkan sepenuhnya pada pemilikan individu atas faktor-faktor produksi, mekanisme pasar dan persaingan pasar (Chalid, 2010).

Teori pertumbuhan Neo-Klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal

mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L).

Solow menekankan bahwa laju pertumbuhan dapat tercipta apabila faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara dapat dikembangkan sebaik mungkin selama produksi memungkinkan terjadi (Mankiw, 2007:184 dan Sukirno, 2007:437). Solow menekankan bahwa untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan jangka panjang pada suatu negara dibutuhkan upaya pengembangan yang penuh pada tingkat tabungan atau investasi, pertumbuhan penduduk dan tingkat penguasaan teknologi (Herlambang *et al.*, 2002:59). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

c. Teori Pertumbuhan Endogen

Konsep ini sering disebut dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*). Teori pertumbuhan endogen (*theory of endogenous growth*) dipelopori oleh Romer (2001) dan Lucas (1988) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru yang membahas mengenai pertumbuhan dalam jangka panjang yang menyatakan bahwa

pendapatan penurunan hambatan-hambatan perdagangan dalam berbagai bentuk, baik tarif maupun non-tarif, akan mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu negara dalam jangka panjang (Sukirno, 2007:436). Menurut Rahardja dan Manurung (2008: 139) dalam teori ini, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya tenaga kerja dan modal, tetapi juga perubahan teknologi (yang terkandung di dalam barang modal atau mesin), kewirausahaan, bahan baku dan material. Selain itu, faktor-faktor lain yang juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah), birokrasi dan dasar tukar internasional (*terms of trade*).

Teori pertumbuhan endogen lebih menekankan bahwa tabungan dan investasi secara berkelanjutan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007:231). Model pertumbuhan endogen berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi memiliki peran yang lebih luas disamping modal. Untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan proses perdagangan internasional atau pertukaran modal secara internasional. Dalam era keterbukaan atau globalisasi merupakan peluang bagi negara berkembang untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sesuai prinsip pada model pertumbuhan endogen. Hal ini menyatakan bahwa perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi. Perubahan sederhana

dalam fungsi produksi bisa membedakan tentang pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi bahwa sebuah negara telah mampu untuk menjaga stabilitas perekonomiannya. Berikut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

a. Korupsi

Pada teori pertumbuhan endogen, faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan selain modal dan tenaga kerja juga teknologi, kewirausahaan, bahan baku dan material. Selain itu juga ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional (*term of trade*). Dengan demikian, korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan kondisi infrastruktur, hukum dan perusahaan.

Menurut Nawatmi (2014) bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Menurut Huntingtin korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan karena (dalam Irawanti, 2015):

- a) Korupsi berperan sebagai insentif finansial yang memungkinkan para pengusaha untuk menghindari keterlambatan
- b) Menurut Rose-Ackerman, korupsi mengurangi distorsi pasar yang berhubungan dengan struktur gaji yang buruk dalam birokrasi
- c) Korupsi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan terbentuknya pasar gelap dan kegiatan penyelundupan yang bisa lebih efisien dibandingkan dengan jika proses transaksi ini melibatkan sektor publik
- d) Korupsi meningkatkan efisiensi apabila sektor swasta bersifat lebih efisien daripada sektor publik dalam mengalokasikan sumber-sumber melalui struktur pajak.

Menurut Mauro dalam Irawanti (2015) korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena:

- a) Menurunkan tingkat investasi
- b) Menimbulkan distorsi pada perkembangan perusahaan dan pertumbuhan sektor ekonomi non formal
- c) Menimbulkan distorsi pada pengeluaran dan investasi publik serta memperburuk infrastruktur fisik.

b. *Economic Openness*

Menurut Hassen *et al.* (2013) *economic openness* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni:

- a) “*Learning by doing*” hal ini menjelaskan semakin banyak memproduksi yang akan memperoleh pengalaman maka semakin meningkatnya produktivitas yang efisien.
- b) Menimbulkan modal sumber daya manusia dengan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja.
- c) Menimbulkan infrastruktur (publik atau swasta) yang efektif dan efisien dalam menciptakan kegiatan produktif

Chang *et al.* (2009) menyatakan bahwa *economic openness* akan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila disertai oleh perbaikan-perbaikan pada fasilitas pendukungnya, yakni mencakup sektor finansial, infrastruktur publik, kualitas modal manusia, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta stabilitas perekonomian dan harga. Kuncoro (2010:361) menyatakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah *trade openness*, dimana seberapa jauh peran perdagangan luar negeri terlihat dari rasio antara ekspor ditambah impor terhadap GDP. Dari perdagangan luar negeri, suatu negara akan memperoleh kenaikan pendapatan nasional yang akan menaikkan jumlah *output* dan laju pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2007:448).

Selain itu, menurut Levine dan Renelt dalam Hassen *et al.* (2013) investasi merupakan faktor yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara *economic openness* dan pertumbuhan ekonomi. Solow menekankan bahwa untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan jangka panjang pada suatu negara dibutuhkan upaya pengembangan yang penuh pada tingkat tabungan atau investasi, pertumbuhan penduduk dan tingkat penguasaan teknologi (Herlambang *et al.*, 2002:59).

Menurut Dreher (2006) *economic openness* mempengaruhi pertumbuhan dengan menurunkan standar sosial dan lingkungan, meningkatnya tingkat kemiskinan pada negara berkembang dan meningkatnya krisis keuangan di suatu negara. Selain itu, Bibi *et al.* (2014) menyatakan bahwa defisit neraca perdagangan akibat dari aktivitas perdagangan membuat *economic openness* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal-hal tersebut merupakan hambatan dari keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dampak positifnya tidak terasa.

c. *Economic Freedom*

Menurut Smith dalam Chalid (2010), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu membenahi dan menghilangkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang menjadi penghambat terhadap kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara, maupun antara warga masyarakat di negara satu dengan rekannya di negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari *economic freedom* di suatu negara. Menurut Akin *et al.* (2014) *economic freedom* merupakan bentuk kegiatan yang bebas bekerja, memproduksi,

berkonsumsi dan berinvestasi yang dilindungi tetapi tidak dihambat oleh negara sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena mendorong suatu negara menjadi lebih produktif dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dengan adanya kebebasan. Sehingga kegiatan ekonomi sebagai penentu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2013:429-432) terdapat beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah hasil hutan dan laut yang dapat diperoleh serta jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Menurut Lewis dalam Jhingan (2007:86) bahwa nilai suatu sumber alam tergantung pada kegunaannya, dan kegunaannya senantiasa berubah sepanjang waktu karena perubahan dalam teknik atau penemuan baru.

b. Jumlah Penduduk

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah sehingga menimbulkan pertambahan

produksi yang lebih cepat. Di samping itu, pada negara yang kemajuan ekonominya belum tinggi dengan adanya penambahan penduduk akan menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi yang tersedia yang menyebabkan produktivitas marginal penduduk rendah.

4. *Gross Domestic Product*

Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi melalui indikator GDP (*Gross Domestic Product*) atau dikenal juga sebagai PDB (Produk Domestik Bruto) yang merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara (Tach *et al.*, 2017). “GDP merupakan nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi disuatu negara dalam periode tertentu” (Mankiw *et al.*, 2007:6). GDP mengukur pendapatan total masyarakat dalam perekonomian dan pengeluaran total untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian. Kesehatan perekonomian dapat tercermin apabila pendapatan total dalam suatu negara sama dengan atau lebih besar dari pada pengeluaran totalnya. Suatu perekonomian baik di negara maju maupun berkembang, hasil produksinya tidak hanya dalam negeri namun juga luar negeri.

5. *Jenis Pengukuran Gross Domestic Product*

Pengukuran GDP dapat digunakan untuk mempelajari perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Karakteristik yang digunakan dalam pengukuran GDP terbagi menjadi dua, yaitu GDP atas dasar harga konstan (GDP riil) dan GDP atas dasar harga berlaku (GDP Nominal) (Sukirno, 2013:36). Tujuan dari membedakan GDP riil dan GDP nominal adalah untuk mengetahui ada atau

tidaknya pengaruh perubahan tingkat harga terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian.

a. GDP Riil

“GDP atas dasar harga konstan atau GDP riil merupakan nilai tambah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara yang dinilai berdasarkan harga tetap atau konstan” (Sukirno, 2013:36). GDP riil dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. GDP riil digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor yang tidak dipengaruhi oleh peningkatan harga dari tahun ke tahun (inflasi). GDP riil mencerminkan kemampuan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehingga menjadi ukuran kesehatan ekonomi yang lebih baik daripada GDP nominal (Mankiw *et al.*, 2007:14).

b. GDP Nominal

“GDP atas dasar harga berlaku atau biasa disebut GDP nominal merupakan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara yang dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut” (Sukirno, 2013:36). Singkatnya GDP nominal menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun hitung. GDP nominal digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara. GDP nominal akan menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut salah satunya diakibatkan oleh inflasi (peningkatan harga dari tahun ke tahun).

F. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh *Corruption Perception Index* terhadap Laju GDP

Korupsi merupakan masalah politik, ekonomi, budaya dan moral. Hal tersebut mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi yang dapat mempengaruhi sebagian besar setiap aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Hariyani *et al.*, 2016). Korupsi dipertimbangkan sebagai fenomena universal yang ada di semua negara maju dan berkembang dalam sektor publik dan swasta. Nawatmi (2014) dalam memandang hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom, sejarawan dan ahli politik menyatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Hal tersebut menciptakan kesenjangan yang lebar antara pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya bisa dicapai, sehingga memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi nasional.

Korupsi memiliki indikator atau jenis perhitungan, salah satunya ialah dengan mengukur *corruption perception index* (CPI). CPI merupakan indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara. Menurut Damanhuri dalam Hariyani *et al.* (2016) menyatakan bahwa tingginya tingkat CPI di suatu negara dapat menimbulkan *high cost economy* yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui hambatan yang terjadi pada investasi. Meski begitu, ada juga yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan

hambatan baru. Disisi lain, Toke *et al.* (2008) menemukan bahwa seluruh negara di dunia menyatakan di dalam rezim dengan kualitas lembaga politik tinggi, tingkat korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi jika kualitas lembaga politik rendah tingkat korupsi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh *Trade Openness* terhadap Laju GDP

Trade openness merupakan kebijakan dari *economic openness*. Negara-negara yang terintegrasi secara global dalam sistem perekonomian terbuka akan melakukan *trade openness*. Kuncoro (2010:361) menyatakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah *trade openness* berperan penting dalam perekonomian suatu negara, dimana seberapa jauh peran perdagangan luar negeri terlihat dari rasio antara ekspor ditambah impor terhadap GDP. Dari perdagangan luar negeri, suatu negara akan memperoleh kenaikan pendapatan nasional yang akan menaikkan jumlah *output* dan laju pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2007:448).

Kebijakan *trade openness* akan mencapai tingkat pendapatan lebih tinggi dan tumbuh lebih cepat dari negara yang memiliki substansial yang menghambat perdagangan. Penerapan kebijakan *trade openness* oleh negara berkembang sebagian besar ditujukan untuk mempermudah *spreading* teknologi modern sehingga industri dalam negeri mampu melakukan diferensial produktivitas yang kemudian mampu mendorong surplus neraca perdagangan yang pada akhirnya mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional (Yusoff dan Febriana, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa negara dengan tingkat *trade openness* yang tinggi berpotensi menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang baik dan jangka

panjang. Indikator dalam pengukuran *trade openness* menggunakan rasio perdagangan (ekspor dan impor) terhadap GDP. Menurut Hassen *et al.* (2013) pengaruh *trade openness* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat terjadi pada 3 jalur yaitu pertumbuhan modal fisik, modal manusia, dan inovasi teknologi.

Hasil analisis bervariasi tergantung pada model struktural, asal usul pertumbuhan, dana abadi dan kondisi awal negara sesuai dengan apakah pengetahuan teknologi umum untuk semua negara atau murni bersifat nasional.

3. Pengaruh *Financial Openness* terhadap Laju GDP

Negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka pada umumnya memerlukan investasi asing. Investasi merupakan “*engine of growth*” karena berperan penting dalam perekonomian, terutama bagi negara dengan sistem ekonomi terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hassen *et al.*, 2013).

Hal tersebut menjelaskan bahwa indikator pada *financial openness* yaitu *Foreign Direct Investment* (FDI). Krugman dan Obstfeld dalam Kuntoro *et al.* (2018) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan FDI adalah suatu arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas operasi atau jaringan bisnisnya di negara-negara lain. FDI dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Menurut Rahman dan Jakaria (2015) FDI menjadi salah satu sumber modal yang penting dan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan dalam membiayai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara negara baik yang maju maupun berkembang. Menurut teori pertumbuhan neoklasik bahwa FDI dapat menyalurkan dana untuk sektor – sektor produktif ekonomi yang

kekurangan modal sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan modal (Chalid, 2010). Di sisi lain, pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan jangka panjang suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh investasi fisik tapi juga tergantung pada efisiensi penggunaan investasi (Adhikary, 2011). Di negara maju investasi asing tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar, dan penciptaan kesempatan kerja. Di negara berkembang yang sangat memerlukan modal untuk pembangunannya, terutama jika modal dalam negeri tidak mencukupi.

Hal ini berarti *financial openness* atau FDI memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh *Index of Economic Freedom* Terhadap Laju GDP

Economic Freedom merupakan suatu konsep yang memberikan hak fundamental kepada individu untuk mengontrol bisnisnya. *Economic freedom* yang dimaksud dapat meliputi produksi, perdagangan maupun konsumsi barang dan jasa yang tetap mendapat perlindungan keamanan dari pemerintah dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh warga lainnya (Wulandari, 2014). *Economic freedom* dianggap sebagai insentif utama untuk penggunaan sumber daya yang langka secara optimal, dengan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi daya saing yang sehat dan mendorong kreativitas manusia (Razmi dan Refai, 2013). Hal tersebut menjadikan konsep *economic freedom* penting karena tidak ada sanksi tanpa pembatasan negara pada produksi barang dan jasa, distribusi dan konsumsi negara. Dengan demikian, peran dari kewirausahaan untuk melakukan inovasi yang

berkelanjutan dan bertambahnya produktivitas suatu negara dapat meningkatkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi.

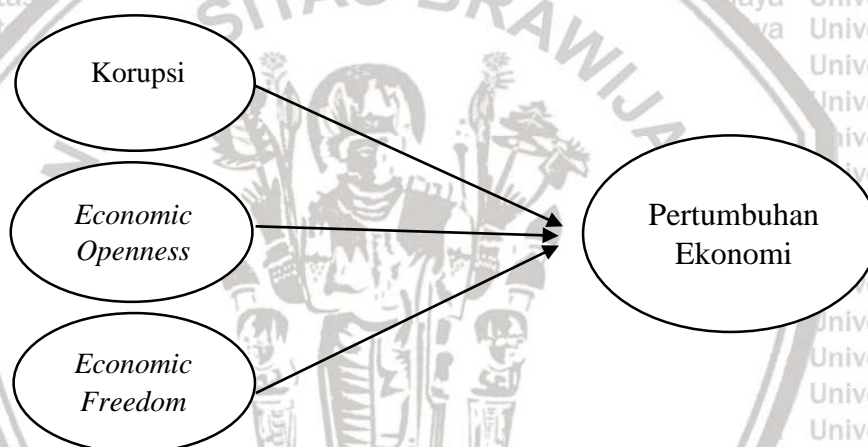
Dalam teori pertumbuhan menurut Smith (Chalid, 2010) menyebutkan *economic freedom* akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi *stationer (stationary state)*. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi swasta akan cenderung mengalir ke lingkungan ekonomi yang lebih menarik untuk kegiatan produktif. Di sisi lain, pajak tinggi, regulasi berlebihan, penegakan kontrak yang bias, kurangnya jaminan hukum, hak kepemilikan yang tidak aman, dan ketidakstabilan moneter akan menghalangi investasi dan pertumbuhan. Pengukuran *economic freedom* menggunakan *index of Economic freedom* yang merupakan rata-rata dari empat komponen yang kompleks dengan menunjukkan seberapa terbuka dan ramah bisnis suatu negara dalam bentuk tingkat skala 0-100.

Menurut Akin *et al.* (2014) bahwa negara dalam pendapatan yang berbeda dengan tingkat *economic freedom* yang diukur oleh *index of economic freedom* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta negara berpenghasilan menengah ke bawah dalam penelitian ini menunjukkan *economic freedom* berkontribusi besar terhadap pertumbuhan. Selain itu, Razmi dan Refai (2013) menyatakan bahwa *economic freedom* mendorong insentif dan efektifitas alokasi sumber daya, dimana terdapat penghapusan pembatasan harga dan kuantitas bahwa realisasi kegiatan yang berorientasi kebebasan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Serta kewirausahaan memperkuat produktivitas dengan ide-ide baru sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan negara yang

memiliki *index of economic freedom* rendah, maka negara tersebut disinsentif untuk kewirausahaan dan produktivitas suatu negara dalam mewujudkan keuntungan.

G. Model Konsep Penelitian

Suatu penelitian memerlukan model konsep sebagai pedoman dalam mengidentifikasi masalah yang mengandung variabel penelitian, termasuk juga keterkaitan variabel yang disajikan dalam penelitian. Berikut digambarkan model konsep yang digunakan pada penelitian ini:

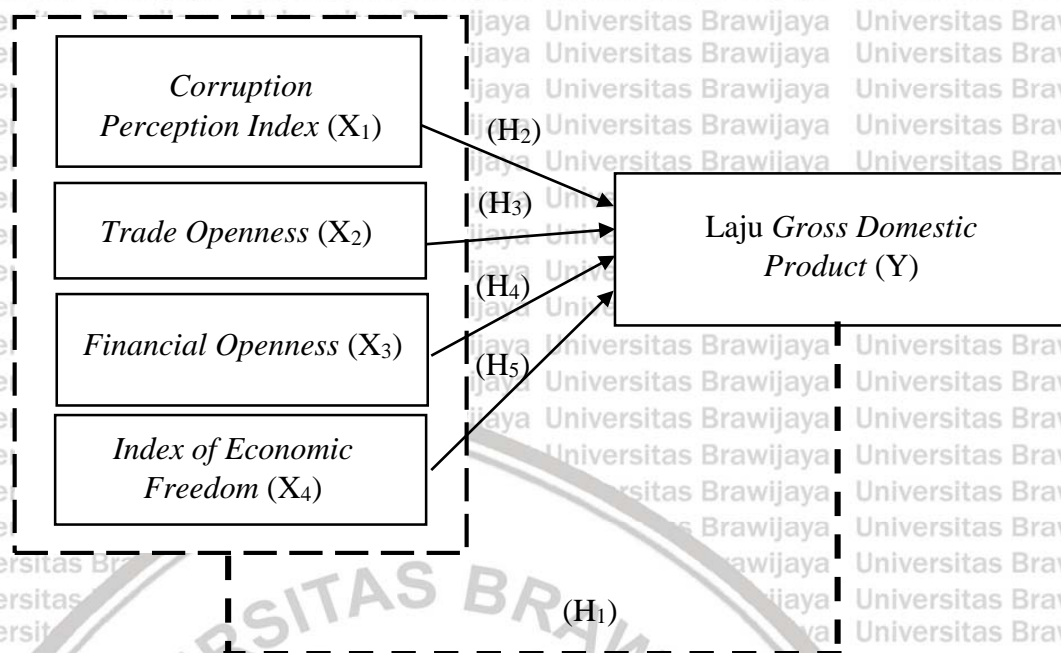


Gambar 2 Model Konsep Penelitian

Sumber: Data diolah, 2019

H. Model Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2017:159). Model hipotesis yang digunakan sebagai berikut:



Gambar 3 Model Hipotesis

Sumber: Data diolah, 2019

Keterangan :

————— = Parsial

----- = Simultan

Berdasarkan Model Hipotesis pada Gambar 3 maka dapat diperoleh hipotesisi penelitian sebagai berikut:

H₁ : *Corruption Perception Perception Index (X₁), Trade Openness (X₂), Financial Openness (X₃), Index of Economic Freedom (X₄) secara simultan berpengaruh terhadap Laju Gross Product Domestic (Y)*

H₂ : *Corruption Perception Perception Index (X₁) secara parsial berpengaruh terhadap Laju Gross Product Domestic (Y)*

H₃ : *Trade Openness (X₂) secara parsial berpengaruh terhadap Laju Gross Product Domestic (Y)*

H4 : *Financial Openness* (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap *Gross Product Domestic* (Y)

H5 : *Index of Economic Freedom* (X_4) secara parsial berpengaruh terhadap *Gross Product Domestic* (Y)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. Menurut Priadana *et al.* (2009:60) “*explanatory research* merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan hubungan variabel dengan menguji hipotesis yang muncul dan berusaha menjawab hipotesis tersebut”.

Jenis penelitian tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui hubungan yang timbul dari variabel-variabel yang menjadi objek penelitian yaitu variabel *Corruption Perception Index, Trade Openness, Financial Openness* dan *Index of Economic Freedom*, terhadap variabel Laju *Gross Domestic Product*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian, analisis data yang bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8). Pendekatan ini dipilih karena data dalam penelitian ini berupa angka. Data yang diperoleh tersebut akan di uji menggunakan model data panel dengan bantuan aplikasi *Eviews* 9.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan melalui website resmi *World Bank*, *Heritage Foundation*, dan *Transparency International*. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara sengaja didasarkan pada ketersediaan data yang dibutuhkan *World Bank* yaitu lembaga yang mengeluarkan laporan terkait *World Development Indicator* menyajikan data *trade openness*, *financial openness*, dan *Laju Gross Domestic Product* yang dapat diakses dan diunduh secara keseluruhan melalui www.worldbank.org. Selain itu, *Transparency International* dan *Heritage Foundation* merupakan lembaga yang mengeluarkan data skor sebagai alat ukur variabel *Corruption Perception Index* dan *Economic Freedom* yang dapat diakses pada www.transparency.org dan www.heritage.org terdiri dari laporan tahunan.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2017:38). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39), “Variabel Independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel

independen pada penelitian ini adalah *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom*.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel ini adalah variabel yang dipenuhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Laju *Gross Domestic Product*.

3. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan variabel diatas terdapat indikator dalam pengukurannya maka diuraikan indikator serta definisi operasional masing-masing indikator dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Variabel dan Pengukurannya

No	Konsep	Variabel	Indikator	Sumber
1.	Korupsi	<i>Corruption Perception Index</i> (X ₁)	Angka CPI dengan satuan <i>rating</i> 0 s.d 100 interval dalam indeks data series tahunan	<i>Transparency International</i>
2.	<i>Economic Openness</i>	<i>Trade Openness</i> (X ₂)	Rasio perdagangan (ekspor+impor) terhadap GDP dengan satuan prosentase (%) series tahunan	<i>World Bank</i>
		<i>Financial Openness</i> (X ₃)	Rasio FDI terhadap GDP. Dengan satuan prosentase (%) series tahunan	<i>World Bank</i>
3.	<i>Economic Freedom</i>	<i>Index of Economic Freedom</i> (X ₄)	Angka rata-rata perhitungan <i>economic freedom</i> dengan <i>rating</i> 0 s.d 100 interval dalam indeks data series tahunan	<i>Heritage Foundation</i>
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Laju <i>Gross Domestic Product</i> (Y ₁)	Tingkat GDP riil dalam satuan prosentase (%)	<i>World Bank</i>

Sumber: Data diolah, 2019

a. *Corruption Perception Index*

Pengukuran *corruption perception index* (CPI) sebagai variabel korupsi yang menjadi tolak ukur tingkat persepsi masyarakat dan pelaku usaha dalam menilai praktik korupsi yang terjadi di suatu negara. Indeks tersebut dikeluarkan oleh *Transparency International* dalam rentang nilai antara 0 sampai 100. Dimana semakin kecil nilainya (mendekati nol) maka negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara semakin besar nilainya (mendekati seratus) maka negara tersebut dipersepsikan tingkat korupsinya rendah.

b. *Trade Openness*

Pengukuran *trade openness* untuk mengetahui tingkat *economic openness* (keterbukaan ekonomi) suatu negara dengan mengukur intensitas perdagangan di suatu negara terhadap GDP. Data *trade openness* berasal dari *World Development Indicator* yang terdapat di *World Bank* dengan label *Trade (% GDP)*. *Trade openness* diprosikan dalam penjumlahan total barang dan jasa yang di ekspor (dalam US\$) dan total barang dan jasa yang di impor (dalam US\$) dan dibagi dengan GDP riil (dalam US\$).

c. *Financial Openness*

Variabel *financial openness* menggunakan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai indikator yang merupakan sejumlah penanaman modal ke sebuah perusahaan di negara lain. Pengukuran berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *World Bank* dengan menggunakan penjumlahan dari rasio FDI/GDP dalam label *Foreign Direct Investment, Net Inflows (% of GDP)*. Dalam keterangan yang diberikan oleh *World Bank* yang dimaksud dengan FDI sesuai label tersebut

merupakan jumlah modal ekuitas, investasi kembali pendapatan, modal jangka panjang lainnya, dan modal jangka pendek seperti yang ditunjukkan dalam neraca pembayaran. Indikator ini menunjukkan arus masuk neto (arus masuk investasi baru dikurangi disinvestasi) dalam ekonomi pelaporan dari investor asing, dan dibagi dengan *GDP*.

d. *Index of Economic Freedom*

Index of economic freedom menunjukkan tingkat *economic freedom* di suatu negara diukur melalui rating pada skala 0 hingga 100, berdasarkan rata-rata dari empat komponen yang kompleks yaitu *Rule of Law, Government Size, Regulatory Efficiency*, dan *Open Markets* yang dikeluarkan oleh *Heritage Foundation*. Angka 0 menunjukkan tingkat kebebasan yang rendah. Semakin besar nilainya maka semakin besar kebebasan ekonomi suatu negara. Data periode 2009-2018 menggunakan hasil data per tahun yang diperoleh. Tidak semua negara menyediakan data terhadap setiap faktor pengukurannya.

e. *Laju Gross Domestic Product*

Gross Domestic Product (GDP) merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa final yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini nilai laju GDP diprosikan dalam *GDP riil* dalam satuan *prosentase (%)*. Data *GDP riil* didapat dari *World Bank* dengan label data *GDP growth (annual %)*. Berdasarkan *World Bank* yang dimaksud dengan *GDP* sesuai label tersebut adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh produsen yang tinggal di suatu negara dalam perekonomian ditambah pajak produk dan dikurangi segala bentuk subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. Dihitung tanpa memotong

depresiasi dari aset yang diproduksi atau untuk deplesi dan degradasi sumber daya alam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) menjelaskan bahwa “populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 negara Asia Tenggara yang merupakan bagian dari kawasan negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

2. Sampel

Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85), menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan metode ini agar peneliti dapat lebih fokus untuk mencapai tujuan sesuai topik yang diangkat. Sampel yang akan diambil adalah karena memenuhi kriteria atau pertimbangan yang ditentukan. Dalam memilih sampel ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria yaitu:

- a. Bagian dari negara berkembang kawasan ASEAN
- b. Terdaftar dalam negara yang diteliti oleh *Transparency International*, *World Bank* dan *Heritage Foundation*.
- c. Memiliki data yang lengkap mengenai *corruption perception index*, *openness*, *index of economic freedom*, *gross domestic product* pada tahun 2009-2018.

Tabel 3 Proses Pemindaian Sampel

No	Negara	Kriteria			Keterangan
		a	b	c	
1.	Filipina	✓	✓	✓	Terpilih
2.	Indonesia	✓	✓	✓	Terpilih
3.	Malaysia	✓	✓	✓	Terpilih
4.	Singapura	X	✓	✓	Tidak Terpilih
5.	Thailand	✓	✓	✓	Terpilih
6.	Brunei Darussalam	✓	✓	X	Tidak Terpilih
7.	Vietnam	✓	✓	✓	Terpilih
8.	Laos	✓	✓	X	Tidak Terpilih
9.	Myanmar	✓	✓	X	Tidak Terpilih
10.	Kamboja	✓	✓	✓	Terpilih

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan pada beberapa kriteria diatas maka negara-negara di ASEAN yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut adalah Brunei Darussalam, Singapura, Laos, Myanmar dikarenakan Brunei Darussalam tidak memiliki kelengkapan data mengenai variabel CPI pada tahun 2014-2015 serta variabel *Index of Economic Freedom* pada tahun 2009-2013. Singapura yang bukan merupakan negara berkembang melainkan negara maju, Laos tidak memiliki kelengkapan data

menegenai variabel *Trade Openness* pada tahun 2017-2018 dan Myanmar tidak memiliki kelengkapan data mengenai variabel *Trade Openness* pada tahun 2018.

Sedangkan negara-negara di ASEAN yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

Menurut Sugiyono (2017:225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam variabel penelitian ini diperoleh dari publikasi berbagai instansi terkait yaitu *corruption perception index* yang di ambil melalui website *Transparency International* sedangkan *trade openness*, *financial openness*, dan laju *gross domestic product* diambil dari website *World Bank* serta *index of economic freedom* diambil dari *Heritage Foundation*. Penelitian ini menggunakan seluruh data tahunan yaitu pada bulan Januari 2009 sampai Desember 2018, dari sampel yang terdiri dari 6 negara selama 10 tahun sehingga terdapat 60 unit analisis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti gambar, tulisan, atau karya seni. Teknik dokumenter merupakan teknik yang menggunakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku tentang pendapat, teori,

dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Nawawi, 2012:133). Menurut Indriantoro dan Supomo (2012: 146) “Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program”. Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisis data sekunder.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menentukan jawaban atas hipotesis suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2017:147-148), analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Penelitian ini menggunakan analisis data panel karena menggunakan *cross section* dan *time series* untuk menyesuaikan banyaknya data sesuai aturan statistik yang selanjutnya akan diberi penjelasan secara deskriptif mengenai hasil dari penelitian ini.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik

deskriptif dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata dan sampel atau populasi, tidak perlu diuji signifikansinya.

Pada statistik deskriptif data disajikan dalam bentuk grafik dan juga numerik. Data analisis deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini adalah nilai maksimum, nilai minimum, *mean*, dan standar deviasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial.

2. Analisis Statistik Inferensial

Menurut Sugiyono (2017:148) mengatakan bahwa statistik inferensial atau sering disebut statistik *induktif* atau *probabilitas* merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial (induktif) berfungsi untuk menguji hipotesis dan membuat perkiraan interval tentang suatu parameter (karakteristik populasi dan bermaksud menarik kesimpulan tentang karakteristik suatu populasi dimana suatu sampel diperoleh (Supranto dan Linakrisma, 2013:69). Statistik parametris menuntut bahwa data yang akan digunakan harus terdistribusi normal (Sugiyono, 2017:148). Berikut ini adalah tahapan jenis uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2004:406) uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak

bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Hal ini dilakukan agar data sampel yang diolah dapat benar – benar mewakili populasi secara keseluruhan. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebelum melakukan analisis regresi, peneliti merasa harus melakukan uji asumsi klasik untuk memperkuat hasil yang diperoleh dengan macam-macam uji asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi secara normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual yang digunakan memiliki hasil distribusi normal maka dapat diukur dengan menggunakan *Jarque-Bera Test*. Residual merupakan perbedaan antara titik data dengan garis regresi, hal ini mengakibatkan adanya kesalahan (*errors*) yang berarti bahwa ada beberapa perbedaan yang tidak dapat dijelaskan. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Dalam melakukan uji normalitas, apabila menunjukkan hasil probabilitas dibawah batas signifikansi yaitu 0,05 maka perlu dilakukan tindakan selanjutnya. Hal yang dapat dilakukan adalah mentransformasi data atau melakukan uji *outlier*. *Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrik baik untuk sebuah variabel

tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2013:41). Ketentuan yang digunakan pada uji normalitas sebagai berikut:

1. $H_0 = p\text{-value Jarque-Bera} > 5\%$, residual berdistribusi dengan normal
2. $H_a = p\text{-value Jarque-Bera} < 5\%$, residual tidak berdistribusi dengan normal

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2012:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen).

Uji multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki model linier yang sempurna atau mendekati sempurna.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *Variance Inflation*

Factor (VIF). Kriteria yang digunakan pada uji multikolinieritas sebagai berikut:

1. Nilai $VIF \geq 10$ berarti terjadi multikolinieritas
2. Nilai $VIF < 10$ berarti tidak terjadi multikolinieritas

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik apabila yang terjadi adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Banyak cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model, salah satunya dengan menggunakan Uji *Harvey*. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Harvey-Godfrey*, untuk asumsi yang dipakai di dalam uji *Harvey* adalah sebagai berikut:

1. Jika $p\text{-value } \text{Obs} * R\text{-square} < 0,05$ maka H_0 ditolak, terjadinya heteroskedastisitas
2. Jika $p\text{-value } \text{Obs} * R\text{-square} > 0,05$ maka H_1 diterima, tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2012:110) uji korelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi menandakan adanya masalah autokorelasi. Hal ini sering ditemukan dalam data *time series* yang menunjukkan adanya kesamaan pergerakan naik dan turun.

Pengujian untuk mendeteksi autokorelasi menggunakan dapat dilakukan dengan uji *Breusch-Godfrey*, dengan α pengujian 5% untuk asumsi yang dipakai dalam uji *Breusch-Godfrey*. Ketentuan yang digunakan pada uji autokorelasi sebagai berikut:

1. Jika $p\text{-value } \text{Obs} * R\text{-square} > \alpha$, H_0 diterima, tidak terjadinya autokorelasi.
2. Jika $p\text{-value } \text{Obs} * R\text{-square} < \alpha$, H_1 diterima, terjadinya autokorelasi.

b. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan panel data secara umum akan menghasilkan intersep dan *slope* koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu tertentu. Menurut Ekananda (2015:405-410) ada beberapa metode yang perlu dilakukan pengujian untuk menentukan model panel data apa yang akan digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel, yaitu:

1) *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) disebut juga sebagai model *Pooled Least Square* (PLS) yang merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan struktur model lain. Metode yang digunakan hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* (Ekananda, 2015:405). Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka dapat digunakan metode *Ordinal Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Akan tetapi, dengan menggabungkan data tersebut maka kita tidak dapat melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu.

Sehingga, diasumsikan bahwa perilaku data antar individu tidak berbeda dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain, dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu.

2) *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang menggunakan metode *common effect*, penggunaan data panel *common effect* tidak realistis karena akan menghasilkan *intercept* ataupun *slope* pada

data panel yang tidak berubah baik antar individu (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Menurut Ekananda (2015:406) model ini mengasumsikan bahwa koefisien *slope* adalah konstan sementara nilai *intercept* diasumsikan berbeda antar unit *cross-section* namun *intercept* diasumsikan bernilai tetap antar waktu. Model ini memperhatikan adanya keberagaman (heterogenitas) individu, terutama pada variabel independen. Untuk memilah heterogenitas antara individu menggunakan konsep variabel *dummy*. Penggunaan *dummy* membuat estimator model ini dikenal sebagai *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3) *Random Effect Model* (REM)

Model ini mengasumsikan bahwa nilai koefisien *slope* adalah konstan sementara nilai *intercept* berbeda antar individu dan antar waktu atau bersifat *random effect*. Menurut Ekananda (2015:408) model ini mempertimbangkan kondisi acak (terdistribusi normal) antara rata-rata dengan karakteristik yang bersifat random. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Dalam hal ini, asumsi dilakukan karena upaya memasukkan variabel *dummy* ke dalam *fixed effect model* dapat berakibat pada berkurangnya derajat kebebasan di mana pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Berdasarkan hal tersebut, parameter yang berbeda antar unit *cross section* maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *Error Component Model* (ECM).

Setelah menggunakan estimasi model regresi data panel langkah selanjutnya adalah memilih teknik estimasi regresi data panel dengan model yang manakah yang paling baik digunakan sebagai berikut:

a. Uji Chow

Menurut Ekananda (2015:69-70) Uji Chow digunakan untuk membandingkan dua model, dalam penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila hasil akhir pengujian menunjukkan lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) maka perlu dilakukan Uji Hausman, namun apabila hasil akhir pengujian menunjukkan sebaliknya maka tidak perlu melakukan Uji Hausman. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Model yang digunakan *Common Effect*

H_1 : Model yang digunakan *Fixed Effect*

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas $F > 0,05$ artinya H_0 diterima; maka model *common effect*
2. Jika nilai Probabilitas $F < 0,05$ artinya H_1 diterima; maka model *fixed effect* dan dilanjut dengan uji Hausman

b. Uji Hausman

Menurut Ekananda (2015:134-135) Uji Hausman adalah uji yang paling sering digunakan dalam menentukan model yang akan digunakan dalam penelitian panel, pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan untuk memilih

model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini di dasari oleh hipotesis berikut:

H_0 : Model yang digunakan *Random Effect Model*

H_1 : Model yang digunakan *Fixed Effect Model*

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas $F > 0,05$ artinya H_0 diterima; maka model *random effect*
2. Jika nilai Probabilitas $F < 0,05$ artinya H_1 diterima, maka model *fixed effect*

c. Uji *Langarange Multiplier* (LM)

Menurut Greene (2000) Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Uji signifikasi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk menguji signifikasi *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*. Pengujian ini di dasari oleh hipotesis berikut:

H_0 : Model yang digunakan *Common Effect Model*

H_1 : Model yang digunakan *Random Effect Model*

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas $F > 0,05$ artinya H_0 diterima; maka model *common effect*

2. Jika nilai Probabilitas $F < 0,05$ artinya H_1 diterima, maka model *random effect*

c. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan data panel.

Menurut Ekananda (2015:1) data panel (*pooled data*) adalah sebuah data yang berisi data sampel individu (dalam penelitian ini negara) pada periode waktu tertentu dengan alat pengolahan data menggunakan *software* Eviews. Pada data jenis ini kita mengumpulkan berbagai observasi menurut individu yang dikumpulkan selama beberapa waktu tertentu di dalam sampel. Dengan kata lain, data panel merupakan gabungan antara data lintas-waktu (*time series*) dan data lintas-individu (*cross section*).

Berikut adalah persamaan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}; i = 1, 2, \dots, n; t = 1, 2, \dots, t$$

Sumber: Gujarati (2004:640)

Dimana:

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Variabel independen

e = Kesalahan

n = Banyaknya data *cross-section* atau obeservasi

t = Banyaknya data *time series* atau waktu

Berdasarkan rumus tersebut maka penelitian ini menggunakan model persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Dimana:

- Y = GDP
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X_1 = CPI
- X_2 = *Trade Openness*
- X_3 = *Financial Openness*
- X_4 = *Index of Economic Freedom*
- e = Kesalahan

Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan panel data. Berikut ini beberapa kelebihan menurut Ekananda (2014:2) dalam penggunaan data panel:

- 1) Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu digunakan dalam persamaan ekonometrika.
- 2) Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
- 3) Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, maka penggunaan panel data akan mengurangi masalah *omitted variables* secara substansial.
- 4) Karena mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang, maka data panel sangat baik digunakan untuk *study of dynamic adjustment* seperti mobilitas tenaga kerja, tingkat keluar-masuk pekerjaan, dan lain-lain
- 5) Dengan meningkatnya jumlah observasi, maka akan berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

3. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2012:97), Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. R^2 yang besar mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Dalam penelitian ini

pengukuran menggunakan *Adjusted R*² karena lebih akurat untuk mengevaluasi model regresi tersebut (Ghozali, 2012:97).

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Menurut Ghozali (2012:98), uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Uji F ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel bebas tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji t

Menurut Ghozali (2012:98), uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikan yang digunakan untuk membandingkan uji t_{hitung} dan t_{tabel} , dimana tingkat signifikan t_{tabel} yang digunakan sebesar $\alpha = 0,05$ (5%) dengan

menganggap variabel terikat bernilai konstan. Berikut hipotesa yang digunakan pada uji t:

- a) Jika nilai signifikansi > 0.05 atau $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikansi < 0.05 atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. *Transparency International* (TI)

Transparency International (TI) merupakan suatu gerakan global *Non-Governmental Organization* didirikan oleh Peter Eigen pada tahun 1993 di Berlin,

Jerman. Gerakan organisasi ini dibentuk sebagai wujud membawa perubahan dari realisasi pemberantasan korupsi di dunia. *Transparency International* memiliki visi

dan misi untuk menghentikan korupsi di dunia dan mempromosikan transparansi,

akuntabilitas, dan integritas di semua kalangan pemerintah masyarakat dan

pengusaha-pengusaha di seluruh dunia. TI tidak melakukan investigasi terhadap

korupsi itu sendiri tetapi mempertemukan para pejabat di bidang pemerintahan,

bisnis, masyarakat sipil dan media untuk mempromosikan transparansi dalam

urusan swasta dan publik dan mendorong langkah-langkah anti korupsi. Dengan

beberapa langkah dan strategi anti korupsi, TI menganggap cara yang dilakukannya

tersebut telah meningkatkan kesadaran dan mengurangi sikap apatis dan toleran

terhadap korupsi.

Transparency International menerbitkan indeks tahunan peringkat negara-

negara paling korup di dunia yaitu *Corruption Perception Index* (CPI). Dirilisnya

CPI mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan memicu

persaingan antar negara untuk meningkatkan nilai mereka dalam hal meminimalisir

korupsi. *Transparency International* dalam melakukan aksi-aksinya mendapatkan

bantuan dana dari berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintahan selain itu terdapat dari lembaga multilateral, yayasan internasional, sektor swasta, serta bantuan dari individu. TI memiliki kebijakan untuk menerima dana ataupun bantuan-bantuan lainnya dari siapapun selama tidak mengganggu kinerja dari TI yang bersifat independen dan mandiri ataupun mengganggu integritas serta reputasi baik dari *Transparency International*. TI juga secara transparan memberikan laporan tahunannya tentang pemakaian bantuan tersebut secara terperinci, sehingga donator dan masyarakat luas dapat mengetahui pengguna dana tersebut.

2. *World Bank*

World Bank atau Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang terkait erat dengan 5 lembaga pembangunan lainnya yang didedikasikan untuk menyediakan pembiayaan, saran, dan penelitian untuk ekonomi global ke negara-negara berkembang. *World Bank* dibentuk pada saat diadakan sebuah konferensi internasional di Amerika Serikat tahun 1944 yang berada dibawah dilindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konferensi tersebut diselenggarakan untuk membentuk suatu kerangka bagi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan sejahtera. Hal ini menjelaskan tujuan utama *World Bank* sebagai lembaga yang berupaya mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi dengan menawarkan bantuan pembangunan kepada negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah. *World Bank* bekerja dengan pemerintah negara, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, Bank Pembangunan Daerah, lembaga *think tank*, dan lembaga internasional lainnya

dalam berbagai isu untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin global.

World Bank merupakan lembaga pembangunan terbesar di dunia yang memiliki hubungan lebih dari 180 negara. Lembaga ini berbagi informasi dengan berbagai entitas yang terdapat data, pengetahuan, dan penelitiannya untuk mendorong inovasi dan meningkatkan transparansi dalam pengembangan aliran bantuan dan keuangan yang mudah diakses untuk membantu mengatasi tantangan pembangunan dunia. Lembaga ini juga membantu memfasilitasi investasi internasional, perdagangan internasional agar berjalan lancar dan terkoordinasi. Bantuan *World Bank* umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta penerbitan obligasi. *World Bank* hampir menyentuh setiap sektor penting untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. *Heritage Foundation*

Heritage Foundation merupakan sebuah lembaga *think tank* yang berdiri secara independen berlokasi di Amerika Serikat pada tahun 1973. Lembaga ini memegang peranan penting pada gerakan konservatif di masa pemerintahan Ronald Reagan, dimana salah satu kebijakannya menjadi salah satu mata pelajaran tentang peraturan kebijakan umum yaitu *Mandate for Leadership*. Sejak saat itu *Heritage Foundation* memainkan peranan penting dalam diskusi kebijakan umum dan dianggap sebagai lembaga penelitian yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 100 pakar kebijakan, lembaga ini memiliki talenta untuk dapat menyelesaikan masalah kebijakan yang kompleks, dengan solusi konservatif yang sederhana dan efektif. Visi dari lembaga ini adalah membangun kebebasan, peluang, kemakmuran,

dan masyarakat sipil berkembang. Selain itu, terdapat misi untuk terdapat misi yaitu untuk merumuskan dan memperkenalkan kebijakan umum yang konservatif berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan bebas, pemerintahan yang terbatas, kebebasan individu, nilai-nilai tradisional yang sesuai, dan pertahanan nasional yang kuat.

Heritage Foundation berawal dengan mengomunikasikan solusi ini kepada puluhan juta orang Amerika melalui situs webnya, dan media sosial. Pada tahun 2018, program *Think Tank* dan *Civil Society Program* dari *University of Pennsylvania* menempatkan *The Heritage Foundation* sebagai “*Global Go To Think Tank Index*” diproduksi setiap tahun dari survei internasional terhadap lebih dari 7.500 sarjana, donor publik dan swasta, pembuat kebijakan, dan jurnalis yang memberi peringkat lebih dari 6.600 *think tank*. Lebih dari 500.000 anggota yang membayar iuran mendukung visi lembaga ini.

B. Gambaran Umum Negara Sampel Penelitian

1. Filipina

Asian Development Bank (ADB) menyebutkan Filipina adalah salah satu negara dengan perekonomian yang cepat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didorong dengan banyaknya investasi yang masuk dan pemerintah yang memperkuat ekonomi Filipina lebih disebabkan oleh aliran modal yang masuk dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*). Berdasarkan *World Bank*, pertumbuhan ekonomi Filipina pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan ekonomi terendah dalam tiga tahun terakhir sebesar 6,2% yang tumbuh 6,5% dari tahun sebelumnya 6,7% jauh

di bawah target revisi pemerintah yaitu 6,5%-6,9%. Hal tersebut terjadi karena adanya penundaan persetujuan anggaran dan perlambatan perdagangan global.

Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Meskipun fokus pada industri, ekonomi Filipina masih bertumpu pada sektor agrikultur yang dimana Filipina merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Filipina memiliki komoditas ekspor dan impor yang paling banyak diminati di pasar ekspor internasional. Sebagian besar ekspor berupa barang komponen elektronik dan semi konduktor, disamping itu terdapat hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa dan buah-buahan. Selain mengenai ekonomi yang ada di Filipina, tingkat korupsi yang ada di negara ini juga diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Tingkat korupsi Filipina menduduki peringkat ke-99 di dunia dan urutan ke-4 di kawasan ASEAN dengan nilai CPI sebesar 36 pada tahun 2018.

2. Indonesia

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Selama 2 dekade Indonesia membangkitkan ekonomi kembali yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk

sebagai salah satu *The East Asia Miracle* pada tahun 1990-an. Perekonomian Indonesia khususnya di sektor manufaktur dianggap sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Indonesia dinilai sudah menjadi basis produksi manufaktur terbesar di ASEAN.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 menghadapi tantangan yang tidak ringan, hal ini dipicu karena ketidakpastian global yang meningkat. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, ketidakpastian global seringkali memberikan tantangan bagi pengelolaan ekonomi di sektor eksternal, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Dari jalur perdagangan, kinerja ekspor menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas yang turun. Tantangan dari jalur perdagangan makin kuat karena pada saat bersamaan permintaan impor untuk proyek infrastruktur domestik cukup besar sehingga meningkatkan kompleksitas dalam mengelola defisit transaksi berjalan pada *level* yang sehat. Dari jalur finansial, tantangan berkaitan dengan menurunnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang karena dipicu kenaikan suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat dan ketidakpastian pasar keuangan global. Selain mengenai ekonomi yang ada di Indonesia, tingkat korupsi yang ada pada negara ini juga semakin membaik. Indonesia menduduki peringkat ke-89 di dunia dan urutan ke-4 di kawasan ASEAN dengan nilai CPI sebesar 38 pada tahun 2018.

3. Malaysia

Perekonomian Malaysia menunjukkan ketahanan dan kinerja yang kuat. Malaysia telah berhasil mendiversifikasi ekonominya dari sektor pertanian dan

komoditas menjadi tuan rumah bagi sektor manufaktur dan jasa. Malaysia adalah salah satu negara berkembang yang terdapat indeks tinggi dalam ekonomi terbuka setelah Singapura. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi telah berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Sekitar 40% pekerjaan di Malaysia terkait dengan kegiatan ekspor. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah China, Singapura, Amerika Serikat dan Thailand. Malaysia berhasil menduduki peringkat 21 untuk kategori kemudahan berbisnis. Hal tersebut dinilai dapat membantu mengamankan prospek pertumbuhan jangka panjang Malaysia.

Didalam negeri kuatnya kesempatan kerja Malaysia meningkatkan konsumsi swasta dan investasi juga membantu mendorong pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga mendukung pertumbuhan GDP Malaysia sepanjang 2018 di tengah perlambatan ekspor. Kinerja ekspor Malaysia dapat diandalkan untuk menyumbang ekonomi karena lebih tinggi dibanding impor. Selain ekonomi yang cukup baik, Malaysia juga memiliki tingkat korupsi yang cukup bersih di kawasan ASEAN.

Terbukti bahwa Malaysia menduduki peringkat ke 61 di dunia dan merupakan urutan ke 3 di kawasan ASEAN pada tahun 2018 dengan nilai CPI sebesar 47.

4. Thailand

Negara Thailand telah membuat kemajuan luar biasa dalam pembangunan sosial dan ekonomi, bergerak dari negara berpenghasilan rendah ke negara berpenghasilan tinggi dalam waktu kurang dari satu generasi. Dengan demikian, Thailand telah menjadi kisah sukses pembangunan yang banyak dikutip, dengan

pertumbuhan kuat yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan yang mengesankan. Kemiskinan menurun secara substansial selama 30 tahun terakhir dari 67% pada tahun 1986 menjadi 7,8% pada tahun 2017 diukur dengan garis kemiskinan kelas pendapatan menengah keatas \$5,5 per hari. Keuntungan sepanjang berbagai dimensi kesejahteraan telah mengesankan yaitu bertumbuhnya pendidikan yang kuat dan tercipta perlindungan oleh asuransi kesehatan serta bentuk lain dari jaminan sosial telah berkembang. Berdasarkan *World Bank* dalam *Human Capital Index* yang mengukur tingkat produktivitas untuk generasi pekerja berikutnya relatif terhadap potensi penuh mereka jika semua hasil pendidikan dan kesehatan dimaksimalkan, kualitas pendidikan yang tidak merata merupakan tantangan besar bagi Thailand.

Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% dari GDP. Hal tersebut berawal dari krisis finansial Asia pada 1997-1998 yang banyak tergantung pada permintaan luar yaitu Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan, dan produk-produk perikanan lainnya, karet, biji-bijian dan gula. Selain itu, peningkatan investasi pemerintah di Thailand dapat membantu memacu permintaan domestik dan membuat pertumbuhan lebih inklusif. Hal ini sangat penting setelah perlambatan curam dalam investasi swasta yang diamati selama lima tahun terakhir.

Stimulus fiskal berbasis infrastruktur dapat menarik investor swasta dan meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang dengan menambah persediaan

modal. Selain kondisi ekonomi yang ada di Thailand, tingkat korupsi yang ada pada negara ini juga cukup baik. Pada tahun 2018 Thailand menduduki peringkat ke 99 di dunia dan urutan ke 5 di kawasan ASEAN dengan nilai CPI sebesar 36 sama seperti nilai CPI Filipina.

5. Vietnam

Perekonomian Vietnam telah bergeser dari ekonomi terencana terpusat menjadi ekonomi campuran sejak masa reformasi Doi Moi pada tahun 1986 dan komitmen yang ketat terhadap stabilitas ekonomi makro. Hal tersebut telah menjadikan Vietnam dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi berpenghasilan menengah ke bawah serta menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara berkembang paling dinamis di kawasan Asia Timur. Kebijakan ekonomi berorientasi pasar dan berwawasan tanah yang luas telah membantu Vietnam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hampir semua perusahaan Vietnam adalah usaha kecil dan menengah (UKM).

Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara. Saat ini ekonomi Vietnam bergantung sebagian besar pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri untuk mendukung ekonominya. Investasi Asing di hotel mewah dan *resorts* naik untuk mendukung industri pariwisata. Untuk mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan kualitasnya, Vietnam perlu memodernisasi institusi ekonomi, terutama dalam hal manajemen fiskal dan moneter serta melanjutkan reformasi yang berorientasi pasar dan berwawasan ke luar. Selain kegiatan ekonomi yang ada di Vietnam, tingkat korupsi yang ada pada

negara ini juga cukup baik. Pada tahun 2018 Vietnam menduduki peringkat ke 117 di dunia dan urutan ke 6 di kawasan ASEAN dengan nilai CPI sebesar 33.

6. Kamboja

Ekonomi Kamboja menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. *World Bank* memproyeksikan Kamboja sebagai pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Timur dan Pasifik, meskipun pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan namun angka ini masih jauh berada di bawah negara-negara tetangga dalam satu kawasan ASEAN. Agrikultur menjadi bidang utama ekonomi di Kamboja disamping pariwisata dan tekstil. Ekonomi Kamboja telah mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata 8% antara 1998 dan 2018. Kemiskinan terus menurun di Kamboja, didorong oleh adanya ekspor garmen dan pariwisata.

Kamboja telah membuat langkah besar dalam menumbuhkan daya saing, mengelola kekayaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam mempertahankan pertumbuhan. Kamboja mencapai *Millennium Development Goals* (MDG) pada tahun 2009 untuk mengurangi kemiskinan. Diversifikasi lebih lanjut dari ekonomi akan mendorong kewirausahaan, memperluas penggunaan teknologi dan membangun keterampilan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang muncul. Selain kegiatan ekonomi yang ada di Kamboja, tingkat korupsi pada negara ini tergolong buruk dikarenakan, Kamboja menduduki peringkat ke 161 dari 183 negara dan urutan ke 10 di kawasan ASEAN dengan nilai CPI yang hanya sebesar 20 tahun 2018.

C. Penyajian Data

Penelitian ini melibatkan data variabel bebas dan variabel terikat pada tahun 2009 hingga 2018 yang terdiri dari data *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom index* sebagai variabel bebas serta data laju *gross domestic product* (GDP) sebagai variabel terikat pada negara-negara ASEAN yang terpilih berdasarkan kriteria sampel yang dijelaskan pada BAB III. Data tersebut termasuk dalam kategori data sekunder yang di peroleh dari *Transparency International*, *World Bank*, dan *Heritage Foundation*. Berikut deskripsi mengenai nilai minimum, nilai maksimum dan rata-rata pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Laju *Gross Domestic Product*

Variabel laju *gross domestic product* (GDP) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat GDP riil dalam satuan prosentase (%). Tingkat laju GDP riil dari masing-masing negara sampel yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Kamboja. Hasil perhitungan diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari *World Bank*. Berikut adalah nilai setiap tahunnya yang ada pada setiap negara, nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari laju GDP selama tahun 2009-2018 yang dapat dilihat pada tabel 4.

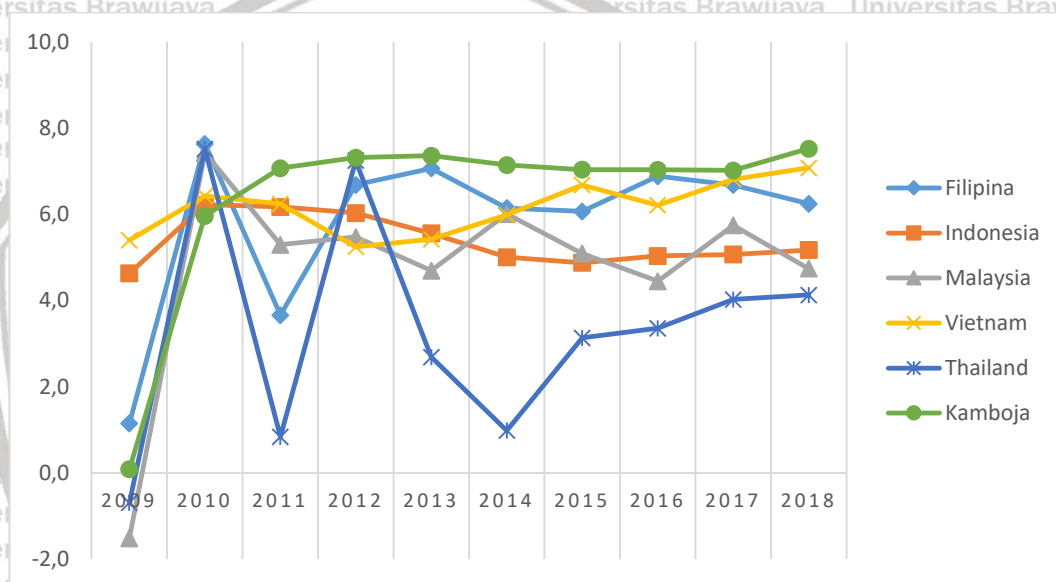
Tabel 4 Data Variabel Laju *Gross Domestic Product* Tahun 2009-2018

Tahun	Laju GDP riil (%)					
	Filipina	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	Kamboja
2009	1,1	4,6	-1,5	5,4	-0,7	0,1
2010	7,6	6,2	7,4	6,4	7,5	6,0
2011	3,7	6,2	5,3	6,2	0,8	7,1
2012	6,7	6,0	5,5	5,2	7,2	7,3
2013	7,1	5,6	4,7	5,4	2,7	7,4
2014	6,1	5,0	6,0	6,0	1,0	7,1

Lanjutan Tabel 5

2015	6,1	4,9	5,1	6,7	3,1	7,0
2016	6,9	5,0	4,4	6,2	3,4	7,0
2017	6,7	5,1	5,7	6,8	4,0	7,0
2018	6,2	5,2	4,7	7,1	4,1	7,5
Min	1,148	4,628	-1,513	5,247	-0,690	0,086
Max	7,632	6,223	7,424	7,075	7,513	7,520
Mean	5,820	5,376	4,740	6,149	3,322	6,353
Sd	1,951	0,578	2,356	0,632	2,630	2,241

Sumber: World Bank, data diolah, 2020



Gambar 4 Perkembangan Laju GDP Tahun 2009-2018

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 4 terdapat grafik laju GDP sebagai acuan pertumbuhan ekonomi dari setiap tahunnya yang ada pada negara sampel. Hasil grafik menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki nilai maksimum laju GDP pada tahun 2010 senilai 7,6% dan nilai minimum pada tahun 2009 sebesar 1,1%.

Indonesia memiliki nilai maksimum laju GDP pada tahun 2010-2011 dengan nilai 6,2% dan nilai minimum pada tahun 2009 yaitu 4,6%. Malaysia memiliki nilai maksimum laju GDP pada tahun 2010 yaitu sebesar 7,4% dan nilai minimum pada

tahun 2009 dengan nilai -1,5%. Vietnam memiliki nilai maksimum laju GDP pada tahun 2018 dengan nilai 7,1% dan nilai minimum pada tahun 2012 dengan nilai 5,2%. Thailand memiliki nilai maksimum laju GDP pada tahun 2010 dengan nilai 7,5% dan nilai minimum pada tahun 2009 sebesar -0,7%. Kamboja memiliki nilai maksimum laju GDP pada tahun 2018 sebesar 7,5% dan nilai minimum pada tahun 2009 sebesar 0,1%.

2. *Corruption Perception Index*

Variabel *Corruption Perception Index* (CPI) yang digunakan pada penelitian ini memiliki skala berkisar 0 sampai dengan 100. Nilai indeks yang mendekati skala angka 0 menandakan bahwa tingkat korupsi negara tersebut sangat tinggi (semakin korup), dan semakin besar nilai indeks mendekati angka skala 100 maka menandakan semakin bersih tingkat korupsi di negara tersebut. Hasil perhitungan diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari *Transparency International*.

Berikut adalah nilai setiap tahunnya yang ada pada setiap negara, nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari CPI selama tahun 2009-2018 yang dapat dilihat pada Tabel 5.

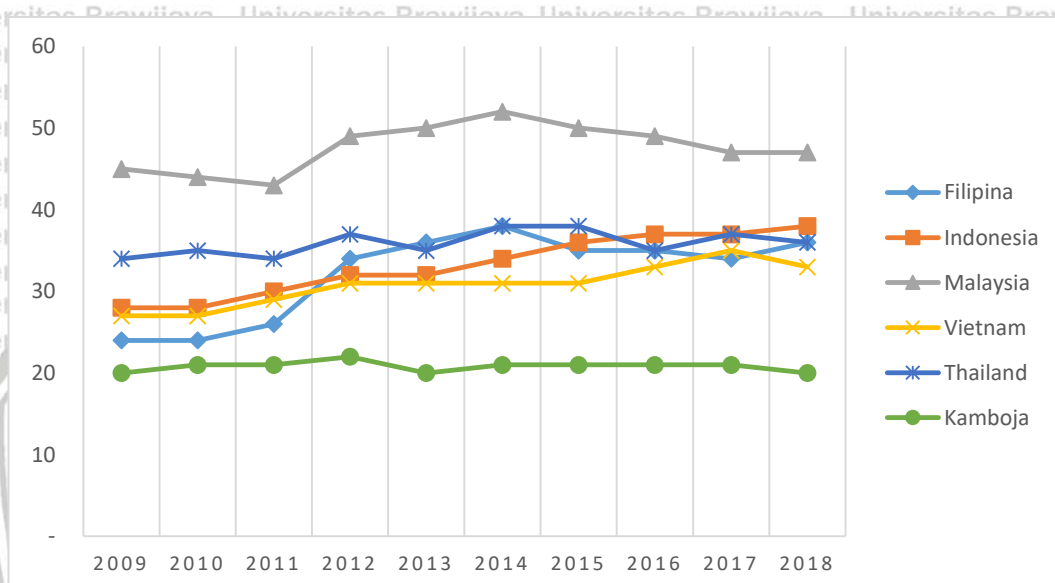
Tabel 5 Data Variabel *Corruption Perception Index* Tahun 2009-2018

Tahun	CPI (0-100 Interval dalam Indeks)					
	Filipina	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	Kamboja
2009	24	28	45	27	34	20
2010	24	28	44	27	35	21
2011	26	30	43	29	34	21
2012	34	32	49	31	37	22
2013	36	32	50	31	35	20
2014	38	34	52	31	38	21
2015	35	36	50	31	38	21
2016	35	37	49	33	35	21
2017	34	37	47	35	37	21

Lanjutan Tabel 5

2018	36	38	47	33	36	20
Min	24	28	43	27	34	20
Max	38	38	52	35	38	22
Mean	32,2	33,2	47,6	30,8	35,9	20,8
Sd	5,350	3,765	2,913	2,573	1,523	0,632

Sumber: *Transparency International*, data diolah, 2020



Gambar 5 Perkembangan Corruption Perception Index Tahun 2009-2018

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 5 terdapat grafik *corruption perception index* (CPI) sebagai acuan tingkat korupsi di negara-negara sampel. Hasil grafik menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki nilai tingkat maksimum CPI pada tahun 2014 dengan nilai 38 dan nilai tingkat minimum pada 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2009-2010 dengan nilai 24. Indonesia memiliki nilai tingkat maksimum CPI pada tahun 2018 dengan nilai 38 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2009 sampai 2010 yaitu 28. Malaysia memiliki nilai tingkat maksimum CPI pada tahun 2014 yaitu sebesar 52 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2011 dengan nilai 43. Vietnam memiliki nilai maksimum CPI pada tahun 2017 yaitu sebesar 35 dan nilai

tingkat minimum pada tahun 2009-2010 dengan nilai 27. Thailand memiliki nilai tingkat maksimum CPI selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2014-2015 dengan tingkat 38 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2009 dan 2011 sebesar 34. Kamboja memiliki nilai tingkat maksimum CPI pada tahun 2012 sebesar 22 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2009, 2013 serta 2018 sebesar 20.

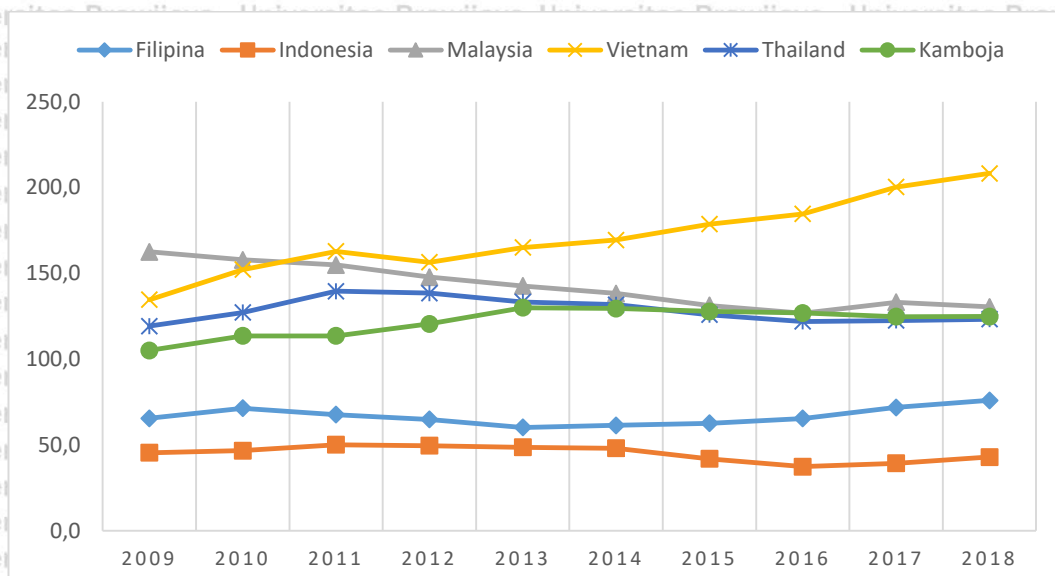
3. *Trade Openness*

Hasil perhitungan *trade openness* (TRADE) merupakan rasio perdagangan ekspor dan impor terhadap GDP diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari *World Bank* untuk semua negara sampel pada periode 2009-2018. Data yang digunakan yaitu data persentase tahunan berdasarkan *Trade (% of GDP)*. Semakin tinggi nilai rasio TRADE menandakan besarnya tingkat perdagangan suatu negara. Berikut nilai rasio setiap tahunnya yang ada pada setiap negara, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari TRADE yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Data Variabel *Trade Openness* Tahun 2009-2018

Tahun	Trade (% of GDP)					
	Filipina	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	Kamboja
2009	65,6	45,5	162,6	134,71	119,3	105,1
2010	71,4	46,7	157,9	152,22	127,3	113,6
2011	67,7	50,2	154,9	162,91	139,7	113,6
2012	64,9	49,6	147,8	156,55	138,5	120,6
2013	60,2	48,6	142,7	165,09	133,4	130,0
2014	61,5	48,1	138,3	169,53	131,8	129,6
2015	62,7	41,9	131,4	178,77	125,9	127,9
2016	65,5	37,4	126,9	184,69	122,0	127,0
2017	71,9	39,4	133,2	200,38	122,5	124,8
2018	76,1	43,0	130,5	208,31	123,3	124,9
Min	60,245	37,421	126,899	134,706	119,270	105,138
Max	76,059	50,180	162,559	208,307	139,676	130,046
Mean	66,747	45,044	142,631	171,317	128,365	121,708
Sd	5,042	4,424	12,644	22,318	7,126	8,330

Sumber: *World Bank*, data diolah, 2020



Gambar 6 Perkembangan Trade Openness Tahun 2009-2018

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 6 terdapat grafik *trade openness* (TRADE) sebagai salah satu acuan *economic openness* dari setiap tahunnya yang ada pada negara sampel.

Hasil grafik menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki nilai maksimum TRADE pada tahun 2018 dengan nilai 76,1% dan nilai minimum pada tahun 2013 dengan nilai 60,2%. Indonesia memiliki nilai maksimum TRADE pada tahun 2011 dengan nilai 50,2% dan nilai minimum pada tahun 2016 yaitu 37,4%. Malaysia memiliki nilai maksimum TRADE pada tahun 2009 yaitu sebesar 162,6% dan nilai minimum pada tahun 2016 dengan nilai 126,9%. Vietnam memiliki nilai maksimum TRADE pada tahun 2018 yaitu sebesar 208,3% dan nilai tingkat minimum pada tahun 2009 dengan nilai 134,7%. Thailand memiliki nilai maksimum TRADE pada tahun 2011 dengan nilai 139,7% dan nilai minimum pada tahun 2009 sebesar 119,3%. Indonesia memiliki nilai maksimum TRADE pada tahun 2011 dengan nilai 50,2% dan nilai minimum pada tahun 2016 yaitu 37,4%.

Kamboja memiliki nilai maksimum TRADE pada tahun 2013 sebesar 130,0% dan nilai minimum pada tahun 2009 sebesar 105,1%.

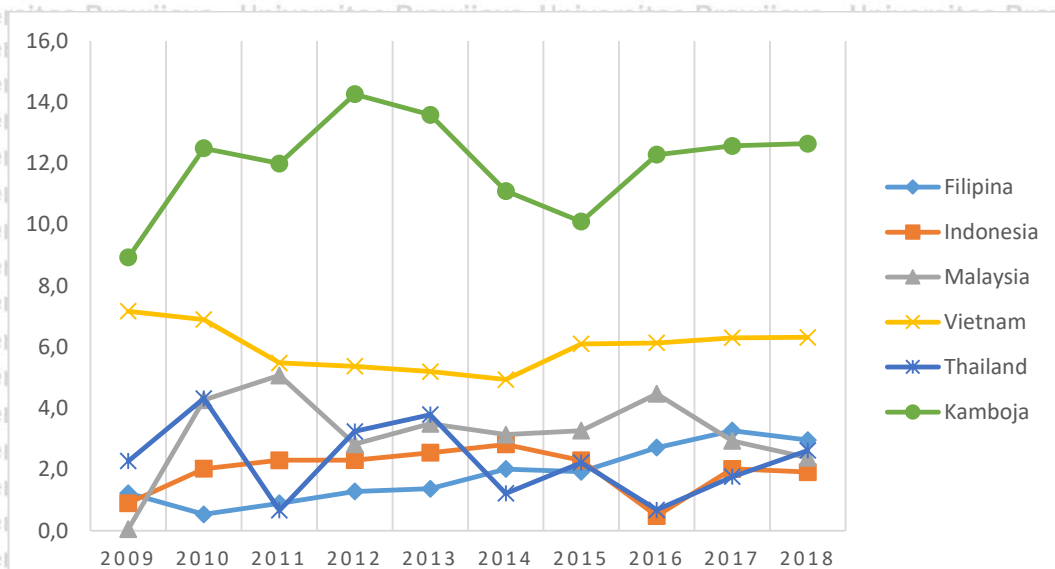
4. *Financial Openness*

Variabel *Financial Openness* (FINOP) yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Foreign Direct Investment Inflows* terhadap GDP dari masing-masing negara sampel. Hasil perhitungan diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari *World Bank*. Data yang digunakan adalah dalam satuan persentase. Nilai FINOP yang tinggi menandakan besarnya tingkat penanaman modal di suatu negara. Berikut adalah nilai setiap tahunnya yang ada pada setiap negara, nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari *FDI Inflows* selama tahun 2009-2018 yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Data Variabel *Financial Openness* Tahun 2009-2018

Tahun	Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)					
	Filipina	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	Kamboja
2009	1,2	0,9	0,1	7,2	2,3	8,9
2010	0,5	2,0	4,3	6,9	4,3	12,5
2011	0,9	2,3	5,1	5,5	0,7	12,0
2012	1,3	2,3	2,8	5,4	3,2	14,3
2013	1,4	2,6	3,5	5,2	3,8	13,6
2014	2,0	2,8	3,1	4,9	1,2	11,1
2015	1,9	2,3	3,3	6,1	2,2	10,1
2016	2,7	0,5	4,5	6,1	0,7	12,3
2017	3,3	2,0	2,9	6,3	1,8	12,6
2018	3,0	1,9	2,4	6,3	2,6	12,6
Min	0,536	0,487	0,057	4,941	0,667	8,925
Max	3,270	2,820	5,074	7,169	4,323	14,258
Mean	1,821	1,964	3,193	5,993	2,282	11,994
Sd	0,918	0,725	1,378	0,732	1,249	1,582

Sumber: *World Bank*, data diolah, 2020



Gambar 7 Perkembangan *Financial Openness* Tahun 2009-2018

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 7 terdapat nilai *financial openness* (FINOP) sebagai salah satu acuan *economic openness* dari setiap tahunnya yang ada pada negara sampel.

Hasil grafik menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki nilai maksimum FINOP pada tahun 2017 dengan nilai 3,3% dan nilai minimum pada tahun 2010 dengan nilai 0,5%. Indonesia memiliki nilai maksimum FINOP pada tahun 2014 dengan nilai 2,8% dan nilai minimum pada tahun 2016 yaitu 0,5%. Malaysia memiliki nilai maksimum FINOP pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,1% dan nilai minimum pada tahun 2009 dengan nilai 0,1%. Vietnam memiliki nilai maksimum FINOP pada tahun 2009 yaitu sebesar 7,1% dan nilai tingkat minimum pada tahun 2014 dengan nilai 4,9%. Thailand memiliki nilai maksimum FINOP pada tahun 2010 dengan nilai 4,3% dan nilai minimum pada tahun 2016 sebesar 0,7%. Kamboja memiliki nilai maksimum FINOP pada tahun 2012 sebesar 14,3% dan nilai minimum pada tahun 2009 sebesar 8,9%.

5. *Index of Economic Freedom*

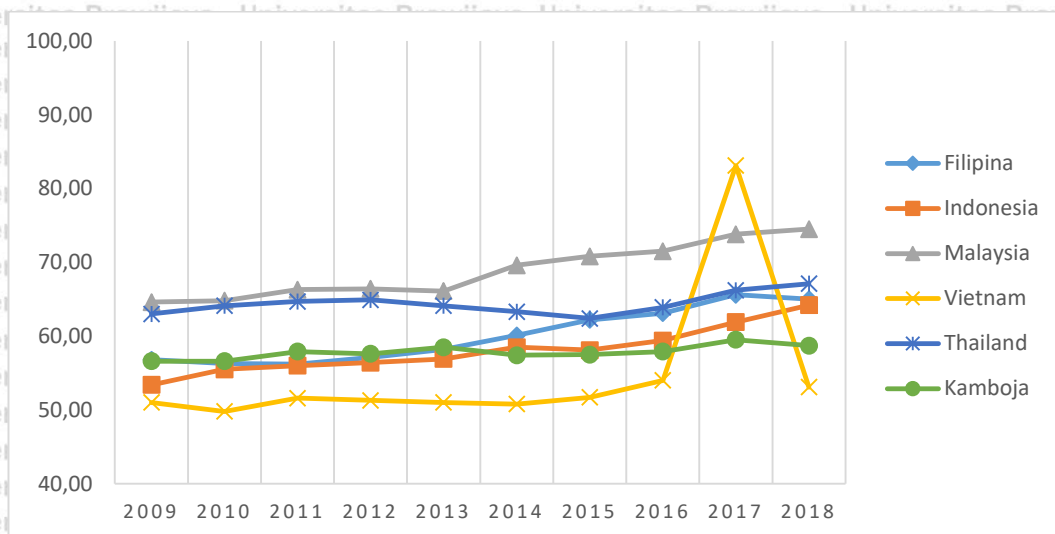
Hasil perhitungan *Index of Economic Freedom* (EF) diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari *Heritage Foundation* untuk semua negara sampel periode 2009-2018. Data yang digunakan merupakan rata-rata dari komponen *Economic Freedom* dalam satuan indeks 0-100. Nilai indeks yang mendekati skala angka 100 menandakan bahwa kebebasan yang maksimal pada negara tersebut.

Berikut adalah nilai setiap tahunnya yang ada pada setiap negara, nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum dari EF yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Data Variabel *Index of Economic Freedom* Tahun 2009-2018

Tahun	Index of Economic Freedom (0-100 interval dalam indeks)					
	Filipina	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Thailand	Kamboja
2009	56,8	53,4	64,6	51,0	63,0	56,6
2010	56,3	55,5	64,8	49,8	64,1	56,6
2011	56,2	56,0	66,3	51,6	64,7	57,9
2012	57,1	56,4	66,4	51,3	64,9	57,6
2013	58,2	56,9	66,1	51,0	64,1	58,5
2014	60,1	58,5	69,6	50,8	63,3	57,4
2015	62,2	58,1	70,8	51,7	62,4	57,5
2016	63,1	59,4	71,5	54,0	63,9	57,9
2017	65,6	61,9	73,8	83,1	66,2	59,5
2018	65,0	64,2	74,5	53,1	67,1	58,7
Min	56,2	53,4	64,6	49,8	62,4	56,6
Max	65,6	64,2	74,5	83,1	67,1	59,5
Mean	60,06	58,03	68,84	54,74	64,37	57,82
Sd	3,663	3,180	3,686	10,035	1,432	0,905

Sumber: *Heritage Foundation*, data diolah, 2020



Gambar 8 Perkembangan *Index of Economic Freedom* Tahun 2009-2018

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 8 terdapat grafik nilai *index of economic freedom* (EF) dari setiap tahunnya yang ada pada negara sampel. Hasil grafik menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki nilai tingkat maksimum EF pada tahun 2017 dengan nilai 65,6 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2011 dengan nilai 56,2. Indonesia memiliki nilai tingkat maksimum EF pada tahun 2018 dengan nilai 64,2 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2009 yaitu 53,4. Malaysia memiliki nilai tingkat maksimum EF pada tahun 2018 yaitu sebesar 74,5 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2009 dengan nilai 64,6. Vietnam memiliki nilai maksimum EF pada tahun 2017 yaitu sebesar 83,1% dan nilai tingkat minimum pada tahun 2010 dengan nilai 49,8%. Thailand memiliki nilai tingkat maksimum EF pada tahun 2018 dengan tingkat 67,1 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2015 sebesar 62,4. Indonesia memiliki nilai tingkat maksimum EF pada tahun 2018 dengan nilai 64,2 dan nilai tingkat minimum pada tahun 2009 yaitu 53,4. Kamboja memiliki nilai

tingkat maksimum EF pada tahun 2017 sebesar 59,5 dan nilai tingkat minimum pada dua tahun berturut-turut yaitu 2009 sampai 2010 sebesar 56,6.

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data dari variabel-variabel yang diteliti. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum (min), nilai maksimum (max), rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (sd). Nilai minimum menunjukkan data dengan nilai terendah dari seluruh data dalam variabel, sedangkan nilai maksimum menunjukkan data dengan nilai tertinggi dari seluruh data dalam variabel. *Mean* menunjukkan nilai rata-rata dari suatu data dalam variabel sedangkan standar deviasi menunjukkan penyebaran suatu data terhadap rata-rata dalam variabel.

Penelitian ini memiliki 5 (lima) variabel yang dianalisis dengan statistik deskriptif terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen tersebut adalah *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness*, dan *index of economic freedom* serta variabel dependen adalah laju *gross domestic product*. Periode pengujian sampel dalam penelitian ini dilakukan pada suatu pengamatan data panel selama 10 tahun, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 terhadap 6 (enam) negara di ASEAN. Pengukuran statistik deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Eviews*. Berikut penyajian data dari masing-masing negara yang diteliti adalah seperti Tabel 9.

Tabel 9 Hasil Analisis Deskriptif

	CPI (1-100)	TRADE (%)	FINOP (%)	EF (1-100)	GROWTH (%)
Minimum	20.000	37.421	0.057	49.800	-1.513
Maximum	52.000	208.307	14.258	83.100	7.632
Mean	34.417	112.635	4.542	60.643	5.294
Std. Dev.	8.532	45.264	3.814	6.609	2.106

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil dari Tabel 9 diketahui bahwa *Corruption Perception Index* (CPI) sebagai variabel independen yaitu X1 memiliki nilai minimum sebesar 20 point terletak pada Negara Kamboja. Nilai maksimum CPI sebesar 52 point terletak pada Negara Malaysia. Variabel CPI memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 34.417 point dengan standar deviasi sebesar 8.532.

Variabel independen atau X2 yaitu *Trade Openness* (TRADE) memiliki nilai minimum sebesar 37.421% yang terdapat pada negara Indonesia. Nilai maksimum dari variabel TRADE terdapat pada negara Vietnam sebesar 208.307%. Variabel TRADE memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 112.635% dengan standar deviasi sebesar 45.264%.

Variabel selanjutnya X3 yaitu *Financial Openness* (FINOP) memiliki nilai minimum sebesar 0.057 %, yang dapat terlihat pada negara Malaysia. Nilai maksimum variabel FINOP 14.258% yang dapat dilihat pada negara Kamboja. Variabel FINOP memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.542% dengan standar deviasi sebesar 3.814%

Variabel independen terakhir X4 yaitu *Index of Economic Freedom* (EF). Nilai minimum variabel EF menunjukkan angka sebesar 49.800 point yang terdapat pada negara Vietnam. Nilai maksimum variabel EF yaitu menunjukkan angka sebesar 83.100 point terletak pada Negara Vietnam. Nilai rata-rata variabel EF menunjukkan angka sebesar 60.643 point dengan standar deviasi sebesar 6.609 point.

Laju *Gross Domestic Product* (GROWTH) sebagai variabel dependen (Y) memiliki nilai minimum sebesar -1.513% terletak pada negara Malaysia. Nilai maksimum GROWTH sebesar 7.632% terdapat pada negara Filipina. Rata-rata (mean) GROWTH selama 10 tahun sebesar 5.294% dengan standar deviasi sebesar 2.106%.

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data sampel untuk mendapatkan hasil yang akan digunakan terhadap populasi.

Analisis statistik inferensial ini menggunakan aplikasi *Eviews*. Berikut ini adalah jenis uji yang harus dilakukan, sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memenuhi asumsi dasar dalam persamaan model regresi panel data agar hasil penelitian memiliki ketepatan, relevan, tidak bias, dan konsisten. Pengujian penyimpangan asumsi klasik dari metode *Ordinary Least Square* (OLS) dilakukan sebelum interpretasi atas hasil regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui uji *Jarque-Bera*. Pengambilan asumsi signifikan dalam penelitian ini adalah $> 5\%$ atau 0.05. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> \alpha$ 0.05, maka H_0 diterima yang berarti sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Namun, apabila nilai probabilitas *Jarque-*

$Bera < \alpha$ 0.05, maka H_a diterima yang berarti sampel berasal dari populasi yang terdistribusi tidak normal. Salah satu cara untuk melakukan uji normalitas adalah dengan melihat nilai probabilitas uji *Jarque-Bera*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Jarque-Bera 1

Jarque-Bera	22.87735
Probabilitas	0.000011

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 10 hasil uji normalitas model regresi dengan menggunakan *Jarque-Bera Test* diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 22.87735 dengan nilai probabilitas 0.000011. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai α 0.05 menyimpulkan bahwa terdapat masalah normalitas residual dalam model regresi. Hal ini menunjukkan data terdistribusi tidak normal sehingga variabel dependen dapat tidak dihitung menggunakan variabel independennya. Tidak terdistribusi secara normalnya data dapat menyebabkan bias pada hasil penelitian yang akan dihasilkan, maka dari itu perlu dilakukan tindakan selanjutnya yaitu melakukan uji *outlier*. Dikatakan *outlier* apabila data atau skor berbeda jauh (ekstrim) dari data lainnya.

Penentuan nilai ekstrim apakah data ini memiliki $z_{residual}$ kurang dari -1,96 atau lebih dari 1,96. Hasil dari uji *outlier* seperti pada Lampiran 2 ditemukan terdapat nilai ekstrim yang tersebar pada tahun 2009 di negara Malaysia, Thailand, Kamboja dan 2010 di negara Filipina. Data *outlier* dalam penelitian perlu diberikan perlakuan khusus karena dapat menimbulkan data dari negara Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina dan meniadakan tahun 2009

serta 2010 pada setiap negara dalam data sampel penelitian ini. Berikut merupakan hasil uji normalitas setelah dilakukan uji *outlier*.

Tabel 11 Hasil Uji Jarque-Bera 2 Setelah Uji Outlier

Jarque-Bera	2.748
Probabilitas	0.253

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Tabel 11 menunjukkan hasil pengujian asumsi normalitas dengan statistik uji *Jarque-Bera* sebesar 2.748 dan nilai probabilitas lebih besar dari nilai α ($0.253 > 0,05$). Hal ini menunjukkan data terdistribusi normal, dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pada asumsi ini diharapkan dapat dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Pengujian asumsi multikolinieritas dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF < 10$ maka model dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah pengujian multikolinieritas menggunakan VIF:

Tabel 12 Hasil Uji VIF

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
CPI	0.001628	62.96999	3.522498
TRADE	2.16E-05	10.07118	1.412205
FINOP	0.006256	6.913594	2.789596
EF	0.001289	152.1335	1.783454
C	3.192122	98.86835	NA

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 12 hasil pengujian diketahui bahwa perhitungan pada masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF dibawah 10. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel, sehingga model regresi ini dinyatakan layak untuk memprediksi variabel dependen menggunakan variabel independen.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui *Harvey Test*. Cara mendeteksi gejala heterokedastisitas ialah dengan membandingkan nilai probabilitas $Obs * R^2$ dengan tingkat signifikansi yang ditentukan ($\alpha = 5\%$). Ketentuan yang digunakan, jika probabilitas ($Obs * R^2$) $< (\alpha) 0.05$ maka H_0 ditolak yang berarti terjadinya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas ($Obs * R^2$) $> (\alpha) 0.05$ maka H_1 diterima yang menyatakan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 13 Hasil Uji Harvey

Obs*R-squared	5.971
Probabilitas	0.201

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian masing-masing variabel independen menggunakan *Harvey Test* diperoleh nilai $Obs * R^2$ sebesar 5.971 dengan probabilitas sebesar 0.201 maka hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas > 0.05 yang berarti tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi

ini lolos uji Heteroskedastisitas dan layak untuk memprediksi variabel dependen menggunakan variabel independen.

4) Uji Autokorelasi

Uji korelasi bertujuan menguji apakah observasi dari residual saling berkorelasi atau tidak. Pengujian asumsi autokorelasi diharapkan observasi residual tidak saling berkorelasi. Jika terdapat korelasi menandakan adanya masalah autokorelasi. Artinya, hasil pada periode tertentu dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Pengujian untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat melalui *Lagrange Multiplier Test (Breusch-Godfrey)*. Ketentuan yang digunakan jika probabilitas $Obs * R\text{-square} < (\alpha) 0.05$, H_0 ditolak yang artinya terjadinya autokorelasi dan sebaliknya probabilitas $Obs * R\text{-square} > (\alpha) 0.05$, H_0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 14 Hasil Uji Breusch-Godfrey

Obs*R-squared	3.792
Probabilitas	0.150

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa uji *Breusch-Godfrey* memperoleh nilai $Obs * R^2$ sebesar 3.792 dengan probabilitas sebesar 0.150. Nilai tersebut dalam batasan yang ditentukan yaitu > 0.05 , H_0 diterima yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antar observasi residual tidak saling berkorelasi, sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

b. Pemilihan Model Estimasi Data

1) Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang terbaik dalam mengestimasi data panel di antara model *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Jika memiliki *p-value* $> \alpha$ 0.05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga kesimpulan model yang terpilih adalah *Common Effect*. Apabila *p-value* $< \alpha$ 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga kesimpulan model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

Tabel 15 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.819972	(5,38)	0.0001
Cross-section Chi-square	30.742364	5	0.0000

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa statistik uji *chi square* dalam uji Chow pada pengaruh *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* terhadap laju *gross domestic product* bernilai 30.742 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan *p-value* $< (\alpha=5\%)$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan ini menunjukkan metode terbaik antara *Common Effect* atau *Fixed Effect* adalah *Fixed Effect*. Tahap yang seharusnya dilakukan adalah melakukan uji Hausman.

2) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang terbaik di antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Jika memiliki *p-value* $> \alpha$ 0.05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga kesimpulan model yang terpilih adalah *Random Effect*. Apabila *p-value* $< \alpha$ 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga kesimpulan model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

Tabel 16 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.260604	4	0.5152

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa statistik uji *Chi-Square* dalam uji Hausman pada pengaruh *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* terhadap laju *gross domestic product* bernilai 3.261 dengan probabilitas sebesar 0.515. Hasil pengujian tersebut menunjukkan $p\text{-value} > (\alpha=5\%)$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian model estimasi regresi panel yang tepat untuk pengaruh *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* terhadap laju *gross domestic product* adalah *Random Effect Model* (REM). Maka, analisis regresi data panel pada penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM).

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect Model* (REM) lebih baik dari model *Common Effect Model* (CEM). Jika probabilitas $\geq \text{level of significance}$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya efek dalam model estimasi regresi panel yang digunakan adalah *Common Effect Model* (FEM). Hasil pengujian efek model menggunakan uji LM dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 17 Uji LM

LM statistik	14.398
Probabilitas	0.000

Berdasarkan Tabel 17 hasil pengujian *Lagrange Multiplier* diperoleh LM statistik sebesar 14.398 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas $<$ *level of significance* (*level* $\alpha = 5\%$). Dengan demikian model estimasi regresi panel untuk *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* terhadap *gross domestic product* berdasarkan uji *Lagrange Multiplier* adalah *Random Effect Model* (REM).

c. Analisis Regresi Data Panel

Analisis Regresi Linier Data Panel pada penelitian ini menggunakan metode *Random Effect*. Pemilihan metode *Random Effect* sebagai metode analisis data panel pada penelitian ini sebelumnya diuji melalui uji Chow dan uji Hausman terlebih dahulu, sehingga akhirnya metode *Random Effect* yang paling tepat untuk menguji data panel pada penelitian ini. Hasil pengujian pengaruh *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* terhadap laju *gross domestic product* dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 18 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std Error	Tstatistic	Prob
C	1.859	2.279	0.816	0.419
CPI	0.066	0.054	1.239	0.222
TRADE	-0.004	0.010	-0.374	0.710
FINOP	0.373	0.123	3.038	0.004
EF	0.002	0.032	0.071	0.944
Indonesia	0.439			
Malaysia	-0.754			
Thailand	-1.286			
Filipina	1.293			
Vietnam	0.604			
Kamboja	-0.296			
<i>F</i> statistic	= 2.611	R-squared	= 0.195	
Prob.	= 0.048	Adj. R-squared	= 0.121	

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 18 model regresi dari Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

$$GROWTH = 1.859 + 0.066 \text{ CPI} - 0.004 \text{ TRADE} + 0.373 \text{ FINOP} + 0.002 \text{ EF}$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Konstanta sebesar 1.859 mengindikasikan bahwa secara umum apabila *Corruption Perception Index*, *Trade Openness*, *Financial Openness*, dan *Index of Economic Freedom* bernilai konstan (tidak berubah atau 0) maka nilai Laju *Gross Domestic Product* sebesar 1.859%
- 2) Koefisien regresi *Corruption Perception Index* sebesar 0.066 mengindikasikan bahwa *Corruption Perception Index* berpengaruh positif terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hal ini berarti terjadinya peningkatan *Corruption Perception Index* sebesar 1 point maka akan meningkatkan Laju *Gross Domestic Product* sebesar 0.066% dan sebaliknya.
- 3) Koefisien regresi *Trade Openness* sebesar -0.004 mengindikasikan bahwa *trade openness* berpengaruh negatif terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hal ini berarti terjadinya peningkatan *Trade Openness* sebesar 1% maka akan menurunkan Laju *Gross Domestic Product* sebesar 0.004% dan sebaliknya.
- 4) Koefisien regresi *Financial Openness* sebesar 0.373 mengindikasikan bahwa *Financial Openness* berpengaruh positif terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hal ini berarti terjadinya peningkatan *Financial*

Oppeness sebesar 1% maka akan meningkatkan Laju *Gross Domestic Product* sebesar 0.373% dan sebaliknya.

- 5) Koefisien *Index of Economic Freedom* sebesar 0.002 mengindikasikan bahwa *Index of Economic Freedom* berpengaruh positif terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hal ini berarti terjadinya peningkatan *Index of Economic Freedom* sebesar 1 point maka akan meningkatkan Laju *Gross Domestic Product* sebesar 0.002% dan sebaliknya.

Hasil persamaan regresi data panel berdasarkan Negara sampel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Estimation Command:

LS(CX=R) GROWTH? CPI? TRADE? FINOP? EF? C

Estimation Equations:

GROWTH_INDONESIA

$C(6)+C(1)*CPI_INDONESIA+C(2)*TRADE_INDONESIA+C(3)*FINOP_INDONESIA + C(4)*EF_INDONESIA + C(5)$

GROWTH_MALAYSIA

$C(7)+C(1)*CPI_MALAYSIA+C(2)*TRADE_MALAYSIA+C(3)*FINOP_MALAYSIA + C(4)*EF_MALAYSIA + C(5)$

GROWTH_THAILAND

$C(8)+C(1)*CPI_THAILAND+C(2)*TRADE_THAILAND+C(3)*FINOP_THAILAND + C(4)*EF_THAILAND + C(5)$

GROWTH_FILIPINA

$C(9)+C(1)*CPI_FILIPINA+C(2)*TRADE_FILIPINA+ C(3)*FINOP_FILIPINA+ C(4)*EF_FILIPINA + C(5)$

GROWTH_VIETNAM

$C(10)+C(1)*CPI_VIETNAM+C(2)*TRADE_VIETNAM+C(3)*FINOP_VIETNAM + C(4)*EF_VIETNAM + C(5)$

$$\text{GROWTH_KAMBOJA} \\ C(11)+C(1)*\text{CPI_KAMBOJA}+C(2)*\text{TRADE_KAMBOJA}+C(3)*\text{FINOP_KAMB} \\ \text{OJA} + C(4)*\text{EF_KAMBOJA} + C(5)$$

Substituted Coefficients:

$$\text{GROWTH_INDONESIA} \\ 0.4385 + 0.0664*\text{CPI_INDONESIA} - 0.0037*\text{TRADE_INDONESIA} + \\ 0.3730*\text{FINOP_INDONESIA} + 0.0022*\text{EF_INDONESIA} + 1.8588$$

$$\text{GROWTH_MALAYSIA} \\ -0.7539 + 0.0664*\text{CPI_MALAYSIA} - 0.0037*\text{TRADE_MALAYSIA} + \\ 0.3730*\text{FINOP_MALAYSIA} + 0.0022*\text{EF_MALAYSIA} + 1.8588$$

$$\text{GROWTH_THAILAND} \\ -1.2858 + 0.0664*\text{CPI_THAILAND} - 0.0037*\text{TRADE_THAILAND} + \\ 0.3730*\text{FINOP_THAILAND} + 0.0022*\text{EF_THAILAND} + 1.8588$$

$$\text{GROWTH_FILIPINA} \\ 1.2927 + 0.0664*\text{CPI_FILIPINA} - 0.0037*\text{TRADE_FILIPINA} + \\ 0.3730*\text{FINOP_FILIPINA} + 0.0022*\text{EF_FILIPINA} + 1.8588$$

$$\text{GROWTH_VIETNAM} \\ 0.6040 + 0.0664*\text{CPI_VIETNAM} - 0.0037*\text{TRADE_VIETNAM} + \\ 0.3730*\text{FINOP_VIETNAM} + 0.0022*\text{EF_VIETNAM} + 1.8588$$

$$\text{GROWTH_KAMBOJA} \\ -0.2956 + 0.0664*\text{CPI_KAMBOJA} - 0.0037*\text{TRADE_KAMBOJA} + \\ 0.3730*\text{FINOP_KAMBOJA} + 0.0022*\text{EF_KAMBOJA} + 1.8588$$

Persamaan model regresi data panel berdasarkan negara sampel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1) Model Negara Indonesia

$$\text{GROWTH} = 2.297 + 0.066 \text{CPI} - 0.004 \text{TRADE} + 0.373 \text{FINOP} + 0.002 \text{EF}$$

Interpretasi persamaan regresi data panel Negara Indonesia adalah jika variabel CPI, TRADE, FINOP, EF sama dengan nol (0) atau bernilai konstan (tidak berubah), maka nilai GROWTH sebesar 2.297%. setiap kenaikan satu nilai CPI akan menaikkan GROWTH sebesar 0.066 satuan. Kenaikan satu nilai TRADE

akan menurunkan GROWTH – 0.004 satuan, kenaikan satu nilai FINOP akan menaikkan GROWTH 0.373 satuan, dan kenaikan satu nilai EF akan menaikkan 0.002 satuan.

2) Model Negara Malaysia

$$GROWTH = 1.105 + 0.066 \text{ CPI} - 0.004 \text{ TRADE} + 0.373 \text{ FINOP} + 0.002 \text{ EF}$$

Interpretasi persamaan regresi data panel Negara Malaysia adalah jika variabel

CPI, TRADE, FINOP, EF sama dengan nol (0) atau bernilai konstan (tidak

berubah), maka nilai GROWTH sebesar 1.105% setiap kenaikan satu nilai CPI

akan menaikkan GROWTH sebesar 0.066 satuan. Kenaikan satu nilai TRADE

akan menurunkan GROWTH – 0.004 satuan, kenaikan satu nilai FINOP akan

menaikkan GROWTH 0.373 satuan, dan kenaikan satu nilai EF akan

menaikkan 0.002 satuan.

3) Model Negara Thailand

$$GROWTH = 0.573 + 0.066 \text{ CPI} - 0.004 \text{ TRADE} + 0.373 \text{ FINOP} + 0.002 \text{ EF}$$

Interpretasi persamaan regresi data panel Negara Thailand adalah jika variabel

CPI, TRADE, FINOP, EF sama dengan nol (0) atau bernilai konstan (tidak

berubah), maka nilai GROWTH sebesar 0.573% setiap kenaikan satu nilai CPI

akan menaikkan GROWTH sebesar 0.066 satuan. Kenaikan satu nilai TRADE

akan menurunkan GROWTH – 0.004 satuan, kenaikan satu nilai FINOP akan

menaikkan GROWTH 0.373 satuan, dan kenaikan satu nilai EF akan

menaikkan 0.002 satuan.

4) Model Negara Filipina

$$GROWTH = 3.152 + 0.066 \text{ CPI} - 0.004 \text{ TRADE} + 0.373 \text{ FINOP} + 0.002 \text{ EF}$$

Interpretasi persamaan regresi data panel Negara Filipina adalah jika variabel CPI, TRADE, FINOP, EF sama dengan nol (0) atau bernilai konstan (tidak berubah), maka nilai GROWTH sebesar 3.152% setiap kenaikan satu nilai CPI akan menaikkan GROWTH sebesar 0.066 satuan. Kenaikan satu nilai TRADE akan menurunkan GROWTH – 0.004 satuan, kenaikan satu nilai FINOP akan menaikkan GROWTH 0.373 satuan, dan kenaikan satu nilai EF akan menaikkan 0.002 satuan.

5) Model Negara Vietnam

$$GROWTH = 2.463 + 0.066 \text{ CPI} - 0.004 \text{ TRADE} + 0.373 \text{ FINOP} + 0.002 \text{ EF}$$

Interpretasi persamaan regresi data panel Negara Vietnam adalah jika variabel CPI, TRADE, FINOP, EF sama dengan nol (0) atau bernilai konstan (tidak berubah), maka nilai GROWTH sebesar 2.463% setiap kenaikan satu nilai CPI akan menaikkan GROWTH sebesar 0.066 satuan. Kenaikan satu nilai TRADE akan menurunkan GROWTH – 0.004 satuan, kenaikan satu nilai FINOP akan menaikkan GROWTH 0.373 satuan, dan kenaikan satu nilai EF akan menaikkan 0.002 satuan.

6) Model Negara Kamboja

$$GROWTH = 1.563 + 0.066 \text{ CPI} - 0.004 \text{ TRADE} + 0.373 \text{ FINOP} + 0.002 \text{ EF}$$

Interpretasi persamaan regresi data panel Negara Kamboja adalah jika variabel CPI, TRADE, FINOP, EF sama dengan nol (0) atau bernilai konstan (tidak berubah), maka nilai GROWTH sebesar 1.563% setiap kenaikan satu nilai CPI akan menaikkan GROWTH sebesar 0.066 satuan. Kenaikan satu nilai TRADE akan menurunkan GROWTH – 0.004 satuan, kenaikan satu nilai FINOP akan

menaikkan GROWTH 0.373 satuan, dan kenaikan satu nilai EF akan menaikkan 0.002 satuan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji R^2 menunjukkan besarnya presentase variasi seluruh variabel terikat yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi (variasi varians independen) yang dihasilkan, sisanya dijelaskan oleh variasi variabel lain diluar mode. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabel dependen. Perhitungan ini menggunakan *Eviews 9* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 19 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.195449	Mean dependent var	1.466987
Adjusted R-squared	0.120607	S.D. dependent var	1.016345

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Tabel 19 menunjukkan hasil uji diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0.1206 yang berarti sebesar 12.06%. Hal ini berarti keragaman laju *gross domestic product* dapat dijelaskan oleh variabel *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* sebesar 12.06%, atau dengan kata lain kontribusi *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* terhadap laju *gross domestic product* sebesar 12.06%, sedangkan sisanya sebesar 87.94% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Uji F dikatakan signifikan atau berpengaruh secara simultan apabila nilai dari probabilitas (*F-statistic*) $< \alpha$ (5%), maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansi $> 5\%$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 20 Hasil Uji F

<i>F-statistic</i>	2.611
Prob.	0.048

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 20 terdapat nilai F_{hitung} sebesar 2.611 dengan F_{tabel} sebesar 2.589 dan probabilitas 0.048. Berdasarkan hal tersebut, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2.611 > 2.589$ dan probabilitas kurang dari 5%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel bebas yaitu *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu laju *gross domestic product*.

b. Uji t

Uji t-Statistik merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu *corruption perception index*, *trade openness*, *financial openness* dan *index of economic freedom* secara (parsial) mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu laju *gross domestic product*. Uji t menggunakan pengujian t-statistik 2 arah yakni tingkat signifikansi (α) 0,05 dan membandingkan nilai statistik t_{hitung} dengan t_{tabel} . Uji dua sisi ini dilakukan karena dalam penelitian ini tidak menentukan arah dalam hipotesis alternatif. Kriteria pengujian menyatakan apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan probabilitas < tingkat signifikansi (α) maka terdapat pengaruh signifikan secara individu terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} pada penelitian ini sebesar 2.017 atau -2.017.

Tabel 21 Hasil Uji t

Variabel	Tstatistic	Prob
C	0.816	0.419
CPI	1.239	0.222
TRADE	-0.374	0.710
FINOP	3.038	0.004
EF	0.071	0.944

Sumber: Hasil *Eviews*, Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 21 dalam perhitungan hasil uji t (parsial) didapatkan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengujian hipotesis secara parsial *corruption perception index* terhadap laju *gross domestic product* menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 1.239 dengan probabilitas sebesar 0.222. Hasil pengujian tersebut menunjukkan $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (2.017) dan probabilitas > tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, yaitu secara parsial variabel *corruption perception index* tidak berpengaruh signifikan terhadap laju *gross domestic product*. Hal tersebut menjelaskan naik dan turunnya *gross domestic product* tidak dipengaruhi oleh *corruption perception index*.

- 2) Pengujian hipotesis secara parsial *trade openness* terhadap laju *gross domestic product* menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -0.374 dengan probabilitas sebesar 0.710 . Hasil pengujian tersebut menunjukkan $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (-2.017) dan probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, yaitu secara parsial variabel *trade openness* tidak berpengaruh signifikan terhadap laju *gross domestic product*. Hal tersebut menjelaskan naik dan turunnya laju *gross domestic product* tidak dipengaruhi oleh *trade openness*.
- 3) Pengujian hipotesis secara parsial *financial openness* terhadap laju *gross domestic product* menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 3.038 dengan probabilitas sebesar 0.004 . Hasil pengujian tersebut menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.017) dan probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima, yaitu secara parsial variabel *financial openness* berpengaruh signifikan terhadap laju *gross domestic product*. Hal tersebut menjelaskan bahwa naik dan turunnya laju *gross domestic product* dipengaruhi oleh *financial openness*.
- 4) Pengujian hipotesis secara parsial *index of economic freedom* terhadap laju *gross domestic product* menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 0.071 dengan probabilitas sebesar 0.944 . Hasil pengujian tersebut menunjukkan $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (2.017) dan probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_5 ditolak, yaitu secara parsial variabel *index of economic freedom* tidak berpengaruh signifikan terhadap laju *gross domestic product*. Hal tersebut menjelaskan naik dan turunnya

laju *gross domestic product* tidak dipengaruhi oleh *index of economic freedom*.

E. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Simultan dari *Corruption Perception Index*, *Trade Openness*, *Financial Openness* dan *Index of Economic Freedom* Terhadap Laju *Gross Domestic Product*

Berdasarkan analisis *Corruption Perception Index*, *Trade Openness*, *Financial Openness* dan *Index of Economic Freedom* mempunyai pengaruh simultan yang signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hasil Uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 2.611 sedangkan nilai F tabel sebesar 2.589, artinya nilai F hitung > F tabel. Nilai signifikansi F sebesar 0.048 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yaitu secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel *Corruption Perception Index*, *Trade Openness*, *Financial Openness* dan *Index of Economic Freedom* terhadap Laju *Gross Domestic Product*.

Chalid (2010) memaparkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi dalam paradigma sosial, sebagai pencapaian cara hidup dan pola berpikir manusia dari tingkat sederhana hingga ke tingkat yang lebih kompleks. Dengan demikian teori pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu cerita (yang logis) keterkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi.

Menurut teori Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul

peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja atau spesialisasi dan memperluas pasar. Sesuai dengan penelitian Laksono (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor *endogenous* yang merupakan model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hasil penelitian dan teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengenai pengaruh antara variabel *Corruption Perception Index*, *Trade Openness*, *Financial Openness* dan *Index of Economic Freedom*.

2. Pengaruh *Corruption Perception Index* Secara Parsial Terhadap Laju *Gross Domestic Product*

Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel *Corruption Perception Index* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hal ini karena $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ dimana nilai t_{hitung} sebesar 1.239 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.017 atau probabilitas lebih dari 0.05 dengan nilai probalitasnya 0.222 sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2010) menyimpulkan bahwa korupsi korupsi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan variabel lain yang tidak diukur. Serta, Huang (2016) yang mengatakan bahwa CPI tidak berpengaruh signifikan terhadap GDP di negara Asia Pasifik. Namun bagi Korea Selatan tingkat korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori pertumbuhan endogen dalam Rahardja dan Manurung (2008: 139), menyebutkan bahwa faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain ketersediaan kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional (*term of trade*). Dengan demikian negara yang memiliki kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan yang baik akan mempengaruhi tingkat korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini bertentangan oleh Nawatmi (2014) menyatakan dalam sektor ekonomi terdapat hubungan signifikan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana korupsi dapat meningkatkan biaya karena adanya penyidikan. Serta, korupsi juga dapat megurangi biaya karena mempermudah birokrasi dengan membuat aturan serta hambatan baru. Ketidaksesuaian hasil penelitian ini hanya sebagai penilaian untuk melihat seberapa besar tingkat kecurangan dalam pembrosan dana (*high cost economy*) sehingga tidak cukup mempengaruhi Laju *Gross Domestic Product* melainkan pembangunan ekonomi menjadi tidak merata.

3. Pengaruh *Trade Openness* Secara Parsial Terhadap Laju *Gross Domestic Product*

Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel *Trade Openness* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hal ini karena $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ dimana nilai t_{hitung} sebesar -0.374 sedangkan t_{tabel} sebesar -2.017 atau probabilitas lebih dari 0.05 dimana nilai probalitasnya 0.710 sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hasil tersebut

tidak sesuai dengan hipotesis awal penelitian yang menjelaskan bahwa *trade openness* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa *trade openness* yang merupakan salah satu ukuran tingkat *economic openness* pada negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak cukup mempengaruhi laju GDP.

Kim (2011) mendorong hasil penelitian ini, menyebutkan bahwa sebagian negara berkembang khususnya negara dengan pembangunan keuangan yang rendah, karena negara berkembang masih belum memiliki kesiapan yang cukup baik dalam menghadapi persaingan global. Tidak signifikannya hasil penelitian ini dikarenakan negara sampel pada penelitian ini merupakan negara berkembang dimana masih belum mampu mengoptimalkan kebijakan perdagangan global, dikarenakan perdagangan tidak hanya terdapat pada aliran barang dan jasa dari pasar internasional, namun juga membuka kemungkinan terjadinya transfer teknologi. Menurut Chang, *et al.* (2009) menyatakan bahwa *economic openness* akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi apabila disertai oleh perbaikan-perbaikan pada fasilitas pendukungnya, yakni mencakup sektor finansial, infrastruktur publik, kualitas modal manusia, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta stabilitas perekonomian dan harga. Berdasarkan hal tersebut, laju GDP pada negara sampel penelitian ini belum cukup menggambarkan variabel *trade openness* sehingga menunjukkan tidak adanya pengaruh secara parsial terhadap laju *gross domestic product*.

4. Pengaruh *Financial Openness* Secara Parsial Terhadap Laju *Gross Domestic Product*

Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel *Financial Openness* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laju *Gross Domestic*

Product. Hal ini karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana nilai t_{hitung} sebesar 3.038 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.017 atau probabilitas kurang dari 0.05 dimana nilai probabilitasnya

0.004 sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal penelitian yang menjelaskan bahwa *financial openness* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap laju *gross domestic product*.

Penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan FINOP pada negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini akan mendorong laju GDP karena dengan adanya FINOP yang diproyeksikan oleh FDI *inflows* menyebabkan suatu negara terutama negara sampel mampu berperan sebagai penyedia modal dan pelengkap investasi domestik serta dapat mempercepat transmisi teknologi modern dan pengembangan *human capital* sehingga tingkat produktivitas nasional meningkat serta efisiensi produksi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori neoklasik yang dikembangkan oleh Solow menyebutkan bahwa untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan jangka panjang pada suatu negara dibutuhkan upaya pengembangan yang penuh pada tingkat tabungan atau investasi, pertumbuhan penduduk dan tingkat penguasaan teknologi (Herlambang, *et al.* 2002:59).

Selain itu, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Makki

dan Somwaru (2004) bahwa aktivitas pada saluran keuangan internasional atas FDI (*Foreign Direct Investment*) juga harus dilakukan secara intensif, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terdorong positif dan jangka panjang.

5. Pengaruh *Index of Economic Freedom* Secara Parsial Terhadap Laju Gross

Domestic Product

Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel *Index of Economic Freedom* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product*. Hal ini karena $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dimana nilai t_{hitung} sebesar 0.071 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.017 atau probabilitas lebih dari 0.05 dimana nilai probabilitasnya 0.944 sehingga H_0 diterima dan H_5 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa *Index of Economic Freedom* pada negara yang menjadi sampel pada penelitian ini, tidak cukup mempengaruhi laju GDP. Hal ini disebabkan bahwa negara pada sampel penelitian merupakan negara berkembang, dimana masih membutuhkan intervensi pemerintah yang tinggi karena negara tersebut masih dalam tahapan sehingga belum siap untuk menerima penerapan *economic freedom*.

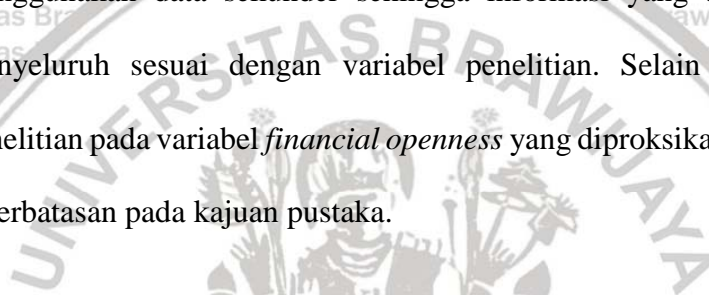
Menurut Akin, *et al.* (2014) *economic freedom* merupakan bentuk kegiatan yang bebas bekerja, memproduksi, berkonsumsi dan berinvestasi yang dilindungi tetapi tidak dihambat oleh negara. Dengan ini, terdapat *index of economic freedom* yaitu tingkat kebebasan suatu negara dari empat komponen yang kompleks dengan menunjukkan seberapa terbuka dan ramah bisnis suatu negara dalam bentuk tingkat skala 0-100. Pendekatan yang digunakan pada indeks ini berlandaskan teori kebebasan ekonomi yang dikemukakan oleh

Smith. Menurut Smith (Chalid, 2010) menyebutkan *economic freedom* akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (*stationary state*). Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi swasta akan cenderung mengalir ke lingkungan ekonomi yang lebih menarik untuk kegiatan produktif. Di sisi lain, akan menimbulkan pajak tinggi, regulasi berlebihan, penegakan kontrak yang bias, kurangnya jaminan hukum, hak kepemilikan yang tidak aman, dan ketidakstabilan moneter akan menghalangi investasi dan pertumbuhan.

Berdasarkan hal tersebut, tidak signifikannya hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kondisi *economic freedom* di negara sampel penelitian ini bukanlah merupakan hal yang menjadikan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kegiatan produktivitas yang efisien dalam alokasi sumber daya dan terdapat aturan proteksionis di sektor sumber daya alam suatu negara masih menjadi hambatan dalam *economic freedom* pada negara sampel. Sedangkan, hasil penelitian pada Akin, *et al.* (2014) bertolakbelakang pada penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat *economic freedom* memiliki hubungan yang positif signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi pada semua kelompok berpenghasilan menengah ke bawah dengan adanya variabel penjelas melalui pemisahan indeks untuk mengevaluasi dampak komponen yang membentuk *index of economic freedom* secara terpisah.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan penelitian yaitu seperti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini hanya terdiri dari 4 variabel yaitu CPI, *trade openness*, *financial openness*, dan *index of economic freedom*. Sedangkan, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. dalam penelitian ini, pada proses pengambilan data menggunakan data sekunder sehingga informasi yang ada pada sampel tidak menyeluruh sesuai dengan variabel penelitian. Selain itu, masih kurangnya penelitian pada variabel *financial openness* yang diproksikan FDI sehingga terdapat keterbatasan pada kajian pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. *Corruption Perception Index, Trade Openness, Financial Openness Dan Index of Economic Freedom* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product* pada negara Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja (periode 2010-2018) yang menjadi sampel pada penelitian ini.
2. *Corruption Perception Index* berpengaruh tidak signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product* pada negara Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja (periode 2010-2018) yang menjadi sampel pada penelitian ini.
3. *Trade Openness* berpengaruh berpengaruh tidak signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product* pada negara Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja (periode 2010-2018) yang menjadi sampel pada penelitian ini.
4. *Financial Openness* berpengaruh positif signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product* pada negara Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja (periode 2010-2018) yang menjadi sampel pada penelitian ini.

5. *Index of Economic Freedom* berpengaruh tidak signifikan terhadap Laju *Gross Domestic Product* pada negara Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja (periode 2011-2018) yang menjadi sampel pada penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yang diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah jumlah sampel yang lebih besar, diantaranya dapat menambahkan sampel negara maju dengan membandingkan negara berkembang. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel diluar penelitian ini, dikarenakan terdapat banyak faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti jumlah penduduk, kekayaan alam dan lain-lain, yang dapat menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya atau menambahkan variabel kontrol, dikarenakan variabel kontrol dapat memperjelas hubungan antar variabel atau dapat disebut sebagai variasi penekan.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran harus lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Kebijakan pengeluaran dan penggunaan anggaran pemerintah yang kurang tepat dapat berdampak negatif dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djojohadikusumo, Sumitro., 1993. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. LPES

Ekananda, Mahyus. 2014. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

_____, Mahyus. 2015. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.

_____, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics*. Alih Bahasa. Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga

Herlambang, T. Sugiarto, Brastoro. Dan Kelana, S. 2002. *Ekonomi Makro Teori Analisis dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.

Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. PT Raja Grafindi Persada.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Lopa, B. 2011. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas

Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi keenam. Jakarta: Erlangga.

Muchtolifah, 2012. *Ekonomi Makro*. Unesa University Press. Surabaya

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Priadana, H. Moh. Sidik dan Saludin Muis. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahardja, P dan Manurung, M. 2008. *Teori Ekonomi Makro. Edisi Keempat*. Lembaga Penerbit FE UI.

Riyad, M. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Enam Negara Asean Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Enam Negara Asean. Jakarta: Universitas Indonesia

Robert, Klitgaard. 2001. *Membasmi korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Robinson, Tarigan. 2009. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi 1*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Supranto dan Nandan Limakrisna. 2013. *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sutedi, Adrian. 2014. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

T. Gilarso. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Edisi Kelima* Yogyakarta: Kanisius.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Bibi, S. dan Rashid, H. 2014. Impact of Trade Openness, FDI, Exchange Rate and Inflation on Economic Growth: A Case Study of Pakistan. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*. Vol.4 No.2.

Akin, *et al.* 2014. The Impact of Economic Freedom Upon Economic Growth: An Application on Different Income Groups. *Asian Economic and Financial Review*. Vol.4 No.8

Andersonn, S dan Heywood, Paul M. 2009. The Politics of Perception: Use and Abuse of *Transparency International's* Approach to Measuring Corruption. *Political Studies*. Vol.57. No.2

Bibi, S. dan Rashid, H. 2014. Impact of Trade Openness, FDI, Exchange Rate and Inflation on Economic Growth: A Case Study of Pakistan. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*. Vol.4 No.2.

Blackburn, Keith NB, and M. Emranul H. 2005. Public Expenditures, Bureaucratic Corruption and Economic Development. *Economic Discussion Paper EDP-0530*. The University of Manchester.

Chalid, Pheni. 2010. *Teori Pertumbuhan*. Modul. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Chang, *et al.* 2009. Openness Can Be Good for Growth: The Role Of Policy Complementarities. *Journal of Development Economics*. Vol 90. No 33-49

Dreher, A. 2006. The influence of globalization on taxes and social policy: An empirical analysis for OECD countries. *European Journal of Political Economy*, Vol.22 No.1

Ertimi, B.E dan Saeh, M.A. 2013. The Impact of Corruption on Some Aspects of the Economy. *International Journal of Economics and Finance*. Vol.5 No.8

Gräbne, *et al.* 2018. Measuring Economic Openness: A Review of Existing Measures and Empirical Practices. *ICAE Working Paper Series*.

Gwartney, J. 2009. Institutions, Economic Freedom, and Cross-Country Differences in Performance. *Southern Economic Journal*. Vol.75 No.4

Hambali, Hassan. 2007. Dampak Lingkungan Usaha terhadap Pertumbuhan Investasi dan Ekonomi Indonesia: Aplikasi Model Makroekonomi yang diperluas dengan Coruption Perception Index. *Disertasi. Institut Pertanian Bogor*.

Hamdi, Fairouz Mustafa. 2013. The Impact of Globalization in the Developing Countries. *Developing Country Studies*. Vol.3 No 11

Hariyani, *et al.* 2016. Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pasific Region. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol.5 No.2

Hassen, *et al.* 2013. Trade Openness and Economic Growth: The Case of Tunisia. *International Journal of Advances in Management and Economics*. Vol.2. No.2

Huang, C. 2016. North American Journal Of Economics And Finance Is Corruption Bad For Economic Growth Evidence From Asia-Pacific Countries. *North American Journal of Economics and Finance*, Vol.35 No.100

Hussain, M dan Haque, M. 2015. Impact of Economic Freedom on the Growth Rate: A Panel Data Analysis. Dalam R. Fendel: www.mdpi.com/journal/economies

Irawanti, I. 2015. Pengaruh Good Local Governance, Net Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Korupsi (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). *Jurusan*

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Khair, Muhammad N A. 2014. Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Kuntoro, *et al.* 2018. Does Economic Openness Contribute to The Increase of Income Inequality in Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*. Vol.7 No.12

Lanza, Victor. 2012. The Classical Approach to Capital Accumulation.

Makki, S. dan Somwaru, A .2004 Impact of Foreign Direct Investment and Trade on Economic Growth: Evidence from Developing Countries. *American Journal of Agricultural Economics*. Vol. 86 No.3

Marelli dan Signorelli. 2011. China and India: Openness, Trade and Effects on Economic Growth. *The European Journal of Comparative Economics*. Vol.8 No. 1

Mulyadi, Endang. 2014. *Konsep-Konsep Dasar Dalam Pembangunan Ekonomi*. Modul. Jakarta: Universitas Terbuka

Nawatmi, Sri. 2014. Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 12 No.1

Rahman dan Zakaria. 2015. Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Razmi, M dan Refaei, R. 2013. The Effect of Trade Openness and Economic Freedom on Economic Growth: The Case of Middle East and East Asian Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol.3 No.2

Saha, *et al.* 2009. The interaction effect of economic freedom and democracy on corruption: A panel crosscountry analysis. *Economics Letters*. Vol.105 No.2

Sandra, Alex. 2017. Pengaruh Trade Openness Dan Financial Openness Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1986-2015. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setiawan, Azhari. 2016. ASEAN 'Political-Security' Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara. *Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Pusat Studi Masyarakat ASEAN, Universitas Riau*. Vol.2 No.1

Simorangkir, Iskandar. 2006. The Openness and Its Impact to Indonesian Economy: A SVAR. *Center of Central Banking Education and Studies*. Vol.14. No.2

Tach, *et al.* 2017. Effects of Corruption on Economic Growth: Empirical Study of Asia Countries. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*. Vol.3 No.7

Toke, Aidt *et al.* 2008. Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence. *Journal Comparative Economics*. Vol.36 No.2

Waluyo, Joko. 2010. Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. *Buletin Ekonomi*. Vol.8 No.2

Wulandari, Dwi. 2014. Kebebasan Ekonomi di Indonesia. *JESP*. Vol.6 No.2

Yanikkaya, Halit. 2003. Trade Openness and Economic Growth: A Cross Country” Empirical Investigation. *Journal of Development Economics*. Vol.25 No.3

Yusoff, M dan Febriana, I. 2014. Trade Openness, Exchange Rate, Gross Domestic Investment, and Growth in Indonesian. *The Asian Conferene on the Social Science*. Vol. 8 No.1

Undang-Undang

Undang-undang No. 31.1999. “UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001”, diakses pada 20 Oktober 2019 dari https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_31_1999.pdf

Website

Anonymous, t.t. “James Riady: Indonesia Pemimpin Ekonomi ASEAN” diakses pada 29 November 2019 <https://www.beritasatu.com/dunia/394919/james-riady-indonesia-pemimpin-ekonomi-asean>

Katadata. “Ekonomi Indonesia Terbesar di Kawasan ASEAN” diakses pada 29 November 2019 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/ekonomi-indonesia-terbesar-di-kawasan-asean>

Heritage Foundation. 2017. “Government Integrity”, diakses pada 29 November 2019 dari <https://www.heritage.org/index/freedom-from-corruption>

Sirusa. 2019. “Derajat Keterbukaan”, diakses pada 5 November 2019 dari <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/832>

World Bank. 2018. "Data GDP (current US\$)", diakses pada 28 Oktober 2019 dari <https://data.worldbank.org/in>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

NO	NEGARA	TAHUN	CPI (0-100 Interval dalam Indeks)	TRADE (%)	FINOP (%)	EF (0-100 Interval dalam Indeks)	GROWTH (%)
1	INDONESIA	2009	28	45,51	0,90	53,40	4,63
	INDONESIA	2010	28	46,70	2,03	55,50	6,22
	INDONESIA	2011	30	50,18	2,30	56,00	6,17
	INDONESIA	2012	32	49,58	2,31	56,40	6,03
	INDONESIA	2013	32	48,64	2,55	56,90	5,56
	INDONESIA	2014	34	48,08	2,82	58,50	5,01
	INDONESIA	2015	36	41,94	2,30	58,10	4,88
	INDONESIA	2016	37	37,42	0,49	59,40	5,03
	INDONESIA	2017	37	39,36	2,02	61,90	5,07
	INDONESIA	2018	38	43,02	1,89	64,20	5,17
2	MALAYSIA	2009	45	162,56	0,06	64,60	-1,51
	MALAYSIA	2010	44	157,94	4,27	64,80	7,42
	MALAYSIA	2011	43	154,94	5,07	66,30	5,29
	MALAYSIA	2012	49	147,84	2,83	66,40	5,47
	MALAYSIA	2013	50	142,72	3,49	66,10	4,69
	MALAYSIA	2014	52	138,31	3,14	69,60	6,01
	MALAYSIA	2015	50	131,37	3,27	70,80	5,09
	MALAYSIA	2016	49	126,90	4,47	71,50	4,45
	MALAYSIA	2017	47	133,22	2,94	73,80	5,74
	MALAYSIA	2018	47	130,50	2,39	74,50	4,74
3	THAILAND	2009	34	119,27	2,28	63,00	-0,69
	THAILAND	2010	35	127,25	4,32	64,10	7,51
	THAILAND	2011	34	139,68	0,67	64,70	0,84
	THAILAND	2012	37	138,48	3,24	64,90	7,24
	THAILAND	2013	35	133,41	3,79	64,10	2,69
	THAILAND	2014	38	131,79	1,22	63,30	0,98
	THAILAND	2015	38	125,92	2,22	62,40	3,13
	THAILAND	2016	35	122,03	0,68	63,90	3,36
	THAILAND	2017	37	122,52	1,77	66,20	4,02
	THAILAND	2018	36	123,31	2,65	67,10	4,13
4	FILIPINA	2009	24	65,59	1,23	56,80	1,15
	FILIPINA	2010	24	71,42	0,54	56,30	7,63
	FILIPINA	2011	26	67,70	0,90	56,20	3,66



	FILIPINA	2012	34	64,90	1,29	57,10	6,68
	FILIPINA	2013	36	60,25	1,37	58,20	7,06
	FILIPINA	2014	38	61,47	2,02	60,10	6,15
	FILIPINA	2015	35	62,69	1,93	62,20	6,07
	FILIPINA	2016	35	65,50	2,72	63,10	6,88
	FILIPINA	2017	34	71,90	3,27	65,60	6,68
	FILIPINA	2018	36	76,06	2,97	65,00	6,24
5	VIETNAM	2009	27	134,71	7,17	51,00	5,40
	VIETNAM	2010	27	152,22	6,90	49,80	6,42
	VIETNAM	2011	29	162,91	5,48	51,60	6,24
	VIETNAM	2012	31	156,55	5,37	51,30	5,25
	VIETNAM	2013	31	165,09	5,20	51,00	5,42
	VIETNAM	2014	31	169,53	4,94	50,80	5,98
	VIETNAM	2015	31	178,77	6,11	51,70	6,68
	VIETNAM	2016	33	184,69	6,14	54,00	6,21
	VIETNAM	2017	35	200,38	6,30	83,10	6,81
	VIETNAM	2018	33	208,31	6,32	53,10	7,08
6	KAMBOJA	2009	20	105,14	8,93	56,60	0,09
	KAMBOJA	2010	21	113,60	12,49	56,60	5,96
	KAMBOJA	2011	21	113,58	11,99	57,90	7,07
	KAMBOJA	2012	22	120,60	14,26	57,60	7,31
	KAMBOJA	2013	20	130,05	13,58	58,50	7,36
	KAMBOJA	2014	21	129,61	11,10	57,40	7,14
	KAMBOJA	2015	21	127,86	10,10	57,50	7,04
	KAMBOJA	2016	21	126,95	12,37	57,90	7,03
	KAMBOJA	2017	21	124,79	12,57	59,50	7,02
	KAMBOJA	2018	20	124,90	12,63	58,70	7,52

Lampiran 2 Hasil Deteksi Nilai Outlier

COUNTRY	YEARS	GROWTH	CPI	TRADE	FINOP	EF	resid	zresid
INDONESIA	2009	4,63	28	45,51	0,90	53,40	-0,071	-0,039
INDONESIA	2010	6,22	28	46,70	2,03	55,50	1,233	0,673
INDONESIA	2011	6,17	30	50,18	2,30	56,00	0,956	0,522
INDONESIA	2012	6,03	32	49,58	2,31	56,40	0,638	0,349
INDONESIA	2013	5,56	32	48,64	2,55	56,90	0,090	0,049
INDONESIA	2014	5,01	34	48,08	2,82	58,50	-0,664	-0,363
INDONESIA	2015	4,88	36	41,94	2,30	58,10	-0,890	-0,486
INDONESIA	2016	5,03	37	37,42	0,49	59,40	-0,098	-0,053
INDONESIA	2017	5,07	37	39,36	2,02	61,90	-0,480	-0,262
INDONESIA	2018	5,17	38	43,02	1,89	64,20	-0,227	-0,124
MALAYSIA	2009	-1,51	45	162,56	0,06	64,60	-5,249	-2,866

MALAYSIA	2010	7,42	44	157,94	4,27	64,80	2,087	1,139
MALAYSIA	2011	5,29	43	154,94	5,07	66,30	-0,209	-0,114
MALAYSIA	2012	5,47	49	147,84	2,83	66,40	0,185	0,101
MALAYSIA	2013	4,69	50	142,72	3,49	66,10	-1,039	-0,567
MALAYSIA	2014	6,01	52	138,31	3,14	69,60	0,383	0,209
MALAYSIA	2015	5,09	50	131,37	3,27	70,80	-0,407	-0,222
MALAYSIA	2016	4,45	49	126,90	4,47	71,50	-1,438	-0,785
MALAYSIA	2017	5,74	47	133,22	2,94	73,80	0,877	0,479
MALAYSIA	2018	4,74	47	130,50	2,39	74,50	0,100	0,054
THAILAND	2009	-0,69	34	119,27	2,28	63,00	-4,915	-2,683
THAILAND	2010	7,51	35	127,25	4,32	64,10	2,567	1,402
THAILAND	2011	0,84	34	139,68	0,67	64,70	-2,374	-1,296
THAILAND	2012	7,24	37	138,48	3,24	64,90	2,727	1,489
THAILAND	2013	2,69	35	133,41	3,79	64,10	-1,969	-1,075
THAILAND	2014	0,98	38	131,79	1,22	63,30	-3,026	-1,652
THAILAND	2015	3,13	38	125,92	2,22	62,40	-1,404	-0,767
THAILAND	2016	3,36	35	122,03	0,68	63,90	-0,245	-0,134
THAILAND	2017	4,02	37	122,52	1,77	66,20	-0,043	-0,024
THAILAND	2018	4,13	36	123,31	2,65	67,10	-0,122	-0,066
FILIPINA	2009	1,15	24	65,59	1,23	56,80	-2,810	-1,534
FILIPINA	2010	7,63	24	71,42	0,54	56,30	3,990	2,179
FILIPINA	2011	3,66	26	67,70	0,90	56,20	-0,371	-0,203
FILIPINA	2012	6,68	34	64,90	1,29	57,10	1,749	0,955
FILIPINA	2013	7,06	36	60,25	1,37	58,20	1,910	1,043
FILIPINA	2014	6,15	38	61,47	2,02	60,10	0,684	0,373
FILIPINA	2015	6,07	35	62,69	1,93	62,20	1,079	0,589
FILIPINA	2016	6,88	35	65,50	2,72	63,10	1,681	0,918
FILIPINA	2017	6,68	34	71,90	3,27	65,60	1,597	0,872
FILIPINA	2018	6,24	36	76,06	2,97	65,00	1,106	0,604
VIETNAM	2009	5,40	27	134,71	7,17	51,00	-0,624	-0,341
VIETNAM	2010	6,42	27	152,22	6,90	49,80	0,664	0,362
VIETNAM	2011	6,24	29	162,91	5,48	51,60	1,101	0,601
VIETNAM	2012	5,25	31	156,55	5,37	51,30	-0,145	-0,079
VIETNAM	2013	5,42	31	165,09	5,20	51,00	0,192	0,105
VIETNAM	2014	5,98	31	169,53	4,94	50,80	0,901	0,492
VIETNAM	2015	6,68	31	178,77	6,11	51,70	1,320	0,721
VIETNAM	2016	6,21	33	184,69	6,14	54,00	0,871	0,476
VIETNAM	2017	6,81	35	200,38	6,30	83,10	3,269	1,785
VIETNAM	2018	7,08	33	208,31	6,32	53,10	1,922	1,050
KAMBOJA	2009	0,09	20	105,14	8,93	56,60	-5,989	-3,270
KAMBOJA	2010	5,96	21	113,60	12,49	56,60	-1,493	-0,815

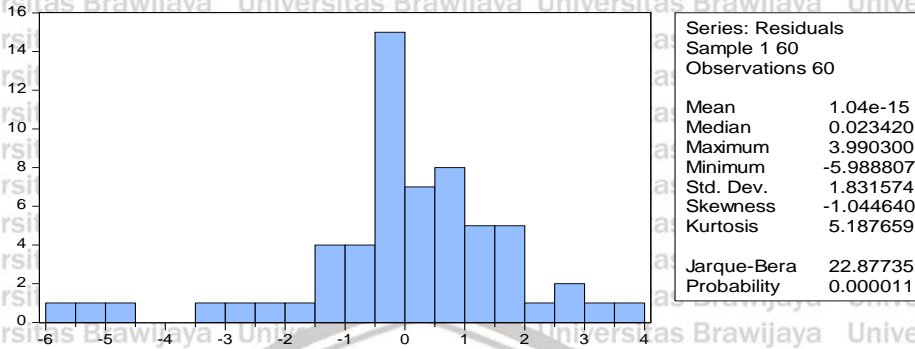
KAMBOJA	2011	7,07	21	113,58	11,99	57,90	-0,110	-0,060
KAMBOJA	2012	7,31	22	120,60	14,26	57,60	-0,775	-0,423
KAMBOJA	2013	7,36	20	130,05	13,58	58,50	-0,092	-0,050
KAMBOJA	2014	7,14	21	129,61	11,10	57,40	0,497	0,271
KAMBOJA	2015	7,04	21	127,86	10,10	57,50	0,764	0,417
KAMBOJA	2016	7,03	21	126,95	12,37	57,90	-0,117	-0,064
KAMBOJA	2017	7,02	21	124,79	12,57	59,50	-0,140	-0,076
KAMBOJA	2018	7,52	20	124,90	12,63	58,70	0,391	0,214
						mean	0,000	
						stdev	1,832	

Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif

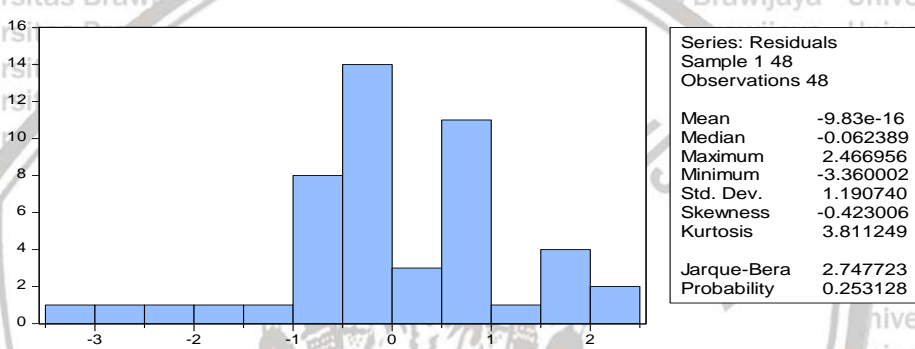
Date:	03/19/20				
Time:	21:56				
Sample:	1 60				
	CPI	TRADE	FINOP	EF	GROWTH
Mean	33.41667	112.6353	4.542566	60.64333	5.293697
Median	34.00000	125.4115	3.056283	59.05000	5.973367
Maximum	52.00000	208.3067	14.25776	83.10000	7.632265
Minimum	20.00000	37.42134	0.056692	49.80000	-1.513529
Std. Dev.	8.531679	45.26409	3.813881	6.608966	2.105936
Skewness	0.249644	-0.148647	1.198595	0.747602	-1.507686
Kurtosis	2.535887	2.050583	3.325939	3.917975	4.855116
Jarque-Bera	1.161726	2.474442	14.63189	7.695787	31.33480
Probability	0.559415	0.290190	0.000665	0.021325	0.000000
Sum	2005.000	6758.118	272.5540	3638.600	317.6218
Sum Sq. Dev.	4294.583	120881.5	858.1957	2577.027	261.6630
Observations	60	60	60	60	60

Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas Tidak Lulus



2. Normalitas Lolos Setelah Penyembuhan



3. Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 03/04/20 Time: 10:13
 Sample: 1 48
 Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
CPI	0.001628	62.96999	3.522498
TRADE	2.16E-05	10.07118	1.412205
FINOP	0.006256	6.913594	2.789596
EF	0.001289	152.1335	1.783454
C	3.192122	98.86835	NA

4. Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey			
F-statistic	1.527376	Prob. F(4,43)	0.2112
Obs*R-squared	5.971476	Prob. Chi-Square(4)	0.2013
Scaled explained SS	7.716328	Prob. Chi-Square(4)	0.1025

Test Equation:

Dependent Variable: LRESID2
 Method: Least Squares
 Date: 03/04/20 Time: 10:12
 Sample: 1 48
 Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.426817	3.582987	-0.398220	0.6924
CPI	-0.095521	0.080922	-1.180406	0.2443
TRADE	0.015790	0.009328	1.692666	0.0978
FINOP	-0.350242	0.158613	-2.208159	0.0326
EF	0.053678	0.071988	0.745652	0.4599
R-squared	0.124406	Mean dependent var	-1.232803	
Adjusted R-squared	0.042955	S.D. dependent var	2.551944	
S.E. of regression	2.496532	Akaike info criterion	4.766015	
Sum squared resid	268.0050	Schwarz criterion	4.960932	
Log likelihood	-109.3844	Hannan-Quinn criter.	4.839674	
F-statistic	1.527376	Durbin-Watson stat	1.728950	
Prob(F-statistic)	0.211221			

5. Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.758586	Prob. F(2,41)	0.1850
Obs*R-squared	3.792339	Prob. Chi-Square(2)	0.1501

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID
 Method: Least Squares
 Date: 03/04/20 Time: 10:13
 Sample: 1 48
 Included observations: 48
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI	-0.005653	0.039795	-0.142042	0.8877
TRADE	0.000533	0.004595	0.115960	0.9083
FINOP	-0.017492	0.078921	-0.221633	0.8257
EF	0.010254	0.035732	0.286973	0.7756
C	-0.416083	1.770399	-0.235022	0.8154
RESID(-1)	0.255373	0.156701	1.629679	0.1108
RESID(-2)	0.080211	0.159413	0.503166	0.6175
R-squared	0.079007	Mean dependent var	-9.83E-16	
Adjusted R-squared	-0.055772	S.D. dependent var	1.190740	
S.E. of regression	1.223495	Akaike info criterion	3.375338	
Sum squared resid	61.37454	Schwarz criterion	3.648221	
Log likelihood	-74.00811	Hannan-Quinn criter.	3.478461	
F-statistic	0.586195	Durbin-Watson stat	2.029238	
Prob(F-statistic)	0.739262			

Lampiran 5 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	6.819972	(5,38)	0.0001	
Cross-section Chi-square	30.742364	5	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: GROWTH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/04/20 Time: 10:38				
Sample: 2011 2018				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI	0.056622	0.040352	1.403213	0.1677
TRADE	-0.009838	0.004652	-2.115062	0.0403
FINOP	0.344260	0.079092	4.352654	0.0001
EF	-0.045606	0.035897	-1.270469	0.2107
C	5.955673	1.786651	3.333428	0.0018
R-squared	0.413159	Mean dependent var	5.570488	
Adjusted R-squared	0.358569	S.D. dependent var	1.554378	
S.E. of regression	1.244892	Akaike info criterion	3.374307	
Sum squared resid	66.63953	Schwarz criterion	3.569224	
Log likelihood	-75.98338	Hannan-Quinn criter.	3.447967	
F-statistic	7.568416	Durbin-Watson stat	1.413312	
Prob(F-statistic)	0.000104			

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	3.260604	4	0.5152	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.

CPI	0.099386	0.066485	0.001653	0.4184
TRADE	0.012002	-0.003774	0.000176	0.2342
FINOP	0.356102	0.373059	0.012019	0.8771
EF	-0.003634	0.002230	0.000094	0.5460

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GROWTH

Method: Panel Least Squares

Date: 03/04/20 Time: 10:39

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.625925	2.828260	-0.221311	0.8260
CPI	0.099386	0.067305	1.476642	0.1480
TRADE	0.012002	0.016664	0.720269	0.4758
FINOP	0.356102	0.164622	2.163154	0.0369
EF	-0.003634	0.032986	-0.110177	0.9128

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.690707	Mean dependent var	5.570488
Adjusted R-squared	0.617454	S.D. dependent var	1.554378
S.E. of regression	0.961388	Akaike info criterion	2.942175
Sum squared resid	35.12215	Schwarz criterion	3.332008
Log likelihood	-60.61219	Hannan-Quinn criter.	3.089493
F-statistic	9.428994	Durbin-Watson stat	2.396790
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	14.39845 (0.0001)	0.589506 (0.4426)	14.98796 (0.0001)
Honda	3.794529 (0.0001)	-0.767793 ..	2.140225 (0.0162)
King-Wu	3.794529 (0.0001)	-0.767793 ..	2.402511 (0.0081)
Standardized Honda	8.207628	-0.613446	0.251364

	(0.0000)	--	(0.4008)
Standardized King-Wu	-8.207628 (0.0000)	-0.613446 --	0.721150 (0.2354)
Gourieriou, et al.*	--	--	14.39845 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Lampiran 6 Hasil Analisis Data Panel

1. CEM

Dependent Variable: GROWTH?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 03/04/20 Time: 10:44				
Sample: 2011 2018				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI?	0.056622	0.040352	1.403213	0.1677
TRADE?	-0.009838	0.004652	-2.115062	0.0403
FINOP?	0.344260	0.079092	4.352654	0.0001
EF?	-0.045606	0.035897	-1.270469	0.2107
C	5.955673	1.786651	3.333428	0.0018
R-squared	0.413159	Mean dependent var		5.570488
Adjusted R-squared	0.358569	S.D. dependent var		1.554378
S.E. of regression	1.244892	Akaike info criterion		3.374307
Sum squared resid	66.63953	Schwarz criterion		3.569224
Log likelihood	-75.98338	Hannan-Quinn criter.		3.447967
F-statistic	7.568416	Durbin-Watson stat		1.413312
Prob(F-statistic)	0.000104			

2. FEM

Dependent Variable: GROWTH?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 03/04/20 Time: 10:45				
Sample: 2011 2018				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI?	0.099386	0.067305	1.476642	0.1480
TRADE?	0.012002	0.016664	0.720269	0.4758
FINOP?	0.356102	0.164622	2.163154	0.0369
EF?	-0.003634	0.032986	-0.110177	0.9128
C	-0.625925	2.828260	-0.221311	0.8260
Fixed Effects (Cross)				
_INDONESIA--C	1.495351			
_MALAYSIA--C	-1.629324			
_THAILAND--C	-1.721735			
_FILIPINA--C	2.093163			
_VIETNAM--C	-0.298796			
_KAMBOJA--C	0.061341			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.690707	Mean dependent var	5.570488	
Adjusted R-squared	0.617454	S.D. dependent var	1.554378	
S.E. of regression	0.961388	Akaike info criterion	2.942175	
Sum squared resid	35.12215	Schwarz criterion	3.332008	
Log likelihood	-60.61219	Hannan-Quinn criter.	3.089493	
F-statistic	9.428994	Durbin-Watson stat	2.396790	
Prob(F-statistic)	0.000000			

3. REM

Dependent Variable: GROWTH?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 03/04/20 Time: 10:46				
Sample: 2011 2018				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 48				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI?	0.066485	0.053640	1.239480	0.2219
TRADE?	-0.003774	0.010090	-0.374051	0.7102
FINOP?	0.373059	0.122805	3.037809	0.0040
EF?	0.002230	0.031523	0.070741	0.9439

C	1.858822	2.278987	0.815635	0.4192
Random Effects (Cross)				
_INDONESIA--C	0.438522			
_MALAYSIA--C	-0.753901			
_THAILAND--C	-1.285856			
_FILIPINA--C	1.292788			
_VIETNAM--C	0.604095			
_KAMBOJA--C	-0.295648			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.245126	0.6265
Idiosyncratic random			0.961388	0.3735
Weighted Statistics				
R-squared	0.195449	Mean dependent var		1.466987
Adjusted R-squared	0.120607	S.D. dependent var		1.016345
S.E. of regression	0.953087	Sum squared resid		39.06009
F-statistic	2.611493	Durbin-Watson stat		2.233455
Prob(F-statistic)	0.048482			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.312524	Mean dependent var		5.570488
Sum squared resid	78.06724	Durbin-Watson stat		1.117485

Lampiran 7 Data Corruption Perception Index

a. 2009

RANK	COUNTRY/TERRITORY	CPI 2009 SCORE	25	Chile	6.7	49	Jordan	5.0
1	New Zealand	9.4	25	Uruguay	6.7	49	Poland	5.0
2	Denmark	9.3	27	Cyprus	6.6	52	Czech Republic	4.9
3	Singapore	9.2	27	Estonia	6.6	52	Lithuania	4.9
3	Sweden	9.2	27	Slovenia	6.6	54	Seychelles	4.8
5	Switzerland	9.0	30	United Arab Emirates	6.5	55	South Africa	4.7
6	Finland	8.9	31	Saint Vincent and the Grenadines	6.4	56	Latvia	4.5
6	Netherlands	8.9	32	Israel	6.1	56	Malaysia	4.5
8	Australia	8.7	32	Spain	6.1	56	Namibia	4.5
8	Canada	8.7	34	Dominica	5.9	56	Samoa	4.5
8	Iceland	8.7	35	Portugal	5.8	56	Slovakia	4.5
11	Norway	8.6	35	Puerto Rico	5.8	61	Cuba	4.4
12	Hong Kong	8.2	37	Botswana	5.6	61	Turkey	4.4
12	Luxembourg	8.2	37	Taiwan	5.6	63	Italy	4.3
14	Germany	8.0	39	Brunei Darussalam	5.5	63	Saudi Arabia	4.3
14	Ireland	8.0	39	Oman	5.5	65	Tunisia	4.2
16	Austria	7.9	39	Korea (South)	5.5	66	Croatia	4.1
17	Japan	7.7	42	Mauritius	5.4	66	Georgia	4.1
17	United Kingdom	7.7	43	Costa Rica	5.3	66	Kuwait	4.1
19	United States	7.5	43	Macau	5.3	69	Ghana	3.9
20	Barbados	7.4	45	Malta	5.2	69	Montenegro	3.9
21	Belgium	7.1	46	Bahrain	5.1	71	Bulgaria	3.8
22	Qatar	7.0	46	Cape Verde	5.1	71	FYR Macedonia	3.8
22	Saint Lucia	7.0	46	Hungary	5.1	71	Greece	3.8
24	France	6.9	49	Bhutan	5.0	71	Romania	3.8

76	Brazil	3.7	99	Dominican Republic	3.0	120	Vietnam	2.7
76	Colombia	3.7	99	Jamaica	3.0	126	Eritrea	2.6
76	Peru	3.7	99	Madagascar	3.0	126	Guyana	2.6
76	Suriname	3.7	99	Senegal	3.0	126	Syria	2.6
79	Burkina Faso	3.6	99	Tonga	3.0	126	Tanzania	2.6
79	China	3.6	99	Zambia	3.0	130	Honduras	2.5
79	Swaziland	3.6	106	Argentina	2.9	130	Lebanon	2.5
79	Trinidad and Tobago	3.6	106	Benin	2.9	130	Libya	2.5
83	Serbia	3.5	106	Gabon	2.9	130	Maldives	2.5
84	El Salvador	3.4	106	Gambia	2.9	130	Mauritania	2.5
84	Guatemala	3.4	106	Niger	2.9	130	Mozambique	2.5
84	India	3.4	111	Algeria	2.8	130	Nicaragua	2.5
84	Panama	3.4	111	Djibouti	2.8	130	Nigeria	2.5
84	Thailand	3.4	111	Egypt	2.8	130	Uganda	2.5
89	Lesotho	3.3	111	Indonesia	2.8	139	Bangladesh	2.4
89	Malawi	3.3	111	Kiribati	2.8	139	Belarus	2.4
89	Mexico	3.3	111	Mali	2.8	139	Pakistan	2.4
89	Moldova	3.3	111	Sao Tome and Principe	2.8	139	Philippines	2.4
89	Morocco	3.3	111	Solomon Islands	2.8	143	Azerbaijan	2.3
89	Rwanda	3.3	111	Togo	2.8	143	Comoros	2.3
95	Albania	3.2	120	Armenia	2.7	143	Nepal	2.3
95	Vanuatu	3.2	120	Bolivia	2.7	146	Cameroon	2.2
97	Liberia	3.1	120	Ethiopia	2.7	146	Ecuador	2.2
97	Sri Lanka	3.1	120	Kazakhstan	2.7	146	Kenya	2.2
99	Bosnia and Herzegovina	3.0	120	Mongolia	2.7	146	Russia	2.2

146	Sierra Leone	2.2	168	Iran	1.8
146	Timor-Leste	2.2	168	Turkmenistan	1.8
146	Ukraine	2.2	174	Uzbekistan	1.7
146	Zimbabwe	2.2	175	Chad	1.6
154	Côte d'Ivoire	2.1	176	Iraq	1.5
154	Papua New Guinea	2.1	176	Sudan	1.5
154	Paraguay	2.1	178	Myanmar	1.4
154	Yemen	2.1	179	Afghanistan	1.3
158	Cambodia	2.0	180	Somalia	1.1
158	Central African Republic	2.0			
158	Laos	2.0			
158	Tajikistan	2.0			
162	Angola	1.9			
162	Congo Brazzaville	1.9			
162	Democratic Republic of Congo	1.9			
162	Guinea-Bissau	1.9			
162	Kyrgyzstan	1.9			
162	Venezuela	1.9			
168	Burundi	1.8			
168	Equatorial Guinea	1.8			
168	Guinea	1.8			
168	Haiti	1.8			

b. 2010

CRITICAL TO RESTORING TRUST AND TURNING BACK THE TIDE OF CORRUPTION

With governments committing huge sums to tackle the world's most pressing problems, from the instability of financial markets to climate change and poverty, corruption remains an obstacle to achieving much needed progress.

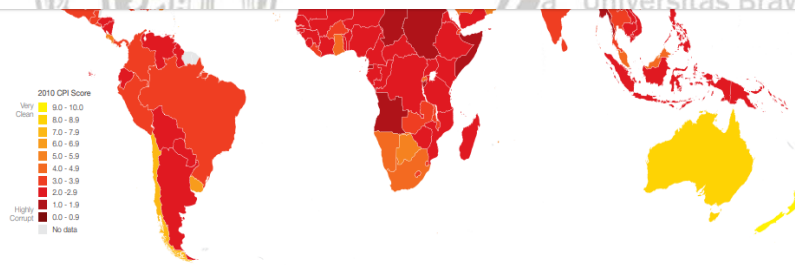
The 2010 Corruption Perceptions Index shows that nearly three quarters of the 178 countries in the index score below five, on a scale from 10 (very clean) to 0 (highly corrupt). These results indicate a serious corruption problem.

To address these challenges, governments need to integrate anti-corruption measures in all spheres, from their responses to the financial crisis and climate change to commitments by the international community to eradicate poverty. Transparency International advocates stricter implementation of the UN Convention against Corruption, the only global initiative that provides a framework for putting an end to corruption.

Denmark, New Zealand and Singapore are tied at the top of the list with a score of 9.3, followed closely by Finland and Sweden at 9.2. At the bottom is Somalia with a score of 1.1, slightly trailing Myanmar and Afghanistan at 1.4 and Iraq at 1.5.

Notable among decliners over the past year are some of the countries most affected by a financial crisis precipitated by transparency and integrity deficits. Among those improving in the past year, the general absence of OECD states underlines the fact that all nations need to bolster their good governance mechanisms.

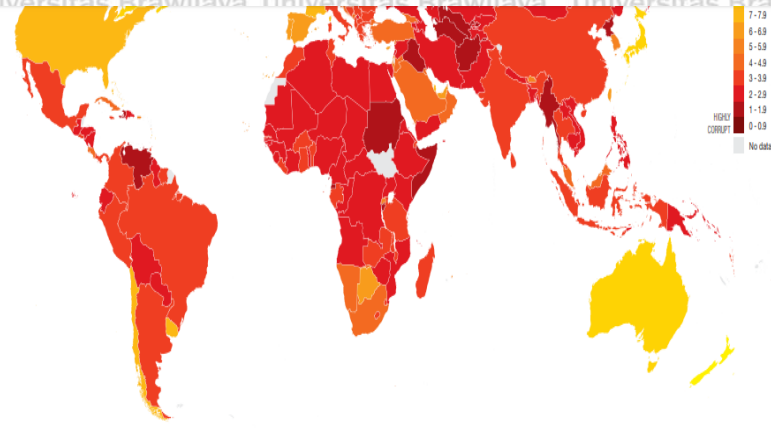
The message is clear: across the globe, transparency and accountability are critical to restoring trust and turning back the tide of corruption. Without them, global policy solutions to many global crises are at risk.



COUNTRY/ TERRITORY	SCORE	COUNTRY/ TERRITORY	SCORE	COUNTRY/ TERRITORY	SCORE
1	Denmark	9.3	30	Spain	6.1
2	New Zealand	9.3	32	Portugal	6.0
3	Singapore	9.3	33	Botswana	5.8
4	Finland	9.2	33	Puerto Rico	5.8
5	Sweden	9.2	33	Taiwan	5.8
6	Canada	8.9	36	Ethiopia	5.7
7	Netherlands	8.8	37	Malta	5.6
8	Australia	8.7	38	Bhunei	5.5
9	Switzerland	8.7	39	Korea (South)	5.4
10	Norway	8.6	39	Mauritius	5.4
11	Ireland	8.5	41	Costa Rica	5.3
11	Luxembourg	8.5	41	Oman	5.3
13	Hong Kong	8.4	41	Poland	5.3
14	Iceland	8.0	44	Dominica	5.2
15	Austria	7.9	45	Cape Verde	5.1
15	Germany	7.9	46	Lithuania	5.0
17	Barbados	7.8	48	Macao	5.0
17	Japan	7.8	48	Bahrain	4.9
19	Qatar	7.7	49	Seychelles	4.8
20	United Kingdom	7.6	50	Hungary	4.7
21	Chile	7.2	50	Jordan	4.7
22	Belgium	7.1	50	Saudi Arabia	4.7
24	Uruguay	6.9	54	Kuwait	4.5
25	France	6.8	54	South Africa	4.5
26	Estonia	6.5	56	Malaysia	4.4
26	Slovenia	6.4	56	Namibia	4.4
28	Cyprus	6.3	56	Turkey	4.4
28	United Arab Emirates	6.3	59	Latvia	4.3
30	Israel	6.1	59	Slovakia	4.3
39	Turkey	4.3	91	Bosnia and Herzegovina	3.2
42	Croatia	4.1	91	Djibouti	3.2
42	FYR Macedonia	4.1	91	Gambia	3.2
42	Ghana	4.1	91	Guatemala	3.2
42	Samoa	4.1	91	Eritrea	2.6
42	Guatemala	3.2	123	Madagascar	2.6
46	Rwanda	4.0	91	Kiribati	2.6
47	Italy	3.9	91	Sierra Leone	2.6
49	Montenegro	3.7	98	Mexico	3.2
49	Georgia	3.8	91	Swaziland	3.2
49	Brazil	3.7	99	Burkina Faso	3.1
49	Cuba	3.7	99	Egypt	3.1
49	Montenegro	3.7	99	Mexico	3.1
49	Romania	3.7	101	Dominican Republic	3.0
49	Bulgaria	3.6	101	Sao Tome & Principe	3.0
49	El Salvador	3.6	101	Tonga	3.0
49	Paraguay	3.6	101	Tanzania	3.0
49	Tanzania	3.6	101	Zambia	3.0
49	Trinidad and Tobago	3.6	106	Algeria	2.9
49	Vanuatu	3.6	106	Argentina	2.9
49	China	3.5	105	Kazakhstan	2.9
49	Colombia	3.5	106	Moldova	2.9
49	Greece	3.5	106	Senegal	2.9
49	China	3.5	110	Benin	2.8
49	Peru	3.5	110	Bolivia	2.8
49	Serbia	3.5	110	Gabon	2.8
49	Thailand	3.5	110	Indonesia	2.8
49	Malawi	3.4	110	Kosovo	2.8
49	Morocco	3.4	110	Solomon Islands	2.8
49	Albania	3.3	116	Ethiopia	2.7
49	India	3.3	116	Guyana	2.7
49	Jamaica	3.3	116	Mali	2.7
49	Libya	3.3	116	Mongolia	2.7
116	Mozambique	2.7	146	Iran	1.8
116	Tanzania	2.7	146	Nepal	2.2
116	Vietnam	2.7	146	Paraguay	2.2
123	Armenia	2.6	146	Yemen	2.2
123	Eritrea	2.6	146	Cambodia	2.1
123	Madagascar	2.6	154	Central African Republic	2.1
123	Niger	2.6	154	Congo-Brazzaville	2.1
123	Belarus	2.5	154	Guinea-Bissau	2.1
123	Belarus	2.5	154	Kenya	2.1
123	Ecuador	2.5	154	Laos	2.1
123	Lebanon	2.5	154	Papua New Guinea	2.1
123	Nicaragua	2.5	154	Russia	2.1
123	Syria	2.5	154	Tajikistan	2.1
123	Timor-Leste	2.5	154	Democratic Republic of Congo	2.0
123	Uganda	2.5	154	Guinea	2.0
123	Yemen	2.5	154	Kyrgyzstan	2.0
123	Yemen	2.5	154	Guinea	2.0
123	Yemen	2.5	154	Venezuela	2.0
123	Yemen	2.5	154	Angola	1.9
123	Yemen	2.5	154	Equatorial Guinea	1.9
123	Yemen	2.5	154	Burundi	1.8
123	Yemen	2.5	154	Chad	1.7
123	Yemen	2.5	154	Sudan	1.6
123	Yemen	2.5	154	Turkmenistan	1.6
123	Yemen	2.5	154	Uzbekistan	1.6
123	Yemen	2.5	154	Iraq	1.5
123	Yemen	2.5	154	Afghanistan	1.4
123	Yemen	2.5	154	Myanmar	1.4
123	Yemen	2.5	154	Somalia	1.1

c. 2011

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2011
 THE PERCEIVED LEVELS OF PUBLIC-SECTOR CORRUPTION IN 183 COUNTRIES/TERRITORIES AROUND THE WORLD



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	New Zealand	9.5	29	France	7.0	101	Senegal	3.0	181	Angola	2.0
2	Denmark	9.4	30	Saint Lucia	7.0	102	Brunei	3.0	182	Chad	2.0
3	Finland	9.4	31	Uruguay	7.0	103	Costa Rica	4.8	183	Tunisia	3.8
4	Sweden	9.3	32	United Arab Emirates	6.8	104	Lithuania	4.8	184	China	3.6
5	Singapore	9.2	33	Estonia	6.4	105	Oman	4.8	185	Romania	3.6
6	Norway	9.0	34	Cyprus	6.3	106	Seychelles	4.8	186	Gambia	3.5
7	Netherlands	8.9	35	Spain	6.2	107	Hungary	4.6	187	Leotho	3.5
8	Australia	8.8	36	Botswana	6.1	108	Kuwait	4.6	188	Vanuatu	3.5
9	Switzerland	8.8	37	Portugal	6.1	109	Jordan	4.5	189	Colombia	3.4
10	Canada	8.7	38	Taiwan	6.1	110	Czech Republic	4.4	190	El Salvador	3.4
11	Luxembourg	8.5	39	Slovenia	5.9	111	Namibia	4.4	191	Greece	3.4
12	Hong Kong	8.4	40	Israel	5.8	112	South Africa	4.4	192	Mexico	3.4
13	Lebanon	8.3	41	Saudi Arabia	5.8	113	Malaysia	4.3	193	Peru	3.4
14	Germany	8.0	42	Saint Vincent and the Grenadines	5.7	114	Cuba	4.2	194	Thailand	3.4
15	Japan	8.0	43	Ethiopia	5.7	115	Latvia	4.2	195	Bulgaria	3.3
16	Austria	7.8	44	Malta	5.6	116	Turkey	4.2	196	Jamaica	3.3
17	Barbados	7.8	45	Puerto Rico	5.6	117	Georgia	4.1	197	Panama	3.3
18	United Kingdom	7.8	46	Cape Verde	5.5	118	South Africa	4.1	198	Serbia	3.3
19	Belgium	7.5	47	Poland	5.5	119	Croatia	4.0	199	Si Lanka	3.3
20	Iceland	7.5	48	Korea (South)	5.4	120	Montenegro	4.0	200	Bhutan and Herzegovina	3.2
21	Bahamas	7.3	49	Brazil	5.2	121	Bosnia	4.0	201	Liberia	3.2
22	Chile	7.2	50	Dominica	5.2	122	Ghana	3.9	202	Trinidad and Tobago	3.2
23	Qatar	7.2	51	Bahrain	5.1	123	Italy	3.9	203	Zambia	3.2
24	United States	7.1	52	Macau	5.1	124	PYR Macedonia	3.9	204	Athens	3.1
25	India	6.8	53	Costa Rica	4.8	125	Senegal	3.0	205	Belize	3.0
26	Maldives	6.8	54	Uruguay	6.8	126	Ecuador	2.7	206	Comoros	2.4
27	Switzerland	6.8	55	Ethiopia	2.7	127	Montenegro	2.4	207	Nigeria	2.4
28	Togo	6.8	56	Guatemala	2.7	128	Russia	2.4	208	Libya	2.0
29	Argentina	6.0	57	Iran	2.7	129	Timor-Leste	2.4	209	Equatorial Guinea	1.9
30	Bahrain	6.0	58	Kazakhstan	2.7	130	Togo	2.4	210	Venezuela	1.9
31	Burkina Faso	6.0	59	Mongolia	2.7	131	Uganda	2.4	211	Haiti	1.8
32	Djibouti	6.0	60	Mozambique	2.7	132	Tajikistan	2.3	212	Iran	1.8
33	Gabon	6.0	61	Salomon Islands	2.7	133	Ukraine	2.3	213	Sudan	1.6
34	Indonesia	6.0	62	Armenia	2.6	134	Central African Republic	2.2	214	Turkmenistan	1.6
35	Madagascar	6.0	63	Dominican Republic	2.6	135	Congo Republic	2.2	215	Uzbekistan	1.6
36	Malawi	6.0	64	Honduras	2.6	136	Cote d'Ivoire	2.2	216	Liechtenstein	1.6
37	Mexico	6.0	65	Philippines	2.6	137	Guinea Bissau	2.2	217	Afghanistan	1.5
38	Sao Tome and Principe	6.0	66	Sri Lanka	2.6	138	Cameroon	2.5	218	Myanmar	1.5
39	Suriname	6.0	67	Eritrea	2.5	139	Laos	2.2	219	Korea (North)	1.0
40	Vanuatu	6.0	68	Guyana	2.5	140	Nepal	2.2	220	Somalia	1.0
41	Algeria	2.9	141	Latvian	2.5	141	Papua New Guinea	2.2			
42	Egypt	2.9	142	Kosovo	2.9	142	Madives	2.5	142	Paraguay	2.2
43	Moldova	2.9	143	Nicaragua	2.5	143	Zimbabwe	2.2			
44	Senegal	2.9	144	Niger	2.5	144	Camodia	2.1			
45	Vietnam	2.9	145	Pakistan	2.5	145	Guinea	2.1			
46	Belize	2.8	146	Saint Leone	2.5	146	Kyrgyzstan	2.1			
47	Haiti	2.8	147	Azerbaijan	2.4	147	Yemen	2.1			

d. 2012 – 2014

Asia Pacific

RANK	COUNTRY	2014 SCORE	2013 SCORE	2012 SCORE
2	New Zealand	91	91	90
7	Singapore	84	86	87
11	Australia	80	81	85
17	Hong Kong	74	75	77
15	Japan	76	74	74
31	Botswana	63	64	65
36	Taiwan	61	61	61
44	Korea (South)	55	55	56
51	Malaysia	52	50	49
80	Mongolia	39	38	36
85	India	38	36	36
85	Philippines	38	36	34
85	Sri Lanka	38	37	40
85	Thailand	38	35	37
100	China	36	40	39
107	Indonesia	34	32	32
119	Vietnam	31	31	31

126	Nepal	29	31	27
126	Pakistan	29	28	27
133	Timor-Leste	28	30	33
145	Bangladesh	25	27	26
145	Laos	25	26	21
145	Papua New Guinea	25	25	25
156	Cambodia	21	20	22
156	Myanmar	21	21	15
172	Afghanistan	12	8	8
174	Korea (North)	8	8	8

e. 2015 – 2018



HOME WHO WE ARE WHAT WE DO GET INVOLVED NEWS DONATE Search

#	COUNTRY	REGION	2018	2017	2016	2015
2	New Zealand	Asia Pacific	87	89	90	91
3	Singapore	Asia Pacific	85	84	84	85
13	Australia	Asia Pacific	77	77	79	79
14	Hong Kong	Asia Pacific	76	77	77	75
18	Japan	Asia Pacific	73	73	72	75
25	Bhutan	Asia Pacific	68	67	65	65
31	Brunei Darussalam	Asia Pacific	63	62	58	N/A
31	Taiwan	Asia Pacific	63	63	61	62
45	Korea, South	Asia Pacific	57	54	53	54
61	Malaysia	Asia Pacific	47	47	49	50
64	Vanuatu	Asia Pacific	46	43	N/A	N/A
70	Solomon Islands	Asia Pacific	44	39	42	N/A
78	India	Asia Pacific	41	40	40	38
87	China	Asia Pacific	39	41	40	37
89	Indonesia	Asia Pacific	38	37	37	36
89	Sri Lanka	Asia Pacific	38	38	36	37
93	Mongolia	Asia Pacific	37	36	38	39
99	Philippines	Asia Pacific	36	34	35	35
99	Thailand	Asia Pacific	36	37	35	38
105	Timor-Leste	Asia Pacific	35	38	35	28
117	Pakistan	Asia Pacific	33	32	32	30
117	Vietnam	Asia Pacific	33	35	33	31
124	Maldives	Asia Pacific	31	33	36	N/A
124	Nepal	Asia Pacific	31	31	29	27
132	Laos	Asia Pacific	29	29	30	25
132	Myanmar	Asia Pacific	29	30	28	22
138	Papua New Guinea	Asia Pacific	28	29	28	25
149	Bangladesh	Asia Pacific	26	28	26	25
161	Cambodia	Asia Pacific	20	21	21	21
172	Afghanistan	Asia Pacific	16	15	15	11
178	Korea, North	Asia Pacific	14	17	12	8



Lampiran 8 Data Trade Openness

Trade (% of GDP) ⓘ

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	45.5	46.7	50.2	49.6	48.6	48.1	
Cambodia	105.1	113.6	113.6	120.6	130.0	129.6	1
Philippines	65.6	71.4	67.7	64.9	60.2	61.5	
Malaysia	162.6	157.9	154.9	147.8	142.7	138.3	1
Thailand	119.3	127.3	139.7	138.5	133.4	131.8	1
Vietnam	134.7	152.2	162.9	156.6	165.1	169.5	1

Source: World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to be used for citation.

Trade (% of GDP) ⓘ

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cambodia	130.0	129.6	127.9	127.0	124.8	124.9
Philippines	60.2	61.5	62.7	65.5	71.9	76.1
Indonesia	48.6	48.1	41.9	37.4	39.4	43.0
Malaysia	142.7	138.3	131.4	126.9	133.2	130.5
Vietnam	165.1	169.5	178.8	184.7	200.4	208.3
Thailand	133.4	131.8	125.9	122.0	122.5	123.3

Source: World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to be used for citation.

Lampiran 9 Data Financial Openness

Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) ⓘ

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	0.9	2.0	2.3	2.3	2.6	2.8	
Cambodia	8.9	12.5	12.0	14.1	13.6	11.1	
Philippines	1.2	0.5	0.9	1.3	1.4	2.0	
Malaysia	0.1	4.3	5.1	2.8	3.5	3.1	
Thailand	2.3	4.3	0.7	3.2	3.8	1.2	
Vietnam	7.2	6.9	5.5	5.4	5.2	4.9	

Source: World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to be used for citation.

Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) ⓘ

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indonesia	2.6	2.8	2.3	0.5	2.0	1.9
Cambodia	13.6	11.1	10.1	12.3	12.6	13.1
Philippines	1.4	2.0	1.9	2.7	3.3	3.0
Malaysia	3.5	3.1	3.3	4.5	2.9	2.4
Thailand	3.8	1.2	2.2	0.7	1.8	2.7
Vietnam	5.2	4.9	6.1	6.1	6.3	6.3

Source: World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to be used for citation.

Lampiran 10 Data Index of Economic Freedom

a. 2009

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2008
1	Hong Kong	90.0	0.3
2	Singapore	87.1	-0.2
3	Australia	82.6	0.4
4	Ireland	82.2	-0.3
5	New Zealand	82.0	1.2
6	United States	80.7	-0.3
7	Canada	80.5	0.3
8	Denmark	79.6	0.4
9	Switzerland	79.4	-0.1
10	United Kingdom	79.0	-0.5
11	Chile	78.3	-0.3
12	Netherlands	77.0	-0.4
13	Estonia	76.4	-1.5
14	Iceland	75.9	0.1
15	Luxembourg	75.2	0.5
16	Bahrain	74.8	2.6
17	Finland	74.5	-0.1
18	Mauritius	74.3	1.7
19	Japan	72.8	-0.2
20	Belgium	72.1	0.5
21	Macau	72.0	n/a
22	Barbados	71.5	0.2
23	Austria	71.2	-0.2
24	Cyprus	70.8	-0.5
25	Germany	70.5	-0.1
26	Sweden	70.5	-0.4
27	The Bahamas	70.3	-0.8
28	Norway	70.2	1.6
29	Spain	70.1	1.0

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2008
30	Lithuania	70.0	-1.0
31	Armenia	69.9	0.0
32	Georgia	69.8	0.5
33	El Salvador	69.8	1.3
34	Botswana	69.7	1.5
35	Taiwan	69.5	-0.7
36	Slovak Republic	69.4	-0.6
37	Czech Republic	69.4	1.2
38	Uruguay	69.1	1.2
39	Saint Lucia	68.8	n/a
40	South Korea	68.1	-0.5
41	Trinidad and Tobago	68.0	-1.6
42	Israel	67.6	1.3
43	Oman	67.0	-0.3
44	Hungary	66.8	-0.8
45	Latvia	66.6	-1.7
46	Costa Rica	66.4	2.2
47	Malta	66.1	0.1
48	Qatar	65.8	3.6
49	Mexico	65.8	-0.3
50	Kuwait	65.6	-2.5
51	Jordan	65.4	1.3
52	Jamaica	65.2	-0.5
53	Portugal	64.9	1.0
54	United Arab Emirates	64.7	2.2
55	Panama	64.7	0.0
56	Bulgaria	64.6	0.9
57	Peru	64.6	0.9
58	Malaysia	64.6	0.7
59	Saudi Arabia	64.3	1.8
60	Saint Vincent and the Grenadines	64.3	n/a
61	South Africa	63.8	0.4
62	Albania	63.7	1.3
63	Uganda	63.5	-0.3
64	France	63.3	-1.4
65	Romania	63.2	1.5
66	Belize	63.0	0.0
67	Thailand	63.0	0.7
68	Slovenia	62.9	2.7
69	Mongolia	62.8	-0.8

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2008
70	Dominica	62.6	n/a
71	Namibia	62.4	1.0
72	Colombia	62.3	0.2
73	Madagascar	62.2	-0.2
74	Kyrgyz Republic	61.8	0.7
75	Turkey	61.6	1.6
76	Italy	61.4	-1.2
77	Cape Verde	61.3	3.4
78	Macedonia	61.2	0.2
79	Paraguay	61.0	1.0
80	Fiji	61.0	-0.8
81	Greece	60.8	0.2
82	Poland	60.3	0.0
83	Kazakhstan	60.1	-1.0
84	Nicaragua	59.8	-1.0
85	Burkina Faso	59.5	3.8
86	Samoa	59.5	n/a
87	Guatemala	59.4	-0.4
88	Dominican Republic	59.2	1.5
89	Swaziland	59.1	0.6
90	Kenya	58.7	-0.6
91	Honduras	58.7	-0.2
92	Vanuatu	58.4	n/a
93	Tanzania	58.3	1.8
94	Montenegro	58.2	n/a
95	Lebanon	58.1	-1.9
96	Ghana	58.1	1.0
97	Egypt	58.0	-0.5
98	Tunisia	58.0	-2.1
99	Azerbaijan	58.0	2.6
100	Bhutan	57.7	n/a
101	Morocco	57.7	2.1
102	Pakistan	57.0	1.4
103	Yemen	56.9	3.1
104	The Philippines	56.8	0.8
105	Brazil	56.7	0.5
106	Cambodia	56.6	0.8
107	Algeria	56.6	0.4
108	Zambia	56.6	0.4
109	Serbia	56.6	n/a
110	Senegal	56.3	-2.0

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2008
111	Sri Lanka	56.0	-2.4
112	The Gambia	55.8	-1.1
113	Mozambique	55.7	0.2
114	Mali	55.6	0.1
115	Benin	55.4	0.1
116	Croatia	55.1	1.0
117	Nigeria	55.1	0.0
118	Gabon	55.0	0.9
119	Côte d'Ivoire	55.0	1.0
120	Moldova	54.9	-3.0
121	Papua New Guinea	54.8	n/a
122	Tajikistan	54.6	0.2
123	India	54.4	0.3
124	Rwanda	54.2	0.0
125	Suriname	54.1	-0.2
126	Tonga	54.1	n/a
127	Mauritania	53.9	-1.2
128	Niger	53.8	1.0
129	Malawi	53.7	1.1
130	Bolivia	53.6	0.5
131	Indonesia	53.4	0.2
132	China	53.2	0.1
133	Nepal	53.2	-0.9
134	Bosnia and Herzegovina	53.1	-0.8
135	Ethiopia	53.0	0.5
136	Cameroon	53.0	-1.3
137	Ecuador	52.5	-2.8
138	Argentina	52.3	-1.8
139	Micronesia	51.7	n/a
140	Djibouti	51.3	0.1
141	Syria	51.3	4.2
142	Equatorial Guinea	51.3	-0.3
143	Maldives	51.3	n/a
144	Guinea	51.0	-1.8
145	Vietnam	51.0	0.6
146	Russia	50.8	1.0
147	Haiti	50.5	1.5
148	Uzbekistan	50.5	-1.4
149	Timor-Leste	50.5	n/a
150	Laos	50.4	0.1

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2008
151	Lesotho	49.7	-2.5
152	Ukraine	48.8	-2.2
153	Burundi	48.8	2.6
154	Togo	48.7	-0.2
155	Guyana	48.4	-0.4
156	Central African Republic	48.3	-0.3
157	Liberia	48.1	n/a
158	Sierra Leone	47.8	-0.5
159	Seychelles	47.8	n/a
160	Bangladesh	47.5	3.3
161	Chad	47.5	-0.4
162	Angola	47.0	0.1
163	Solomon Islands	46.0	n/a
164	Kiribati	45.7	n/a
165	Guinea-Bissau	45.4	1.1
166	Republic of Congo	45.4	0.0
167	Belarus	45.0	-0.4
168	Iran	44.6	-0.4
169	Turkmenistan	44.2	0.8
170	São Tomé and Príncipe	43.8	n/a
171	Libya	43.5	4.8
172	Comoros	43.3	n/a
173	Democratic Republic of Congo	42.8	n/a
174	Venezuela	39.9	-4.8
175	Eritrea	38.5	n/a
176	Burma	37.7	-1.8
177	Cuba	27.9	0.4
178	Zimbabwe	22.7	-6.7
179	North Korea	2.0	-1.0
n/a	Afghanistan	n/a	n/a
n/a	Iraq	n/a	n/a
n/a	Liechtenstein	n/a	n/a
n/a	Sudan	n/a	n/a



b. 2010

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2009
1	Hong Kong	89.7	-0.3
2	Singapore	86.1	-1.0
3	Australia	82.6	0.0
4	New Zealand	82.1	0.1
5	Ireland	81.3	-0.9
6	Switzerland	81.1	1.7
7	Canada	80.4	-0.1
8	United States	78.0	-2.7
9	Denmark	77.9	-1.7
10	Chile	77.2	-1.1
11	United Kingdom	76.5	-2.5
12	Mauritius	76.3	2.0
13	Bahrain	76.3	1.5
14	Luxembourg	75.4	0.2
15	The Netherlands	75.0	-2.0
16	Estonia	74.7	-1.7
17	Finland	73.8	-0.7
18	Iceland	73.7	-2.2
19	Japan	72.9	0.1
20	Macau	72.5	0.5
21	Sweden	72.4	1.9
22	Austria	71.6	0.4
23	Germany	71.1	0.6
24	Cyprus	70.9	0.1
25	Saint Lucia	70.5	1.7
26	Georgia	70.4	0.6
27	Taiwan	70.4	0.9
28	Botswana	70.3	0.6
29	Lithuania	70.3	0.3
30	Belgium	70.1	-2.0
31	South Korea	69.9	1.8
32	El Salvador	69.9	0.1
33	Uruguay	69.8	0.7
34	Czech Republic	69.8	0.4
35	Slovakia	69.7	0.3
36	Spain	69.6	-0.5
37	Norway	69.4	-0.8
38	Armenia	69.2	-0.7
39	Qatar	69.0	3.2
40	Barbados	68.3	-3.2

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2009
41	Mexico	68.3	2.5
42	Kuwait	67.7	2.1
43	Oman	67.7	0.7
44	Israel	67.7	0.1
45	Peru	67.6	3.0
46	United Arab Emirates	67.3	2.6
47	The Bahamas	67.3	-3.0
48	Malta	67.2	1.1
49	Saint Vincent and the Grenadines	66.9	2.6
50	Latvia	66.2	-0.4
51	Hungary	66.1	-0.6
52	Jordan	66.1	0.7
53	Albania	66.0	2.3
54	Costa Rica	65.9	-0.5
55	Trinidad and Tobago	65.7	-2.3
56	Macedonia	65.7	4.5
57	Jamaica	65.5	0.3
58	Colombia	65.5	3.2
59	Malaysia	64.8	0.2
60	Panama	64.8	0.1
61	Slovenia	64.7	1.8
62	Portugal	64.4	-0.5
63	Romania	64.2	1.0
64	France	64.2	0.9
65	Saudi Arabia	64.1	-0.2
66	Thailand	64.1	1.1
67	Turkey	63.8	2.2
68	Montenegro	63.6	5.4
69	Madagascar	63.2	1.1
70	Dominica	63.2	0.6
71	Poland	63.2	2.9
72	South Africa	62.8	-1.0
73	Greece	62.7	1.9
74	Italy	62.7	1.3
75	Bulgaria	62.3	-2.3
76	Uganda	62.2	-1.3
77	Namibia	62.2	-0.2
78	Cape Verde	61.8	0.5
79	Belize	61.5	-1.5
80	Kyrgyz Republic	61.3	-0.5

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2009
81	Paraguay	61.3	0.3
82	Kazakhstan	61.0	0.9
83	Guatemala	61.0	1.6
84	Samoa	60.4	0.9
85	Fiji	60.3	-0.7
86	Dominican Republic	60.3	1.1
87	Ghana	60.2	2.1
88	Mongolia	60.0	-2.8
89	Lebanon	59.5	1.4
90	Burkina Faso	59.4	-0.1
91	Morocco	59.2	1.5
92	Croatia	59.2	4.1
93	Rwanda	59.1	4.9
94	Egypt	59.0	1.0
95	Tunisia	58.9	1.0
96	Azerbaijan	58.8	0.8
97	Tanzania	58.3	0.0
98	Nicaragua	58.3	-1.5
99	Honduras	58.3	-0.4
100	Zambia	58.0	1.4
101	Kenya	57.5	-1.2
102	Swaziland	57.4	-1.7
103	Bhutan	57.0	-0.7
104	Serbia	56.9	0.3
105	Algeria	56.9	0.3
106	Nigeria	56.8	1.7
107	Cambodia	56.6	0.0
108	Vanuatu	56.4	-2.0
109	The Philippines	56.3	-0.4
110	Bosnia and Herzegovina	56.2	3.1
111	Mozambique	56.0	0.3
112	Mali	55.6	0.0
113	Brazil	55.6	-1.1
114	Indonesia	55.5	2.1
115	Benin	55.4	0.0
116	Gabon	55.4	0.4
117	Pakistan	55.2	-1.8
118	The Gambia	55.1	-0.7
119	Senegal	54.6	-1.7
120	Sri Lanka	54.6	-1.4
121	Yemen	54.4	-2.5

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2009
122	Malawi	54.1	0.4
123	Côte d'Ivoire	54.1	-0.9
124	India	53.8	-0.6
125	Moldova	53.7	-1.2
126	Papua New Guinea	53.5	-1.3
127	Tonga	53.4	-0.7
128	Tajikistan	53.0	-1.6
129	Niger	52.9	-0.9
130	Nepal	52.7	-0.5
131	Suriname	52.5	-1.6
132	Cameroon	52.3	-0.6
133	Mauritania	52.0	-1.9
134	Guinea	51.8	0.8
135	Argentina	51.2	-1.1
136	Ethiopia	51.2	-1.8
137	Bangladesh	51.1	3.6
138	Laos	51.1	0.7
139	Djibouti	51.0	-0.2
140	China	51.0	-2.2
141	Haiti	50.8	0.3
142	Micronesia	50.6	-1.1
143	Russia	50.3	-0.5
144	Vietnam	49.8	-1.2
145	Syria	49.4	-1.9
146	Bolivia	49.4	-4.2
147	Ecuador	49.3	-3.2
148	Maldives	49.0	-2.3
149	São Tomé and Príncipe	48.8	5.0
150	Belarus	48.7	3.7
151	Equatorial Guinea	48.6	-2.7
152	Central African Republic	48.4	0.1
153	Guyana	48.4	0.0
154	Angola	48.4	1.4
155	Lesotho	48.1	-1.6
156	Seychelles	47.9	0.1
157	Sierra Leone	47.9	0.1
158	Uzbekistan	47.5	-3.0
159	Chad	47.5	0.0
160	Burundi	47.5	-1.3

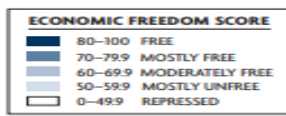
World Rank	Country	Overall Score	Change from 2009
161	Togo	47.1	-1.5
162	Ukraine	46.4	-2.4
163	Liberia	46.2	-1.9
164	Timor-Leste	45.8	-4.7
165	Comoros	44.9	1.6
166	Kiribati	43.7	-2.0
167	Guinea-Bissau	43.6	-1.8
168	Iran	43.4	-1.2
169	Republic of Congo	43.2	-2.2
170	Solomon Islands	42.9	-3.1
171	Turkmenistan	42.5	-1.7
172	Democratic Republic of Congo	41.4	-1.4
173	Libya	40.2	-3.3
174	Venezuela	37.1	-2.8
175	Burma	36.7	-1.0
176	Eritrea	35.3	-3.2
177	Cuba	26.7	-1.2
178	Zimbabwe	21.4	-1.3
179	North Korea	1.0	-1.0
n/a	Afghanistan	n/a	n/a
n/a	Iraq	n/a	n/a
n/a	Liechtenstein	n/a	n/a
n/a	Sudan	n/a	n/a



c. 2011

RANKING THE WORLD BY ECONOMIC FREEDOM

Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score
1	Hong Kong	89.7	65	Cape Verde	64.6	130	Bangladesh	53.0
2	Singapore	87.2	66	Slovenia	64.6	131	Papua New Guinea	52.6
3	Australia	82.5	67	Turkey	64.2	132	Algeria	52.4
4	New Zealand	82.3	68	Poland	64.1	133	Haiti	52.1
5	Switzerland	81.9	69	Portugal	64.0	134	Austrataria	52.1
6	Canada	80.8	70	Albania	64.0	135	China	52.0
7	Ireland	78.7	71	Belize	63.8	136	Cameroon	51.8
8	Denmark	78.6	72	Dominica	63.3	137	Guinea	51.7
9	United States	77.8	73	Namibia	62.7	138	Argentina	51.7
10	Bahrain	77.7	74	South Africa	62.7	139	Vietnam	51.6
11	Chile	77.4	75	Rwanda	62.7	140	Syria	51.3
12	Mauritius	76.2	76	Montenegro	62.5	141	Libya	51.2
13	Luxembourg	76.2	77	Paraguay	62.3	142	Seychelles	51.2
14	Estonia	75.2	78	Kazakhstan	62.1	143	Russia	50.5
15	The Netherlands	74.7	79	Guatemala	61.9	144	Ethiopia	50.5
16	United Kingdom	74.2	80	Ligand	61.7	145	micronesia	50.3
17	Finland	74.0	81	Madagascar	61.2	146	Nepal	50.1
18	Cyprus	73.3	82	Croatia	61.1	147	Bolivia	50.0
19	Macau	73.1	83	Kyrgyz Republic	61.1	148	Burundi	49.6
20	Japan	72.8	84	Samoa	60.6	149	Sierra Leone	49.3
21	Austria	71.9	85	Burkina Faso	60.6	150	Sao Tome and Principe	49.5
22	Sweden	71.9	86	Fiji	60.4	151	Guyana	49.4
23	Germany	71.8	87	Italy	60.3	152	Central African Republic	49.3
24	Lithuania	71.3	88	Greece	60.3	153	Togo	49.1
25	Taiwan	70.8	89	Lebanon	60.1	154	Maldives	48.3
26	Saint Lucia	70.8	90	Dominican Republic	60.0	155	Belarus	47.9
27	Qatar	70.5	91	Zambia	59.7	156	Lesotho	47.5
28	Czech Republic	70.4	92	Azerbaijan	59.7	157	Equatorial Guinea	47.5
29	Georgia	70.4	93	Morocco	59.6	158	Ecuador	47.1
30	Norway	70.3	94	Mongolia	59.5	159	Guinea-Bissau	46.5
31	Spain	70.2	95	Ghana	59.4	160	Liberia	46.5
32	Belgium	70.2	96	Egypt	59.1	161	Angola	46.2
33	Uruguay	70.0	97	Swaziland	59.1	162	Solomon Islands	45.9
34	Oman	69.8	98	Nicaragua	59.1	163	Uzbekistan	45.8
35	South Korea	69.9	99	Honduras	58.6	164	Ukraine	45.8
36	Armenia	69.7	100	Tunisia	58.5	165	Chad	45.3
37	Slovak Republic	69.5	101	Serbia	58.0	166	Kiribati	44.8
38	Jordan	68.9	102	Cambodia	57.9	167	Comoros	44.8
39	El Salvador	68.8	103	Bhutan	57.6	168	Republic of Congo	43.6
40	Botswana	68.8	104	Bosnia and Herzegovina	57.5	169	Turkmenistan	43.6
41	Peru	68.6	105	The Gambia	57.4	170	Timor-Leste	42.8
42	Barbados	68.5	106	Kenya	57.4	171	Iran	42.1
43	Israel	68.5	107	Sri Lanka	57.1	172	Democratic Republic of Congo	40.7
44	Iceland	68.2	108	Tanzania	57.0	173	Libya	38.6
45	Colombia	68.0	109	Mozambique	56.8	174	Burma	37.8
46	The Bahamas	68.0	110	Gabon	56.7	175	Venezuela	37.6
47	United Arab Emirates	67.8	111	Nigeria	56.7	176	Eritrea	36.7
48	Mexico	67.8	112	Vanuatu	56.3	177	Cuba	27.7
49	Costa Rica	67.5	113	Brazil	56.3	178	Zimbabwe	22.1
50	Saint Vincent and the Grenadines	66.9	114	Malii	56.3	179	North Korea	1.0
51	Hungary	66.6	115	The Philippines	56.2	n/a	Afghanistan	n/a
52	Trinidad and Tobago	66.6	116	Indonesia	56.0	n/a	Liechtenstein	n/a
53	Malaysia	66.3	117	Berlin	56.0	n/a	Sudan	n/a
54	Saudi Arabia	66.2	118	Tonga	55.8			
55	Macedonia	66.0	119	Malawi	55.8			
56	Latvia	65.8	120	Moldova	55.7			
57	Malta	65.7	121	Senegal	55.7			
58	Jamaica	65.7	122	Cote d'Ivoire	55.4			
59	Panama	64.9	123	Pakistan	55.1			
60	Bulgaria	64.9	124	India	54.6			
61	Kuwait	64.9	125	Djibouti	54.6			
62	Thailand	64.7	126	Niger	54.6			
63	Romania	64.7	127	Yemen	53.5			
64	France	64.6	128	Tajikistan	53.5			
			129	Suriname	53.1			



d. 2012

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2011	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2011	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2011
1	Hong Kong	89.9	0.2	38	Belgium	69.0	-1.2	111	Bhutan	56.6	-1.0
2	Singapore	87.5	0.3	39	Armenia	68.8	-0.9	112	Vanuatu	56.6	-0.1
3	Australia	83.1	0.2	40	Norway	68.8	-1.5	113	Gabon	56.4	-0.3
4	New Zealand	82.1	-0.2	41	El Salvador	68.7	-0.1	114	Malawi	56.4	0.6
5	Switzerland	81.1	-0.8	42	Peru	68.7	0.1	115	Indonesia	56.4	0.4
6	Canada	79.9	-0.9	43	Macedonia	68.5	2.5	116	Nigeria	56.3	-0.4
7	Chile	78.3	-0.9	44	Costa Rica	68.0	0.7	117	Mali	55.8	-0.5
8	Mauritius	77.0	0.8	45	Colombia	68.0	0.0	118	Berlin	55.7	-0.3
9	Ireland	76.9	-1.8	46	The Bahamas	68.0	0.0	119	Greece	55.4	-4.9
10	United States	76.3	-1.5	47	Oman	67.9	-1.9	120	Senegal	55.4	-0.3
11	Denmark	76.2	-2.4	48	Israel	67.8	-0.7	121	Yemen	55.3	1.1
12	Bahrain	75.2	-2.5	49	Hungary	67.1	0.5	122	India	54.7	0.0
13	Luxembourg	74.5	-1.7	50	Malta	67.0	1.3	123	Poland	54.6	0.0
14	United Kingdom	74.1	-0.4	51	Slovakia	67.0	-2.5	124	Moldova	54.4	1.3
15	The Netherlands	73.3	-1.4	52	Saint Vincent and the Grenadines	66.5	-0.4	125	Niger	54.3	0.0
16	Estonia	73.2	-2.0	53	Malaysia	66.4	0.1	126	Cote d'Ivoire	54.3	-1.1
17	Finland	72.3	-1.7	54	Mexico	65.3	-2.5	127	Djibouti	53.9	-0.6
18	Taiwan	71.9	1.1	55	Panama	65.2	0.3	128	Papua New Guinea	53.8	1.2
19	Macau	71.8	-1.3	56	Lithuania	65.2	-0.6	129	Tajikistan	53.4	-0.1
20	Cyprus	71.8	-1.5	57	Albania	65.1	1.1	130	Bangladesh	53.2	0.2
21	Sweden	71.7	-0.2	58	Jamaica	65.1	-0.6	131	Mauritania	53.0	0.9
22	Japan	71.6	-1.2	59	Rwanda	64.9	2.2	132	Seychelles	53.0	1.8
23	Lithuania	71.5	0.2	60	Thailand	64.9	0.2	133	Suriname	52.6	-0.5
24	Saint Lucia	71.3	0.5	61	Bulgaria	64.7	-0.2	134	Ethiopia	52.0	1.5
25	Qatar	71.3	0.8	62	Romania	64.4	-0.3	135	Cameroon	51.8	0.0
26	Germany	71.0	-0.8	63	Trinidad and Tobago	64.4	-2.1	136	Vietnam	51.3	-0.3
27	Iceland	70.9	2.7	64	Poland	64.2	0.1	137	Guyana	51.3	1.9
28	Austria	70.3	-1.6	65	Kazakhstan	63.6	1.5	138	China	51.2	-0.8
29	Uruguay	69.9	-0.1	66	Cape Verde	63.5	-1.1	139	Syria	51.2	-0.1
30	Czech Republic	69.9	-0.5	67	France	63.2	-1.4	140	Algeria	51.0	-1.4
31	South Korea	69.9	0.1	68	Portugal	63.0	-1.0	141	Guinea	50.8	-0.9
32	Jordan	69.9	1.0	69	Slovenia	62.9	-1.7	142	Haiti	50.7	-1.4
33	Botswana	69.6	0.8	70	South Africa	62.7	0.0	143	Micronesia	50.7	0.4
34	Georgia	69.4	-1.0	71	Kuwait	62.5	-2.4	144	Russia	50.5	0.0
35	United Arab Emirates	69.3	1.5	72	Montenegro	62.5	0.0	145	Central African Republic	50.3	1.0
36	Spain	69.1	-1.2	73	Turkey	62.5	-1.7	146	Bolivia	50.2	0.2
37	Barbados	69.0	0.5					147	Nepal	50.2	0.1

e. 2013

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2012	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2012	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2012
1	Hong Kong	89.3	-0.6	38	Armenia	69.4	0.6	74	South Africa	61.8	-0.9
2	Singapore	88.0	0.5	39	Barbados	69.3	0.3	75	Mongolia	61.7	0.2
3	Australia	82.6	-0.5	40	Belgium	69.2	0.2	76	Slovenia	61.7	-1.2
4	New Zealand	81.4	-0.7	41	Cyprus	69.0	-2.8	77	Ghana	61.3	0.6
5	Switzerland	81.0	-0.1	42	Slovakia	68.7	1.7	78	Croatia	61.3	0.4
6	Canada	79.4	-0.5	43	Macedonia	68.2	-0.3	79	Uganda	61.1	-0.8
7	Chile	79.0	0.7	44	Peru	68.2	-0.5	80	Paraguay	61.1	-0.7
8	Mauritius	76.9	-0.1	45	Oman	68.1	0.2	81	Sri Lanka	60.7	2.4
9	Denmark	76.1	-0.1	46	Spain	68.0	-1.1	82	Saudi Arabia	60.6	-1.9
10	United States	76.0	-0.3	47	Malta	67.5	0.5	83	Italy	60.6	1.8
11	Ireland	75.7	-1.2	48	Hungary	67.3	0.2	84	Namibia	60.3	-1.6
12	Bahrain	75.5	0.3	49	Costa Rica	67.0	-1.0	85	Guatemala	60.0	-0.9
13	Estonia	75.3	2.1	50	Mexico	67.0	1.7	86	Burkina Faso	59.9	-0.7
14	United Kingdom	74.8	0.7	51	Israel	66.9	-0.9	87	Dominican Republic	59.7	-0.5
15	Luxembourg	74.2	-0.3	52	Jamaica	66.8	1.7	88	Azerbaijan	59.7	0.8
16	Finland	74.0	1.7	53	El Salvador	66.7	-2.0	89	Kyrgyz Republic	59.6	-0.6
17	Netherlands	73.5	0.2	54	Saint Vincent and The Grenadines	66.7	0.2	90	Morocco	59.6	-0.6
18	Sweden	72.9	1.2	55	Latvia	66.5	1.3	91	Lebanon	59.5	-0.6
19	Germany	72.8	1.8	56	Malaysia	66.1	-0.3	92	The Gambia	58.8	0.0
20	Taiwan	72.7	0.8	57	Poland	66.0	1.8	93	Zambia	58.7	0.4
21	Georgia	72.2	2.8	58	Albania	65.2	0.1	94	Serbia	58.6	0.6
22	Lithuania	72.1	0.6	59	Romania	65.1	0.7	95	Cambodia	58.5	0.9
23	Iceland	72.1	1.2	60	Bulgaria	65.0	0.3	96	Honduras	58.4	-0.4
24	Japan	71.8	0.2	61	Thailand	64.1	-0.8	97	The Philippines	58.2	1.1
25	Austria	71.8	1.5	62	France	64.1	0.9	98	Tanzania	57.9	0.9
26	Macau	71.7	-0.1	63	Rwanda	64.1	-0.8	99	Gabon	57.8	1.4
27	Qatar	71.3	0.0	64	Dominica	63.9	2.3	100	Brazil	57.7	-0.2
28	United Arab Emirates	71.1	1.8	65	Cape Verde	63.7	0.2	101	Benin	57.6	1.9
29	Czech Republic	70.9	1.0	66	Kuwait	63.1	0.6	102	Belize	57.3	-4.6
30	Botswana	70.6	1.0	67	Portugal	63.1	0.1	103	Bosnia and Herzegovina	57.3	0.0
31	Norway	70.5	1.7	68	Kazakhstan	63.0	-0.6	104	Swaziland	57.2	0.0
32	Saint Lucia	70.4	-0.9	69	Turkey	62.9	0.4	105	Fiji	57.2	-0.1
33	Jordan	70.4	0.5	70	Montenegro	62.6	0.1	106	Samoa	57.1	-3.4
34	South Korea	70.3	0.4	71	Panama	62.5	-2.7	107	Tunisia	57.0	-1.6
35	The Bahamas	70.1	2.1	72	Trinidad and Tobago	62.3	-2.1	108	Indonesia	56.9	0.5
36	Uruguay	69.7	-0.2	73	Madagascar	62.0	-0.4	109	Vanuatu	56.6	0.0
37	Colombia	69.6	1.6					110	Nicaragua	56.6	-1.3

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2012	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2012
111	Mali	56.4	0.6	148	Burundi	49.0	0.9
112	Tonga	56.0	-1.0	149	Maldives	49.0	-0.2
113	Yemen	55.9	0.6	150	Togo	48.8	0.5
114	Kenya	55.9	-1.6	151	Sierra Leone	48.3	-0.8
115	Moldova	55.5	1.1	152	Haiti	48.1	-2.6
116	Senegal	55.5	0.1	153	São Tomé and Príncipe	48.0	-2.2
117	Greece	55.4	0.0	154	Belarus	48.0	-1.0
118	Malawi	55.3	-1.1	155	Lesotho	47.9	1.3
119	India	55.2	0.6	156	Bolivia	47.9	-2.3
120	Nigeria	55.1	-1.2	157	Comoros	47.5	1.8
121	Pakistan	55.1	0.4	158	Angola	47.3	0.6
122	Bhutan	55.0	-1.6	159	Ecuador	46.9	-1.4
123	Mozambique	55.0	-2.1	160	Argentina	46.7	-1.3
124	Seychelles	54.9	1.9	161	Ukraine	46.3	0.2
125	Egypt	54.8	-3.1	162	Uzbekistan	46.0	0.2
126	Côte d'Ivoire	54.1	-0.2	163	Kiribati	45.9	-1.0
127	Djibouti	53.9	0.0	164	Chad	45.2	0.4
128	Niger	53.9	-0.4	165	Solomon Islands	45.0	-1.2
129	Guyana	53.8	2.5	166	Timor-Leste	43.7	0.4
130	Papua New Guinea	53.6	-0.2	167	Congo, Rep. of	43.5	-0.3
131	Tajikistan	53.4	0.0	168	Iran	43.2	0.9
132	Bangladesh	52.6	-0.6	169	Turkmenistan	42.6	-1.2
133	Cameroon	52.3	0.5	170	Equatorial Guinea	42.3	-0.5
134	Mauritania	52.3	-0.7	171	Congo, Dem. Rep. of	39.6	-1.5
135	Suriname	52.0	-0.6	172	Burma	39.2	0.5
136	China	51.9	0.7	173	Eritrea	36.3	0.1
137	Guinea	51.2	0.4	174	Venezuela	36.1	-2.0
138	Guinea-Bissau	51.1	1.0	175	Zimbabwe	28.6	2.3
139	Russia	51.1	0.6	176	Cuba	28.5	0.2
140	Vietnam	51.0	-0.3	177	North Korea	1.5	0.5
141	Nepal	50.4	0.2	N/A	Afghanistan	N/A	N/A
142	Central African Republic	50.4	0.1	N/A	Iraq	N/A	N/A
143	Micronesia	50.1	-0.6	N/A	Kosovo	N/A	N/A
144	Laos	50.1	0.1	N/A	Libya	N/A	N/A
145	Algeria	49.6	-1.4	N/A	Liechtenstein	N/A	N/A
146	Ethiopia	49.4	-2.6	N/A	Somalia	N/A	N/A
147	Liberia	49.3	0.7	N/A	Sudan	N/A	N/A
				N/A	Syria	N/A	N/A



f. 2014

World Rank	Country	Overall Score	Change from 2013	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2013	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2013
1	Hong Kong	90.1	0.8	37	Malaysia	69.6	3.5	72	Thailand	63.3	-0.8
2	Singapore	89.4	1.4	38	Uruguay	69.3	-0.4	73	Trinidad and Tobago	62.7	0.4
3	Australia	82.0	-0.6	39	Jordan	69.2	-1.2	74	Slovenia	62.7	1.0
4	Switzerland	81.6	0.6	40	Brunei	69.0	N/A	75	South Africa	62.5	0.7
5	New Zealand	81.2	-0.2	41	Ameria	68.9	-0.5	76	Kuwait	62.3	-0.8
6	Canada	80.2	0.8	42	Latvia	68.7	2.2	77	Saudi Arabia	62.2	1.6
7	Chile	78.7	-0.3	43	Macedonia	68.6	0.4	78	Paraguay	62.0	0.9
8	Mauritius	76.5	-0.4	44	Israel	68.4	1.5	79	Madagascar	61.7	-0.3
9	Ireland	76.2	0.5	45	Barbados	68.3	-1.0	80	Dominican Republic	61.3	1.6
10	Denmark	76.1	0.0	46	Cyprus	67.6	-1.4	81	Azerbaijan	61.3	1.6
11	Estonia	75.9	0.6	47	Peru	67.4	-0.8	82	Swaziland	61.2	4.0
12	United States	75.5	-0.5	48	Oman	67.4	-0.7	83	Guatemala	61.2	1.2
13	Bahrain	75.1	-0.4	49	Spain	67.2	-0.8	84	Samoa	61.1	4.0
14	United Kingdom	74.9	0.1	50	Poland	67.0	1.0	85	Kyrgyz Republic	61.1	1.5
15	The Netherlands	74.2	0.7	51	Hungary	67.0	-0.3	86	Italy	60.9	0.3
16	Luxembourg	74.2	0.0	52	Saint Vincent and the Grenadines	67.0	0.3	87	Croatia	60.4	-0.9
17	Taiwan	73.9	1.2	53	Costa Rica	66.9	-0.1	88	Zambia	60.4	1.7
18	Germany	73.4	0.6	54	Albania	66.9	1.7	89	The Philippines	60.1	1.9
19	Finland	73.4	-0.6	55	Mexico	66.8	-0.2	90	Sri Lanka	60.0	-0.7
20	Sweden	73.1	0.2	56	Jamaica	66.7	-0.1	91	Uganda	59.9	-1.2
21	Lithuania	73.0	0.9	57	Slovak Republic	66.4	-2.3	92	The Gambia	59.5	0.7
22	Georgia	72.6	0.4	58	Malta	66.4	-1.1	93	Vanuatu	59.5	2.9
23	Iceland	72.4	0.3	59	El Salvador	66.2	-0.5	94	Namibia	59.4	-0.9
24	Austria	72.4	0.6	60	Cape Verde	66.1	2.4	95	Serbia	59.4	0.8
25	Japan	72.4	0.6	61	Bulgaria	65.7	0.7	96	Lebanon	59.4	-0.1
26	Czech Republic	72.2	1.3	62	Romania	65.5	0.4	97	Mongolia	58.9	-2.8
27	Botswana	72.0	1.4	63	Dominica	65.2	1.3	98	Burkina Faso	58.9	-1.0
28	United Arab Emirates	71.4	0.3	64	Turkey	64.9	2.0	99	Fiji	58.7	1.5
29	Macau	71.3	-0.4	65	Rwanda	64.7	0.6	100	Indonesia	58.5	1.6
30	Qatar	71.2	-0.1	66	Ghana	64.2	2.9	101	Bosnia and Herzegovina	58.4	1.1
31	South Korea	71.2	0.9	67	Kazakhstan	63.7	0.7	102	Nicaragua	58.4	1.8
32	Norway	70.9	0.4	68	Montenegro	63.6	1.0	103	Morocco	58.3	-1.3
33	Saint Lucia	70.7	0.3	69	Portugal	63.5	0.4	104	Tonga	58.2	2.2
34	Colombia	70.7	1.1	70	France	63.5	-0.6	105	Gabon	57.8	0.0
35	Belgium	69.9	0.7	71	Panama	63.4	0.9	106	Tanzania	57.8	-0.1
36	The Bahamas	69.8	-0.3					107	Côte d'Ivoire	57.7	3.6

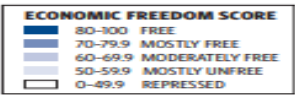
World Rank	Country	Overall Score	Change from 2013	World Rank	Country	Overall Score	Change from 2013
108	Cambodia	57.4	-1.1	144	Laos	51.2	1.1
109	Tunisia	57.3	0.3	145	Maldives	51.0	2.0
110	Moldova	57.3	1.8	146	Algeria	50.8	1.2
111	Kenya	57.1	1.2	147	Vietnam	50.8	-0.2
112	Honduras	57.1	-1.3	148	Sierra Leone	50.5	2.2
113	Benin	57.1	-0.5	149	Nepal	50.1	-0.3
114	Brazil	56.9	-0.8	150	Belarus	50.1	2.1
115	Belize	56.7	-0.6	151	Ethiopia	50.0	0.6
116	Bhutan	56.7	1.7	152	Togo	49.9	1.1
117	Seychelles	56.2	1.3	153	Micronesia	49.8	-0.3
118	Djibouti	55.9	2.0	154	Lesotho	49.5	1.6
119	Greece	55.7	0.3	155	Ukraine	49.3	3.0
120	India	55.7	0.5	156	Haiti	48.9	0.8
121	Guyana	55.7	1.9	157	São Tomé and Príncipe	48.8	0.8
122	Mali	55.5	-0.9	158	Bolivia	48.4	0.5
123	Yemen	55.5	-0.4	159	Ecuador	48.0	1.1
124	Malawi	55.4	0.1	160	Angola	47.7	0.4
125	Senegal	55.4	-0.1	161	Central African Republic	46.7	-3.7
126	Pakistan	55.2	0.1	162	Burma	46.5	2.3
127	Niger	55.1	1.2	163	Uzbekistan	46.5	0.5
128	Mozambique	55.0	0.0	164	Kiribati	46.3	0.4
129	Nigeria	54.3	-0.8	165	Solomon Islands	46.2	1.2
130	Suriname	54.2	2.2	166	Argentina	44.6	-2.1
131	Bangladesh	54.1	1.5	167	Chad	44.5	-0.7
132	Papua New Guinea	53.9	0.3	168	Equatorial Guinea	44.4	2.1
133	Guinea	53.5	2.3	169	Congo, Rep. of	43.7	0.2
134	Mauritania	53.2	0.9	170	Timor-Leste	43.2	-0.5
135	Egypt	52.9	-1.9	171	Turkmenistan	42.2	-0.4
136	Cameroon	52.6	0.3	172	Congo, Dem. Rep. of	40.6	1.0
137	China	52.5	0.6	173	Iran	40.3	-2.9
138	Liberia	52.4	3.1	174	Eritrea	38.5	2.2
139	Tajikistan	52.0	-1.4	175	Venezuela	36.3	0.2
140	Russia	51.9	0.8	176	Zimbabwe	35.5	6.9
141	Burundi	51.4	2.4	177	Cuba	28.7	0.2
142	Comoros	51.4	3.9	178	North Korea	1.0	-0.5
143	Guinea-Bissau	51.3	0.2	N/A	Alghanistan	N/A	N/A



g. 2015

RANKING THE WORLD BY ECONOMIC FREEDOM

Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score
1	Hong Kong	89.6	66	Montenegro	64.7	132	Burundi	53.7
2	Singapore	89.4	67	Trinidad and Tobago	64.1	133	Yemen	53.7
3	New Zealand	82.1	68	Panama	64.1	134	Maldives	53.4
4	Australia	81.4	69	Kazakhstan	63.3	135	Mauritania	53.3
5	Switzerland	80.5	70	Turkmenistan	63.2	136	Sao Tome and Principe	53.3
6	Canada	79.1	71	Ghana	63.0	137	Papua New Guinea	53.1
7	Chile	78.5	72	South Africa	62.6	138	Togo	53.0
8	Estonia	78.8	73	Bahrain	62.5	139	China	52.7
9	Ireland	76.6	74	Kuwait	62.5	140	Tajikistan	52.7
10	Mauritius	76.4	75	Thailand	62.4	141	Liberia	52.7
11	Denmark	76.6	76	The Philippines	62.3	142	Comoros	52.5
12	United States	76.2	77	Saudi Arabia	62.1	143	Russia	52.1
13	United Kingdom	75.8	78	Samoa	61.9	144	Guinea	52.1
14	Taiwan	75.1	79	Madagascar	61.7	145	Guinea-Bissau	52.0
15	Lithuania	74.7	80	Italy	61.7	146	Cameroon	51.9
16	Germany	73.8	81	Croatia	61.5	147	Sierra Leone	51.7
17	Netherlands	73.5	82	Kyrgyz Republic	61.5	148	Vietnam	51.3
18	Bahrain	73.4	83	Paraguay	61.1	149	Ethiopia	51.5
19	Finland	73.4	84	Vanuatu	61.1	150	Laos	51.4
20	Japan	73.3	85	Azerbaijan	61.0	151	Haiti	51.3
21	Luxembourg	73.2	86	Dominican Republic	61.0	152	Nepal	51.3
22	Georgia	73.0	87	Guatemala	60.4	153	Belarus	49.8
23	Sweden	72.7	88	Slovenia	60.3	154	Micronesia	49.6
24	Czech Republic	72.5	89	Morocco	60.1	155	Lesotho	49.6
25	United Arab Emirates	72.4	90	Serbia	60.0	156	Ecuador	49.2
26	Iceland	72.0	91	Swaziland	59.9	157	Algeria	48.9
27	Norway	71.8	92	Uganda	59.7	158	Angola	48.9
28	Colombia	71.7	93	Namibia	59.6	159	Solomon Islands	47.0
29	South Korea	71.5	94	Lebanon	59.3	160	Uzbekistan	47.0
30	Austria	71.2	95	Tonga	59.3	161	Burma	46.9
31	Malaysia	70.8	96	Mongolia	59.2	162	Ukraine	46.9
32	Qatar	70.8	97	Bosnia and Herzegovina	59.0	163	Bolivia	46.8
33	Israel	70.7	98	Fiji	58.8	164	Kiribati	46.8
34	Macau	70.3	99	Benin	58.8	165	Chad	45.9
35	Saint Lucia	70.2	100	Zambia	58.7	166	Central African Republic	45.9
36	Botswana	69.9	101	Sri Lanka	58.6	167	Timor-Leste	45.5
37	Latvia	69.7	102	Burkina Faso	58.6	168	Congo, Dem. Rep.	45.0
38	Jordan	69.3	103	Cote d'Ivoire	58.5	169	Argentina	44.1
39	Brunei	68.9	104	Gabon	58.3	170	Congo, Republic of	43.8
40	Belgium	68.8	105	Indonesia	58.1	171	Iran	41.8
41	The Bahamas	68.7	106	Senegal	57.8	172	Turkmenistan	41.4
42	Equatorial Guinea	68.6	107	Tunisia	57.8	173	Equatorial Guinea	40.4
43	Uruguay	68.6	108	Nicaragua	57.6	174	Eritrea	38.9
44	Saint Vincent and the Grenadines	68.0	109	Tanzania	57.5	175	Zimbabwe	37.6
45	Cyprus	67.9	110	Cambodia	57.5	176	Venezuela	37.6
46	Barbados	67.9	111	Moldova	57.5	177	Cuba	29.6
47	Peru	67.7	112	Djibouti	57.5	178	North Korea	1.3
48	Jamaica	67.7	113	The Gambia	57.5	N/A	Afghanistan	N/A
49	Spain	67.6	114	Iraq	57.5	N/A	Iran	N/A
50	Slovak Republic	67.2	115	Bhutan	57.4	N/A	Kosovo	N/A
51	Costa Rica	67.2	116	Honduras	57.4	N/A	Libya	N/A
52	Armenia	67.1	117	Belize	56.8	N/A	Liechtenstein	N/A
53	Macedonia	67.1	118	Brazil	56.6	N/A	Somalia	N/A
54	Bangladesh	67.0	119	Mali	56.4	N/A	Sudan	N/A
55	Bulgaria	66.8	120	Nigeria	56.4	N/A	Syria	N/A
56	Oman	66.7	121	Pakistan	55.6	N/A	Yemen	N/A
57	Romania	66.6	122	Kenya	55.6			
58	Malta	66.5	123	Guyana	55.5			
59	Mexico	66.4	124	Egypt	55.2			
60	Cabo Verde	66.4	125	Mozambique	54.8			
61	Dominica	66.4	126	Malawi	54.8			
62	El Salvador	66.1	127	Niger	54.6			
63	Albania	65.7	128	India	54.6			
64	Portugal	65.3	129	Suriname	54.2			
65	Rwanda	64.8	130	Croacia	54.0			
			131	Bangladesh	53.9			



h. 2016

RANKING THE WORLD BY ECONOMIC FREEDOM

Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score
1	Hong Kong	88.6	66	Panama	64.8	132	Maldives	53.9
2	Singapore	87.8	67	Thailand	63.9	133	Burundi	53.9
3	New Zealand	82.6	68	Kazakhstan	63.6	134	Suriname	53.8
4	Switzerland	81.0	69	Samoa	63.5	135	Togo	53.6
5	Australia	80.3	70	Philippines	63.1	136	Guinea	53.3
6	Canada	79.5	71	Bahrain	63.1	137	Bangladesh	53.3
7	Chile	77.7	72	Ghana	63.0	138	Greece	53.2
8	Ireland	77.3	73	Trinidad and Tobago	62.9	139	Mozambique	53.2
9	United Kingdom	76.2	74	Kuwait	62.7	140	Papua New Guinea	53.2
10	United States	76.4	75	France	62.3	141	Comoros	52.4
11	United States	75.4	76	Seychelles	62.2	142	Sierra Leone	52.3
12	Denmark	75.2	77	Denmark	62.1	143	Liberia	52.3
13	Lithuania	75.2	78	Saudi Arabia	62.1	144	China	52.0
14	Taiwan	74.7	79	Turkey	62.1	145	Guinea-Bissau	51.8
15	Mauritius	74.7	80	South Africa	61.9	146	Malawi	51.8
16	Netherlands	74.6	81	Namibia	61.9	147	Micronesia	51.8
17	Germany	74.4	82	Guatemala	61.8	148	Ethiopia	51.5
18	Bahrain	74.3	83	Paraguay	61.5	149	Tajikistan	51.3
19	Luxembourg	73.9	84	Kosovo	61.4	150	Haiti	51.3
20	Iceland	73.3	85	Morocco	61.3	151	Nepal	50.9
21	Czech Republic	73.2	86	Italy	61.2	152	Equatorial Guinea	50.6
22	Japan	73.1	87	Madagascar	61.1	153	Russia	50.6
23	Georgia	72.6	88	Dominican Republic	61.0	154	Algeria	50.1
24	Finland	72.6	89	Vanuatu	60.8	155	Laos	49.8
25	United Arab Emirates	72.6	90	Slovenia	60.7	156	Angola	49.8
26	Sweden	72.0	91	Azerbaijan	60.2	157	Belarus	48.8
27	South Korea	71.7	92	Cote d'Ivoire	60.0	158	Burma	48.7
28	Austria	71.7	93	Sri Lanka	59.9	159	Ecuador	47.4
29	Malaysia	71.5	94	Swaziland	59.7	160	Bolivia	47.4
30	Botswana	71.1	95	Tonga	59.6	161	Solomon Islands	47.0
31	Bahamas	70.9	96	Kyrgyz Republic	59.6	162	Ukraine	46.8
32	Norway	70.8	97	Bhutan	59.5	163	Congo, Dem. Rep. of	46.4
33	Colombia	70.8	98	Lebanon	59.5	164	Chad	46.3
34	Qatar	70.7	99	Indonesia	59.4	165	Kiribati	46.2
35	Israel	70.7	100	Mongolia	59.4	166	Uzbekistan	46.0
36	Latvia	70.4	101	Benin	59.3	167	Timor-Leste	45.8
37	Macau	70.1	102	Uganda	59.3	168	Central African Republic	45.2
38	Saint Lucia	70.0	103	Croatia	59.1	169	Argentina	45.2
39	Poland	69.3	104	Burkina Faso	59.1	170	Equatorial Guinea	43.7
40	Saint Vincent and the Grenadines	68.8	105	Gabon	59.0	171	Iran	43.5
41	Uruguay	68.8	106	Zambia	58.8	172	Congo, Rep. of	42.7
42	Cyprus	68.7	107	Fiji	58.8	173	Eritrea	42.7
43	Spain	68.5	108	Bosnia and Herzegovina	58.6	174	Turkmenistan	41.9
44	Belgium	68.4	109	Nicaragua	58.6	175	Zimbabwe	38.2
45	Barbados	68.3	110	Tanzania	58.5	176	Venezuela	38.2
46	Jordan	68.3	111	Senegal	57.9	177	Cuba	29.8
47	Macedonia	67.5	112	Cambodia	57.9	178	North Korea	2.3
48	Jamaica	67.5	113	Honduras	57.7	N/A	Afghanistan	N/A
49	Peru	67.4	114	Tunisia	57.6	N/A	Iran	N/A
50	Costa Rica	67.4	115	Kenya	57.5	N/A	Kosovo	N/A
51	Brunei Darussalam	67.3	116	Nigeria	57.5	N/A	Libya	N/A
52	Oman	67.1	117	Moldova	57.4	N/A	Liechtenstein	N/A
53	Dominica	67.0	118	Belize	57.4	N/A	Somalia	N/A
54	Armenia	67.0	119	Gambia	57.1	N/A	Sudan	N/A
55	Malta	66.7	120	Sao Tome and Principe	56.7	N/A	Syria	N/A
56	Slovakia	66.6	121	Mali	56.5	N/A	Yemen	N/A
57	Cabo Verde	66.5	122	Brazil	56.5			
58	Hungary	66.0	123	India	56.2			
59	Albania	65.9	124	Djibouti	56.0			
60	Bulgaria	65.9	125	Egypt	56.0			
61	Romania	65.6	126	Pakistan	55.9			
62	Mexico	65.2	127	Guyana	55.4			
63	El Salvador	65.1	128	Mauritania	54.8			
64	Portugal	65.0	129	Niger	54.3			
65	Montenegro	64.9	130	Cameroon	54.0			
			131	Vietnam	54.0			



i. 2017

RANKING THE WORLD BY ECONOMIC FREEDOM

Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score
1	Hong Kong	89.8	64	Saudi Arabia	64.4	128	Bangladesh	55.0
2	Singapore	88.6	65	Albania	64.4	129	Mongolia	54.8
3	New Zealand	83.7	66	El Salvador	64.1	130	Barbados	54.5
4	Switzerland	81.5	67	Dominica	63.7	131	Mauritania	54.4
5	Australia	81.0	68	Azerbaijan	63.6	132	Zambia	54.1
6	Estonia	79.1	69	Spain	63.6	133	Nepal	54.0
7	United Kingdom	78.0	70	Mexico	63.5	134	Mauritius	54.0
8	United Arab Emirates	76.9	71	Fiji	63.4	135	Kenya	53.5
9	Ireland	76.7	72	France	63.3	136	Gambia	53.4
10	Canada	76.5	73	Tonga	63.0	137	Lesotho	53.3
11	Taiwan	76.5	74	Guatemala	63.0	138	Togo	53.2
12	United Kingdom	76.4	75	Côte d'Ivoire	63.0	139	Burundi	53.2
13	Sweden	74.9	76	Dominican Republic	62.9	140	Bahrain	53.1
14	Luxembourg	75.9	77	Portugal	62.6	141	Pakistan	52.8
15	Netherlands	75.8	78	Namibia	62.5	142	Ethiopia	52.7
16	Lithuania	75.1	79	Italy	62.5	143	Ghana	52.5
17	United States	75.1	80	Paraguay	62.4	144	Argentina	52.3
18	Denmark	75.1	81	South Africa	62.3	145	Sierra Leone	52.6
19	Switzerland	74.9	82	Oman	62.1	146	Suriname	48.0
20	Latvia	74.8	83	Montenegro	62.0	147	Angola	48.5
21	Mauritius	74.7	84	Indonesia	61.9	148	Guinea	47.7
22	Iceland	74.5	85	Seychelles	61.8	149	Turkmenistan	47.4
23	South Korea	74.3	86	Morocco	61.5	150	Ukraine	51.9
24	Finland	74.0	87	Trinidad and Tobago	61.2	151	Sierra Leone	51.8
25	Norway	74.0	88	Switzerland	61.1	152	Papua New Guinea	50.9
26	Germany	73.8	89	Kyrgyz Republic	61.1	153	Kiribati	50.9
27	Malaysia	73.8	90	Bahamas	61.1	154	Niger	50.8
28	Czech Republic	73.5	91	Uganda	60.9	155	Iran	51.4
29	Qatar	73.1	92	Bosnia and Herzegovina	60.2	156	Argentina	50.4
30	Austria	72.3	93	Burkina Faso	59.6	157	Maldives	50.3
31	Macedonia	72.3	94	Costa Rica	59.4	158	Mozambique	49.2
32	Macau	70.7	95	Croatia	59.4	159	Haiti	49.6
33	Armenia	70.3	96	Benin	59.2	160	Ecuador	49.3
34	Botswana	70.1	97	Slovenia	59.2	161	Liberia	49.3
35	Brunei Darussalam	69.8	98	Nicaragua	58.9	162	Chad	49.0
36	Israel	69.7	99	Serbia	58.9	163	Afghanistan	48.9
37	Colombia	69.7	100	Honduras	58.8	164	Sudan	48.8
38	Uruguay	69.7	101	Belize	58.6	165	Guinea	47.4
39	Romania	69.7	102	Mali	58.6	166	Ukraine	48.1
40	Japan	69.6	103	Gabon	58.5	167	Suriname	48.0
41	Jamaica	69.5	104	Belarus	58.6	168	Togo	47.7
42	Kazakhstan	69.0	105	Tanzania	58.6	169	Guinea	47.6
43	Peru	68.9	106	Guyana	58.5	170	Turkmenistan	47.4
44	Bahrain	68.5	107	Bhutan	58.4	171	Djibouti	46.7
45	Poland	68.3	108	Samoa	58.4	172	Algeria	46.5
46	Kosovo	68.2	109	Tajikistan	58.2	173	Timor-Leste	46.3
47	Bulgaria	67.9	110	Moldova	58.0	174	Equatorial Guinea	45.0
48	Cyprus	67.9	111	China	57.4	175	Zimbabwe	44.0
49	Belgium	67.7	112	Sri Lanka	57.4	176	Eritrea	42.2
50	Malta	67.7	113	Madagascar	57.4	177	Congo, Rep. of	40.0
51	Rwanda	67.6	114	Russia	57.1	178	Cuba	33.9
52	Vietnam	67.5	115	Nepal	57.1	179	Venezuela	27.0
53	Jordan	66.7	116	Cabo Verde	56.9	180	North Korea	4.9
54	Panama	66.3	117	Trinidad and Tobago	56.4			
55	Thailand	66.2	118	Ghana	56.2			
56	Hungary	65.8	119	Guinea-Bissau	56.1			
57	Slovak Republic	65.7	120	Senegal	55.9			
58	Philippines	65.6	121	Comoros	55.8			
59	St. Vincent and the Grenadines	65.2	122	Saint Kitts and Nevis	55.8			
60	Turkey	65.2	123	Tunisia	55.7			
61	Kuwait	65.1	124	Solomon Islands	55.7			
62	St. Lucia	65.0	125	Nepal	55.1			
63	Costa Rica	65.0	126	Solomon Islands	55.0			
			127	Greece	55.0			



j. 2018

RANKING THE WORLD BY ECONOMIC FREEDOM

Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score	Rank	Country	Overall Score
1	Hong Kong	90.2	64	Slovenia	64.8	128	Bangladesh	55.1
2	Singapore	88.8	65	Albania	64.5	129	Kenya	54.7
3	New Zealand	84.2	66	Dominica	64.5	130	India	54.5
4	Switzerland	81.7	67	Azerbaijan	64.3	131	Pakistan	54.3
5	Australia	80.9	68	Montenegro	64.3	132	Zambia	54.3
6	Indonesia	80.4	69	Indonesia	64.2	133	Nepal	54.1
7	Estonia	78.8	70	Brunei	64.2	134	Mauritius	54.0
8	United Kingdom	78.0	71	France	64.1	135	Suriname	53.9
9	Canada	77.7	72	Portugal	63.4	136	Lesotho	53.9
10	United Arab Emirates	77.6	73	Guatemala	63.4	137	São Tomé and Príncipe	53.6
11	Iceland	77.0	74	Bahamas	63.2	138	Libya	53.6
12	Denmark	76.6	75	El Salvador	63.2	139	Egypt	53.4
13	Taiwan	76.6	76	Tonga	63.1	140	Lebanon	53.2
14	Luxembourg	76.4	77	South Africa	63.0	141	Vietnam	53.1
15	Sweden	75.7	78	Kyrgyz Republic	62.5	142	Gambia	52.8
16	Georgia	76.2	79	Italy	62.5	143	Micronesia	52.3
17	Netherlands	76.2	80	Serbia	62.5	144	Argentina	52.3
18	United States	75.7	81	Kuwait	62.4	145	Ghana	52.3
19	Lithuania	75.3	82	Paraguay	62.1	146	Guinea	52.2
20	Chile	75.2	83	Uganda	62.0	147	Congo, Dem. Rep.	52.1
21	Mauritius	75.1	84	Fiji	62.0	148	Malawi	52.0
22	Malaysia	74.5	85	Côte d'Ivoire	61.9	149	Cameroon	51.9
23	Norway	74.3	86	Morocco	61.9	150	Ukraine	51.9
24	Czech Republic	74.2	87	Bhutan	61.8	151	Sierra Leone	51.8
25	Germany	74.2	88	Seychelles	61.6	152	Uzbekistan	51.5
26	Finland	74.1	89	Dominican Republic	61.5	153	Iran	51.4
27	South Korea	73.8	90	Samoa	61.5	154	Afghanistan	51.3
28	Latvia	73.6	91	Bosnia and Herzegovina	61.4	155	Maldives	51.1
29	Qatar	73.1	92	Croatia	61.4	156	Niger	49.5
30	Japan	72.3	93	Oman	61.0	157	Burundi	50.9
31	Israel	72.2	94	Honduras	60.6	158	Liberia	50.9
32	Austria	71.8	95	Burkina Faso	60.0	159	Kiribati	50.8
33	Macedonia	71.3	96	Cabo Verde	60.0	160	Niger	49.5
34	Macau	70.9	97	Tanzania	59.9	161	Sudan	49.4
35	Botswana	69.9	98	Saudi Arabia	59.6	162	Chad	49.3
36	Vanuatu	69.5	99	Tunisia	59.5	163	Central African Republic	49.2
37	Romania	69.4	100	Nicaragua	58.9	164	Angola	48.6
38	Uruguay	69.2	101	Cambodia	58.7	165	Ecuador	48.5
39	Rwanda	69.1	102	Guyana	58.7	166	Suriname	48.1
40	Jamaica	69.1	103	Namibia	58.5	167	Timor-Leste	48.1
41	Kazakhstan	69.1	104	Nigeria	58.5	168	Togo	47.8
42	Colombia	68.9	105	Moldova	58.4	169	Turkmenistan	47.1
43	Peru	68.7	106	Tajikistan	58.3	170	Mozambique	46.3
44	Armenia	68.7	107	Russia	58.2	171	Djibouti	45.1
45	Poland	68.5	108	Belarus	58.2	172	Algeria	44.7
46	Malta	68.5	109	Gabon	58.0	173	Bolivia	44.1
47	Bulgaria	68.3	110	China	57.8	174	Zimbabwe	44.0
48	Cyprus	67.8	111	Sri Lanka	57.8	175	Equatorial Guinea	42.0
49	St. Vincent and the Grenadines	67.7	112	Trinidad and Tobago	57.7	176	Eritrea	41.7
50	Turkey	67.7	113	Mali	57.6	177	Congo, Rep. of	38.9
51	Saint Lucia	67.6	114	Solomon Islands	57.5	178	Cuba	31.9
52	Belgium	67.5	115	Greece	57.3	179	Venezuela	25.2
53	Thailand	67.1	116	Belize	57.1	180	North Korea	5.8
54	Panama	67.0	117	Barbados	57.0			
55	Hungary	66.7	118	Guinea-Bissau	56.9			
56	Kosovo	66.6	119	Madagascar	56.9			
57	Costa Rica	65.4	120	Benin	56.7			
58	Turkey	65.4	121	Comoros	56.0			
59	Slovak Republic	65.3	122	Ghana	56.0			
60	Spain	65.1	123	Switzerland	55.9			
61	Philippines	65.0	124	Haiti	55.7			
62	Jordan	64.9	125	Mongolia	55.7			
63	Mexico	64.8	126	Senegal	55.7			
			127	Papua New Guinea	55.7			



Lampiran 11 Data Gross Domestic Product

GDP growth (annual %) ⓘ

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	4.6	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	
Cambodia	0.1	6.0	7.1	7.3	7.4	7.1	
Philippines	1.1	7.6	3.7	6.7	7.1	6.1	
Malaysia	-1.5	7.4	5.3	5.5	4.7	6.0	
Thailand	-0.7	7.5	0.8	7.2	2.7	1.0	
Vietnam	5.4	6.4	6.2	5.2	5.4	6.0	

Source: World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to be used for citation.

GDP growth (annual %) ⓘ

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indonesia	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2
Cambodia	7.4	7.1	7.0	7.0	7.0	7.5
Philippines	7.1	6.1	6.1	6.9	6.7	6.2
Malaysia	4.7	6.0	5.1	4.4	5.7	4.7
Thailand	2.7	1.0	3.1	3.4	4.0	4.1
Vietnam	5.4	6.0	6.7	6.2	6.8	7.1

Source: World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to be used for citation.



Lampiran 12 **CURRICULUM VITAE**



ANINDITA RAMADHANTI

Business Administration Student

Jakarta, January 18th 1999

anindtr@gmail.com

+62 822 9879 4684

EXPERIENCE

Work

FINANCIAL ANALYST INTERN. OTORITAS JASA KEUANGAN DKI JAKARTA
2019

Organizational

INTERNSHIP HIMABIS FIA UB
2016

Another Experience

STAFF of ADMINISTRATION DIVISION SEMINAR NASIONAL
2017

STAFF of ADMINISTRATION DIVISION OCTOBER PROJECT
2017

HEAD of TREASURES DIVISION HORE CUP
2018

STAFF of SPONSORSHIP DIVISION JAMBORE JAZZ KAMPUS
2018

EDUCATION

Formal

SDN 06 JAKARTA
2010

SMPN 267 JAKARTA
2013

SMAN 90 JAKARTA
2016

UNIVERSITAS BRAWIJAYA – Majoring Business Administration (Finance)
2016 - Present